

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 **Gambaran Umum Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang**

Desa Wonosalam terletak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Luas desa Wonosalam adalah 1293,2 Ha yang terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Pucangrejo, Dusun Tukun, Dusun Notorejo, Dusun Wonosalam, Dusun Mangirjo dan Dusun Sumber. dimana, pada Dusun Pucangrejo terdapat 2 RW, Dusun Tukun terdapat 2 RW, Dusun Notorejo terdapat 1 RW, Dusun Wonosalam terdapat 2 RW, Dusun Mangirjo terdapat 2 RW dan Dusun Sumber terdapat 5 RW. Desa Wonosalam masuk dalam Kecamatan yang berada paling ujung sebelah tenggara Kabupaten Jombang. Berikut merupakan orbitasi dari Desa Wonokitri yang terdapat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Orbitasi dari Desa Wonosalam

No.	Uraian	Satuan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	1 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	35 Km

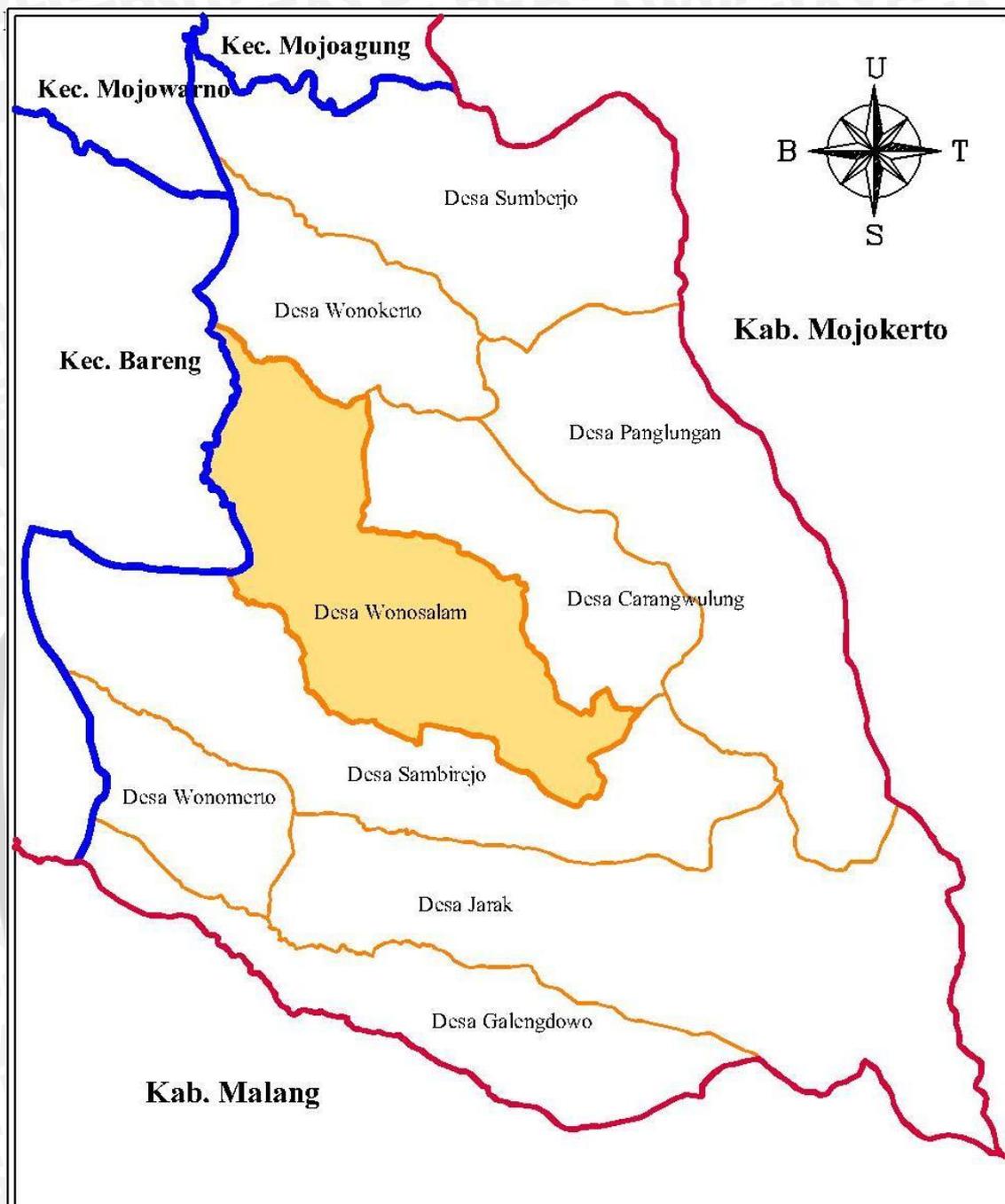
Sumber: Monografi Desa Wonosalam, 2009

Secara administratif Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam
- Sebelah Timur : Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam
- Sebelah Selatan : Desa Semberjo Kecamatan Wonosalam
- Sebelah Barat : Desa Glaran Kecamatan Barend

Untuk peta administrative Desa Wonosalam Bisa dilihat pada peta 4.1.

Tata guna lahan Desa Wonosalam sebagian besar digunakan untuk tanah hutan sebesar 52,20% dari luas Desa Wonosalam yang diantaranya adalah hutan produksi sebesar 297.6 Ha, hutan konvensi sebesar 198.9, hutan rakyat sebesar 103 Ha dan hutan lindung sebesar 75.5 Ha. Sedangkan untuk persentase penggunaan lahan terbesar ke dua adalah tanah sawah sebesar 17.13% diantaranya sawah irigasi teknis sebesar 0,31 Ha, sawah irigasi semi teknis sebesar 97.61 Ha, sawah tadah hujan sebesar 123.61 Ha. Untuk penggunaan lahan di Desa Wonosalam lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel 4.2.

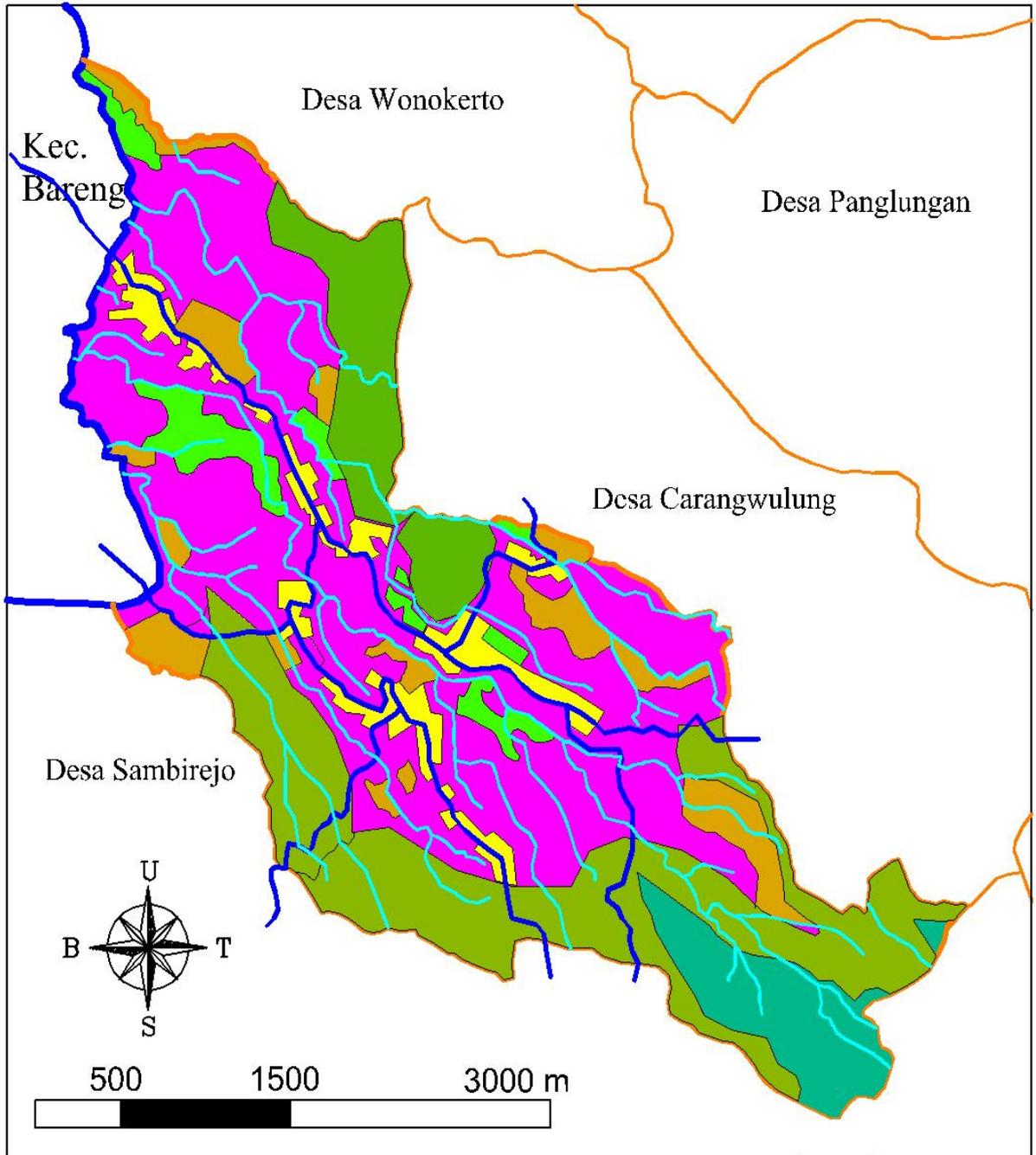


GAMBAR 4.1
PETA KONSTELASI DESA WONOSALAM
TERHADAP KEC. WONOSALAM

	<ul style="list-style-type: none"> : Batas Administrasi Kabupaten : Batas Administrasi Kecamatan : Batas Administrasi Desa : Desa Wonosalam <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>1000 3000 6000 m</p> </div>
--	---

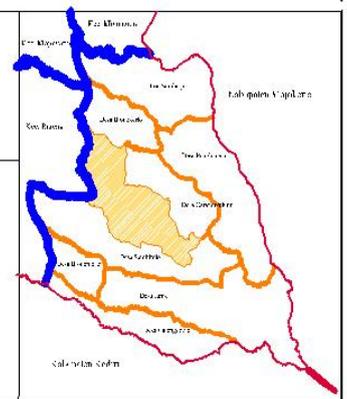
Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang





**PETA 4.2
TATA GUNA LAHAN
DESA WONOSALAM**

- | | |
|---|---|
|  : Batas Administrasi Desa |  : Kebun |
|  : Jalan Desa |  : Sawah |
|  : Hutan Lindung |  : Pemukiman |
|  : Hutan Produksi |  : Tegalan |
|  : Hutan Rakyat |  : Sungai |



Sumber: Perum Perhutani KPN Jombang

Tabel 4.2 Tata Guna Lahan Desa Wonosalam

Uraian Penggunaan	Luas (Ha)	persentase
Tanah sawah		
• Sawah irigasi teknis	0.31	0.03%
• Sawah irigasi semi teknis	97.61	8.92%
• Sawah tadah hujan	123.61	11.30%
Tanah kering		
• Tegal/ladang	2.75	0.25%
• Permukiman	13.50	1.23%
Tanah perkebunan		
• Perkebunan rakyat	32.56	2.98%
• Perkebunan negara	115.00	10.51%
• Perkebunan swasta	32.56	2.98%
Tanah fasilitas umum		
• Tanah kas desa	75.30	6.88%
• Perkantoran pemerintah	50.00	4.57%
• Lapangan	15.00	1.37%
• Kuburan	20.00	1.83%
• Lainnya	40.00	3.66%
Tanah hutan		
• Hutan lindung	75.50	6.90%
• Hutan produksi	297.60	27.20%
• Hutan rakyat	103.00	9.41%
Jumlah	1293.20	100.00%

Sumber: Monografi Desa Wonosalam, 2009

4.1.1 Kondisi Sosial Kependudukan Desa Wonosalam

Jumlah penduduk di Desa Wonosalam pada Tahun 2009 yaitu sebanyak 2.913 jiwa, terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 1384 jiwa dan perempuan 1529 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 711.

4.1.1.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Secara umum jumlah penduduk perempuan di Desa Wonosalam lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan diagram perbandingan prosentase antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di Desa Wonosalam dapat dilihat pada tabel 4.3 dan gambar 4.2.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Wonosalam Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)	Jumlah KK
1	Laki-laki	1384	47.5	711
2	Perempuan	1529	52.5	
	Jumlah	2913	100	711

Sumber: Monografi Desa Wonosalam, 2009

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin



Gambar 4.1 Diagram Prosentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Desa Wonosalam tahun 2009

Sumber: Monografi Desa Wonosalam, 2009

Dari diagram prosentase penduduk laki-laki dan perempuan pada gambar 1.1, diketahui bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan (52.5%) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki (47.5%).

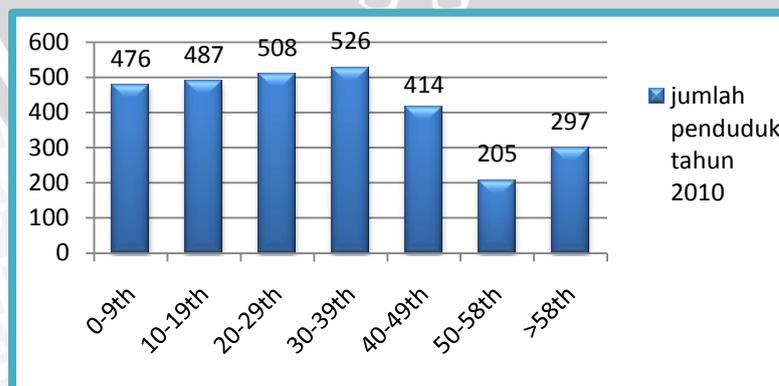
4.1.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Data jumlah penduduk menurut usia di Desa Wonosalam tahun 2009 dibagi menurut usia penduduk tiap 10 tahun. Data selengkapnya tentang jumlah penduduk desa menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Wonosalam Menurut Kelompok Usia Tahun 2009

No	Usia	Jumlah	Presentasi
1	0-9 tahun	476	16.35%
2	10 - 19 tahun	487	16.72%
3	20-29 tahun	508	17.24%
4	30-39 tahun	526	18.05%
5	40-49 tahun	414	14.22%
6	50-58 tahun	205	7.05%
7	>58 tahun	297	10.19%
Jumlah		2913	100.00%

Sumber: Monografi Desa Wonosalam, 2009



Gambar 4.2 Diagram Prosentase Penduduk Menurut Umur

Sumber: Monografi Desa Wonosalam, 2009

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menurut usia di Desa Wonosalam merata, artinya hanya tidak terlalu banyak selisih jumlah antara kelompok umur satu dengan yang lainnya. Jumlah angkatan penduduk yang tertinggi yaitu berumur 30-39 dengan jumlah 526 jiwa, kemudian penduduk dengan umur 20-29 dengan jumlah sebesar 507 jiwa dan terbesar ketiga sebanyak 487 jiwa dengan umur 10-19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usia produktif di Desa Wonosalam lebih besar dari pada usia non produktif.

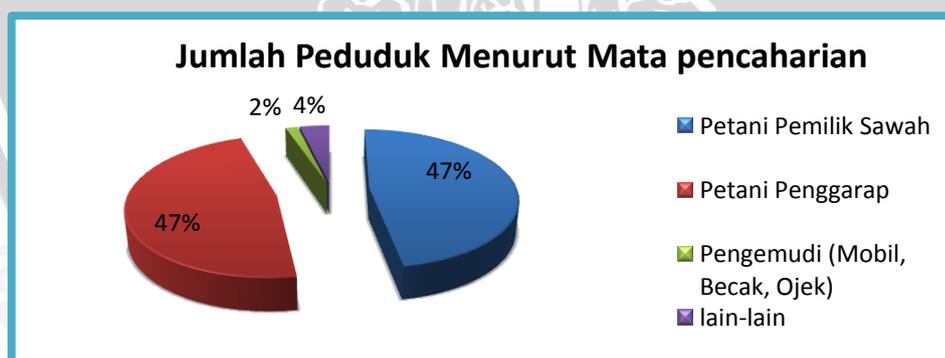
4.1.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Desa Wonosalam yang mempunyai pekerjaan sebesar 48.7 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Desa Wonosalam. Sebagian besar dari penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah penduduk dengan usia produktif.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Wonosalam Menurut Mata Pencaharian Tahun 2009

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani Pemilik Sawah	672
Petani Penggarap	672
Pengemudi (Mobil, Becak, Ojek)	21
Pedagang/Penjual Makanan/Warung/Toko	18
Wiraswasta/Wirusaha	16
Karyawan perusahaan	8
PNS/Pensiunan	3
Tukang/Buruh Bangunan	7
TNI/Polri/Pensiunan	1
Jumlah	1419

Sumber: Monografi Desa Wonosalam Tahun 2006



Gambar 4.3 Diagram Prosentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sumber: Monografi Desa Wonosalam Tahun 2006

Besarnya penduduk yang mempunyai pekerjaan pada usia produktif menunjukkan bahwa redahnya tingkat pengangguran di Desa Wonosalam. Untuk pembagian penduduk menurut mata pencaharian di Desa Wonosalam lebih jelas bisa dilihat pada tabel 4.3.

Mata pencaharian penduduk Desa Wonosalam sebagian besar bekerja sebagai petani yang memiliki sawah dan petani penggarap atau buruh tani. Persentasi jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani pemilik sawah sebesar 47% dan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani sebesar 47%. Pekerjaan lain yang banyak dilakukan penduduk di Desa Wonosalam adalah bekerja sebagai pengemudi mobil, becak atau ojek yaitu sebesar 4%. Sedangkan pekerja lain-lain sebesar 2% yaitu bekerja sebagai pedagang, wiraswasta/wirusaha, karyawan, PNS/pensiunan, tukang/buruh bangunan dan TNI/POLRI/pensiunan.

4.1.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Wonosalam masih sangat rendah, hal ini diketahui dari sedikitnya jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan dari tingkat SD sampai SMP. Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan pada tahun 2009 hanya sebesar 30% dari seluruh jumlah penduduk Desa Wonosalam. Untuk data jumlah penduduk Desa Wonosalam menurut tingkat pendidikan tahun 2009 bisa dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Wonosalam Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
Jumlah penduduk buta huruf	17	2.0%
Belum sekolah	103	11.8%
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	212	24.3%
Tidak tamat SD	40	4.5%
SD/ sederajat	258	29.5%
SLTP/ sederajat	134	15.3%
SLTA/ sederajat	96	11.0%
D-1	8	0.9%
D-2	0	0.0%
D-3	6	0.7%
S-1	0	0.0%
S-2	0	0.0%
Jumlah	874	100.0%

Sumber : Monografi Desa Wonosalam Tahun 2006

Dari diagram dapat dilihat bahwa prosentase terbesar tingkat pendidikan penduduk adalah tamat D3 sebanyak enam orang. Hal ini disebabkan karena fasilitas SLTA yang berada paling dekat dengan Desa Wonosalam terlalu jauh sehingga biaya transportasi cukup tinggi. Sedangkan untuk kecamatan Wonosalam sendiri tidak terdapat SMA.



Gambar 4.4 Diagram Prosentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Meskipun kebanyakan masyarakat di Desa Wonosalam adalah lulusan SD, tingkat buta huruf hanya berjumlah 17 orang atau 2% dari seluruh jumlah penduduk yang umurnya di atas 10 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga dipengaruhi adanya pola pikir masyarakat bahwa pendidikan masih kurang diperhatikan. Sehingga masih banyak warga yang hanya menganggap lulus SD saja sudah merupakan hal yang baik.

4.1.2 Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Wonosalam

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang terutama masyarakat sekitar hutan masih tergolong dalam masyarakat miskin karena rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan masih rendahnya juga tingkat pendidikan yang dapat diraih. Selain itu kurangnya pemahaman dalam pengelolaan hutan sehingga tidak ada inovasi-inovasi atau pengembangan dalam pengelolaan hasil hutan yang menyebabkan ketergantungan hasil hutan. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penebangan hutan untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Tabel 4.7 Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga Desa Wonosalam

No.	Uraian	Jumlah
1	Keluarga Pra sejahtera	292
2	Keluarga Sejahtera I	202
3	Keluarga Sejahtera II	142
4	Keluarga Sejahtera III	49
5	Keluarga Sejahtera III Plus	26
	Jumlah	711

Sumber: Monografi Desa Wonosalam, 2009

4.1.3 Kondisi Kemiskinan di Wilayah Sekitar Hutan

Kondisi kemiskinan menurut data Jombang Dalam Angka tahun 2009, jumlah rumah tangga miskin pada wilayah Kecamatan yang memiliki kawasan hutan terdapat pada tabel 4.7.

Tabel 4.8 Rumah Tangga Miskin Di Wilayah Desa Hutan Kecamatan Wonosalam

Desa	Jumlah KK	Jumlah KK miskin	% KK miskin	Luas Petak Pangkuan (Ha)
Jarak	993	213	21,45%	
Sambirejo	873	185	21,19%	1,119.20
Wonosalam	2.326	488	20,98%	534
Carangwulung	1.28	275	21,48%	545
Panglungan	1.036	191	18,44%	200
Wonosalam	711	150	21,04%	175
Sumberjo	1.224	307	25,08%	135

Sumber: Laporan Kependudukan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Triwulan 1 thn 2009

Indikator kemiskinan menurut laporan kependudukan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Triwulan 1 tahun 2009 pada tabel 4.7 diantaranya:

1. Jenis lantai Tanah/papan/Kualitas rendah
2. Jenis dinding Bambu/papan kualitas rendah
3. Tidak punya WC/Jamban
4. Sumber air minum bukan Air bersih
5. Penerangan Bukan listrik
6. Bahan bakar Kayu/arang
7. Makan <2 kali sehari
8. Beli daging/Ayam/susu dlm seminggu
9. Beli pakaian baru ART setahun sekali
10. Tidak mampu Berobat ke Puskesmas/Poliklinik
11. Pendapatan < 600 ribu per bulan
12. Pendidikan Kepala RT SD/Tdk tamat SD
13. Aset Berharga < 500 ribu

Rumah Tangga Miskin yang terdapat di masing-masing Kecamatan tersebut sebagian besar berada di wilayah hutan dimana hampir 90% bekerja sebagai petani maupun peladang hutan. Adanya rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan yang memiliki kawasan hutan tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, dimana menurut Bappeda, penyebab pergeseran tersebut akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan, PHK dan tidak terkelolannya potensi yang ada.

Menurut tabel 4.8 mengenai jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Wonosalam pada tahun 2009, Desa Wonosalam menempati peringkat ke enam atau berada di peringkat bawah dari ketujuh desa yang terdapat di Kecamatan Wonosalam. Hal ini dikarenakan telah berhasilnya program, pemerintah berupa pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hasil hutan dengan membuka usaha kecil untuk mengembangkan hasil perkebunan berupa barang jadi dan barang setengah jadi seperti pada pengelolaan kripik singkong dan pembuatan pupuk organik.

Perilaku masyarakat di wilayah sekitar hutan di Desa Wonosalam selama ini masih berorientasi pada kerangka pemenuhan kebutuhan dasar saja Mereka rata-rata hidup dengan pola pertanian subsisten (pertanian seadanya) seperti padi, jagung, kacang tanah, ketela pohon ataupun dengan mengumpulkan bahan dari hutan.

Kurangnya pendapatan masyarakat desa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dalam pola cocok tanam untuk meningkatkan hasil pertanian membuat masyarakat di Desa Wonosalam untuk melakukan penggundulan hutan. Kegiatan penggundulan hutan ini diantaranya mengakibatkan konversi hutan menjadi lahan pertanian maupun perkebunan serta melakukan pemungutan/pemanenan tegakan hutan secara berlebihan menyebabkan tingkat kerusakan hutan menjadi semakin tidak bisa dikendalikan sehingga dapat menimbulkan bahaya tanah longsor, banjir bandang dan rusaknya ekosistem hutan.

Menurut BPS Kabupaten Jombang tahun 2009, Masyarakat hutan atau sekitar hutan yang ada di Kecamatan Wonosalam, termasuk Desa Wonosalam merupakan lingkungan kawasan hutan dalam kategori BPS termasuk desa dengan tingkat RTM tinggi. Untuk data rumah tangga miskin Desa Hutan KPH Jombang, lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.8 yaitu jumlah rumah tangga miskin di Desa Wonosalam pada tahun 2009 sebanyak 150 rumah tangga dengan luas petak pangkuan seluas 135 Ha.

Banyak penduduk Desa Hutan Wonosalam terutama yang berada di sekitar kawasan hutan, memanfaatkan hutan sebagai tempat bergantung untuk mendapatkan penghasilan. Sebagian besar masyarakat yang tergantung dari hutan menggabungkan kegiatan berladang dan berkebun dengan menanam tanaman polowijo seperti padi, jagung, kacang tanah, ketela pohon. Perilaku masyarakat khususnya yang berada di wilayah sekitar hutan selama ini masih dipahami pada kerangka pemenuhan kebutuhan dasar saja. Padahal jika diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan maka perlu adanya sistem pengelolaan hutan secara komprehensif meliputi menanam, memelihara dan memanfaatkan. Keterbatasan yang berlangsung selama ini sebagai akibat dari

belum mampunya masyarakat dalam penguasaan teknologi khususnya sebagai produsen (jangka pendek dapat diisi dengan berbagai komoditi, sedangkan jangka panjang menuju hutan lestari sesuai fungsi hutan) baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.

4.1.4 Penyebab Kemiskinan Bagi Masyarakat Hutan

Banyak masyarakat Desa Wonosalam yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya, termasuk hutan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan, nomor P.01/Menhut-II/2004, tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam atau Sekitar Hutan Dalam Rangka *Social Forestry* pada pasal 1 ayat (3). Masyarakat sekitar hutan banyak yang memanfaatkan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya sistem pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik yang menimbulkan konglomerasi, perbedaan akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan dan hasil hutan di sekitarnya dapat terganggu. Masyarakat sering kali hanya menjadi penonton atas pengeksploitasian sumber daya hutan oleh HPH yang telah diberi hak pengelolaan hutan oleh pemerintah sehingga terjadi kesenjangan dan bahkan menjadi konflik social antara masyarakat desa hutan dengan pemerintah dan HPH yang dapat menimbulkan perpecahan dalam pengelolaan hutan secara bersama.

Menurut ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonosalam Asri, Kesempatan masyarakat lokal yang ada di Desa Wonosalam untuk dapat berperan dalam pembangunan jangka panjang sektor kehutanan terhambat oleh beberapa faktor seperti:

- a. Kekurangan modal;
- b. Keahlian dan teknologi untuk mengelola sumberdaya hutan mereka secara mandiri.
- c. Masyarakat desa belum cukup memiliki kemampuan bernegosiasi dengan mitra kerja dalam pengelolaan sumber daya hutan

Terjadinya kemiskinan pada masyarakat desa hutan Wonosalam adalah akibat dari rendahnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan dan hasil hutan yang ada di sekitarnya. Rendahnya akses masyarakat diakibatkan oleh kurangnya sinergisitas penanganan dalam pengelolaan hutan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perum Perhutani maupun stakeholders sehingga memungkinkan masyarakat desa hutan

selalu dalam kondisi tertinggal. Dari kenyataan yang ada tersebut penyebab kemiskinan masyarakat hutan diakibatkan oleh :

- a. Rendahnya penguasaan aspek teknologi, yakni masyarakat yang berada pada kawasan hutan tidak mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas usaha bidang kehutanan dengan tetap memperhatikan sumber daya lokal.
- b. Rendahnya penguasaan aspek manajemen, yakni masyarakat tidak mampu mengelolah kawasan hutan di Desa Wonosalam untuk kepentingan jangka panjang akan tetapi hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan harian.
- c. Rendahnya kemampuan dalam mengembangkan ekonomi, yakni kemampuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, peluang usaha dan akses informasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Rendahnya pemahaman terhadap aspek ekologi, yaitu kepekaan yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat.
- e. Rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum, antara lain minimnya informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan.

4.1.5 Potensi Ekonomi Desa Hutan

Potensi Ekonomi desa hutan di desa Wonosalam meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya rekayasa. Sumberdaya alam yang terdapat di Desa Wonosalam seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan potensi sumberdaya rekayasa adalah sumberdaya yang merupakan hasil rekayasa manusia misalnya UKM kerajinan, dan agrobisnis.

Potensi ekonomi di kawasan desa hutan didominasi oleh sumberdaya alam yang memanfaatkan lahan milik Perhutani KPH Jombang yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonosalam Asri. dan masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Disamping itu juga ada potensi lain sebagai potensi tambahan misalnya beternak dan dan berkebun. Hasil kebun dari Desa Wonosalam berupa durian dan coklat di Desa Wonosalam merupakan komoditas utama yang hasilnya banyak dijual sampai

keluar kota. Adapun sumberdaya rekayasa adalah membuat kerajinan tangan namun pada umumnya jumlahnya relatif kecil.

Usaha-usaha produktif yang dimiliki oleh masyarakat (dalam hal ini LMDH) dapat dikelompokkan ke dalam sektor hutan, industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan jasa. Dari usaha-usaha produktif yang telah dijalankan oleh LMDH dan sudah terbentuk pada masyarakat desa hutan Wonosalam yang paling banyak dijalani adalah usaha produktif di bidang pertanian dan perkebunan.

Menurut Perhutani KPH Jombang, LMDH Wonosalam Asri saat ini tengah mengadopsi usaha yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Nganjuk yaitu pengembangan tanaman Porang. Tanaman ini hidup subur di kawasan hutan tropis dan ternyata memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bisa ditanam di dataran rendah, Porang dengan mudah hidup di antara tegakan pohon hutan seperti misalnya Jati dan Pohon Sono.

Tanaman ini dikembangkan karena prospeknya sangat bagus, selain untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, manfaatnya juga untuk menopang kelestarian hutan. Keunggulan lainnya adalah dapat diekspor keluar negeri, sebagai bahan dasar pembuatan tepung mie dan criping, serta rantingnya laku dijual.

Selain itu, hasil perkebunan yang dijadikan sebagai komoditas utama adalah buah durian dan cokelat. Buah durian dan cokelat dari Desa Wonosalam banyak dijual sampai keluar kota.

4.1.6 Pemasaran Hasil Hutan

Hasil hutan dibawah tegakan yang dikelola masyarakat desa hutan memiliki kriteria sebagai berikut :

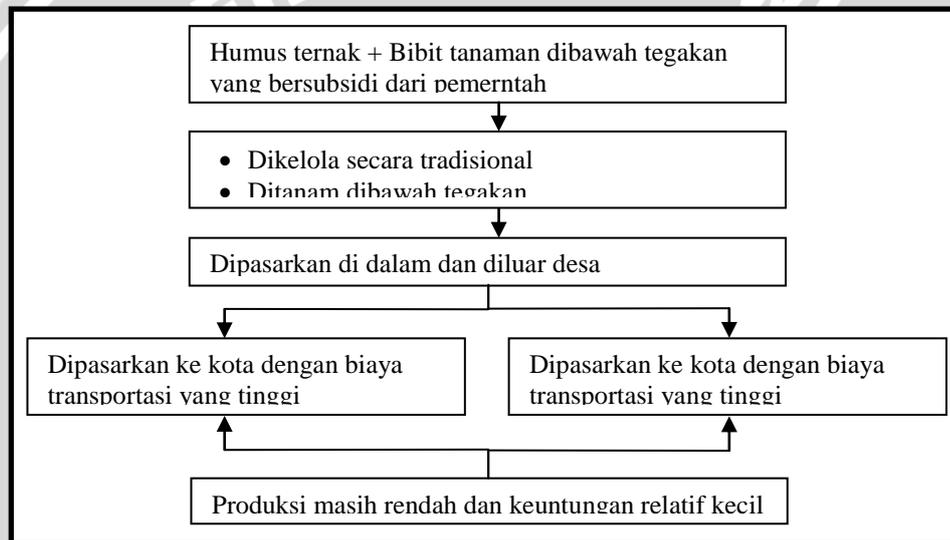
1. Dikelola secara tradisional,
2. Umumnya ditanam di bawah tegakan.
3. Produktivitas masih relatif rendah.

Pengelolaan secara tradisional yang dimaksud adalah dengan alat yang masih sederhana dengan membajak menggunakan hewan dan sebagian tenaga kerja diambil dari kalangan keluarga sendiri, sehingga produktivitas yang dihasilkan relatif rendah, tapi apabila dikonversikan secara ekonomis masih menguntungkan meskipun relatif kecil.

Pada umumnya sarana produksi seperti pupuk bisa diperoleh alami berupa humus. Disamping itu masih terdapat kendala dalam hal transportasi sehingga produksi pertanian yang dihasilkan dengan biaya murah akan tetapi butuh biaya transportasi yang mahal.

Secara umum terdapat beberapa kendala pemasaran hasil-hasil hutan di Desa Wonosalam antara lain :

1. Harga komoditi hasil tanaman dibawah tegakan berupa temulawak, jahe, kencur dan kunyit yang sering naik-turun secara tajam.
2. Tidak memadainya fasilitas seperti gudang dan lain-lain.
3. Kurangnya respon lembaga keuangan dalam menunjang kegiatan usaha produktif komoditi kehutanan.



Gambar 4.5 Diagram Pemasaran Hasil Hutan Dibawah Tegakan di Desa Wonosalam

Selain terdapat kelemahan dalam pemasaran hasil pertanian desa hutan juga kendala yang menyangkut transportasi disebabkan letak/lokasi lahan yang lokasinya jauh dari jalan umum sehingga posisi petani menjadi lemah dan dengan biaya transportasi tinggi (*high cost*) yang membebani pemasaran.

Komoditas durian dan cokelat penjualan langsung ditebas oleh pembeli yang akan menjual hasil kebun tersebut untuk dijual ke pasar sampai ke luar kota. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat desa hutan Wonosalam sulit menembus jaringan pasar yang luas sebagian besar hanya dijual secara lokal dengan harga yang relatif rendah. Oleh karena itu untuk mendongkrak perekonomian desa hutan diperlukan campur tangan berupa fasilitasi dengan membuka jaringan pasar luar yang diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan berusaha dan menyerap tenaga kerja, baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

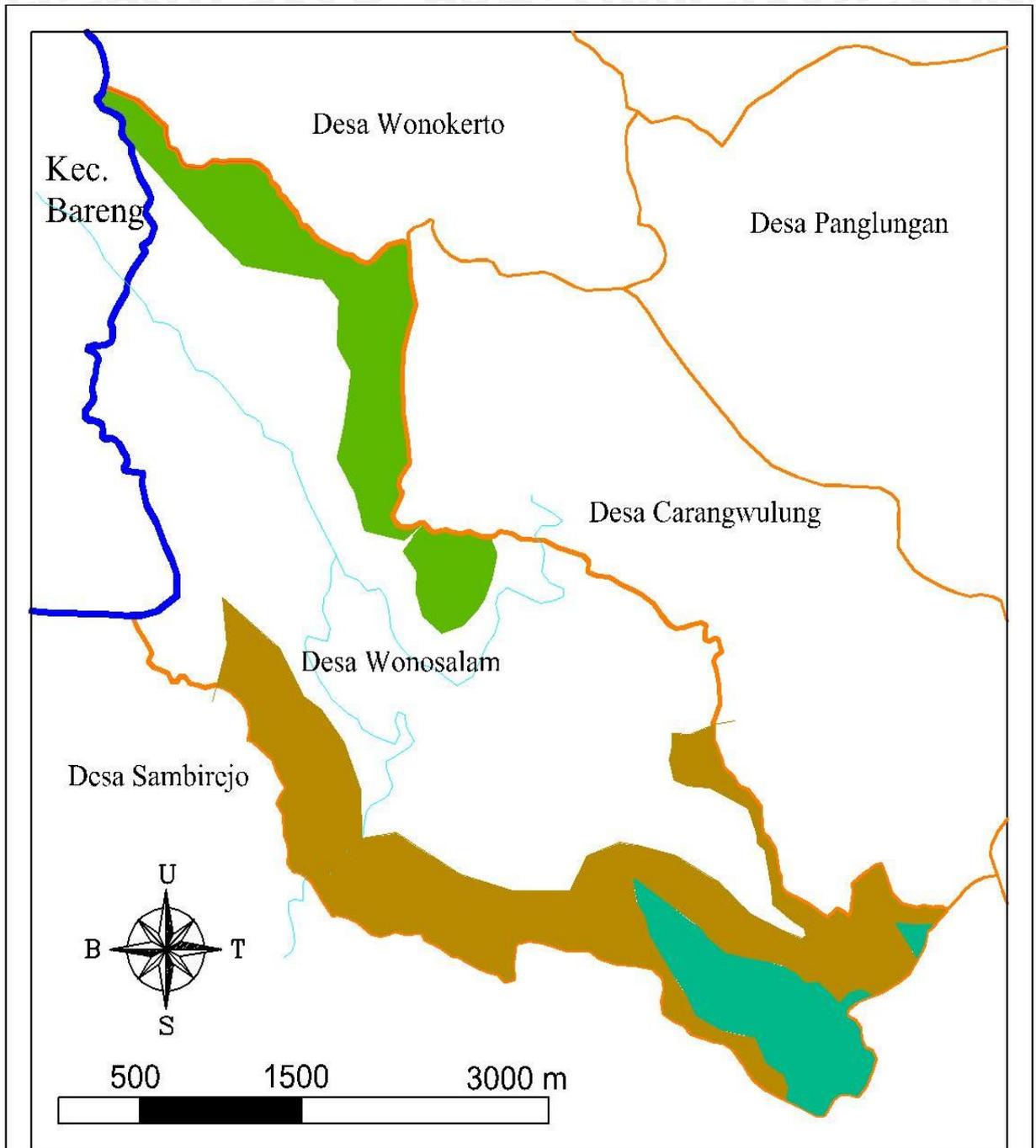
4.2 Kondisi Fisik

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan disebutkan bahwa berdasarkan fungsinya hutan (negara) dibedakan menjadi :

- a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna pengaturan tata air , pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
- b. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukan untuk produksi hasil hutan dalam rangka memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
- c. Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan karena sifatnya yang khas diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati.

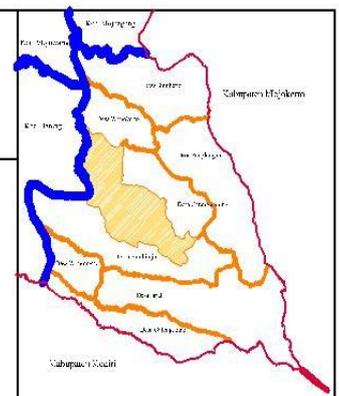
Hutan yang berada di Desa Wonosalam bila ditinjau dari fungsinya adalah sebagai hutan produksi yang kepemilikannya diberikan kepada masyarakat (disebut hutan rakyat) dan hutan produksi yang kepemilikannya diberikan kepada Negara (disebut hutan kawasan) yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jombang - Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Gedangan. Menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pada bab 1 pasal 1, yang dimaksud hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Peta hutan produksi berdasarkan kepemilikannya dapat dilihat pada peta 4.2. sedangkan berdasarkan tipe iklim dan letaknya, hutan yang berada di Desa Wonosalam tergolong sebagai tipe hutan hujan pegunungan atau disebut juga hutan hujan tropika pegunungan dengan ketinggian 1.000 - 1.700 meter di atas permukaan laut (dpl).

Kondisi fisik hutan di Desa Wonosalam merupakan tanah kering, sebagian kecil lagi merupakan tanah basah dan ini tidak berlangsung lama karena terpengaruh musim karena Desa Wonosalam merupakan bagian dari Pegunungan Anjasmoro.



PETA 4.2
PEMBAGIAN HUTAN BERDASARKAN
FUNGSI NYA DI DESA WONOSALAM

-  : Batas Administrasi Desa
-  : Jalan Desa
-  : Hutan Lindung
-  : Hutan Produksi
-  : Hutan Rakyat



Sumber : Perum Perhutani KPII Jombang

Menurut data dari perhutani KPH Jombang, produksi kayu pertukangan jati mengalami penurunan dari 3.716 m³ menjadi 3.033 m³ pada tahun 2009. Sedangkan kayu pertukangan rimba mengalami peningkatan sebesar 351 m³ pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.056 m³. Hal ini terjadi karena penurunan kualitas tanah atau menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berada di Kecamatan Wonosalam yang terjadi akibat dari bencana longsor. Hutan produksi di Kabupaten Jombang yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air yaitu berada di KPH Gedangan Kecamatan Wonosalam seluas 1.445 Ha yang memiliki keterlerangan 25-40 %.



Gambar 4.6 Kayu Jati hasil hutan KPH Jombang



Gambar 4.7 Kayu Mahoni hasil hutan KPH Jombang



Gambar 4.8 Kayu Sengon hasil hutan KPH Jombang

4.2.1 Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan di Desa Wonosalam dibagi menjadi dua yaitu *deforestasi* dan *degradasi*. *Deforestasi* yang terjadi di Desa Wonosalam terjadi karena perubahan total dari hutan dengan cara dibuka atau dikonversi untuk kepentingan non hutan yang menyebabkan kemusnahan. Hutan yang dikonversi adalah hutan rakyat yang hak dan pengusahaannya diberikan pada rakyat. Sedangkan *degradasi* hutan diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam suatu kelas hutan yang berpengaruh terhadap tegakan dan atau tempat tumbuh khususnya dalam penurunan kapasitas produksi dan kondisi lingkungan juga terjadi karena adanya penurunan jumlah produksi tebangan hutan. Seperti pada jumlah produksi kayu pertukangan jati yang mengalami penurunan dari 3.716 m³ menjadi 3.033 m³ pada tahun 2009. Sedangkan untuk kelas dibawahnya yaitu kayu pertukangan rimba berupa kayu mahoni dan sengon mengalami peningkatan sebesar 351 m³ pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.056 m³.

Deforestasi hutan di Desa Wonosalam disebabkan oleh pembukaan kawasan hutan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Sedangkan *degradasi* hutan di di Desa Wonosalam disebabkan oleh bencana longsir yang menyebabkan penurunan kualitas tanaman sehingga kualitas tanaman tegakan menjadi menurun

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan berbagai macam manfaat hutan. Dampak yang akan muncul adalah pemanfaatan sumber daya hutan tidak akan berkelanjutan untuk generasi mendatang nanti.

Desa Wonosalam termasuk daerah yang rawan dan berpotensi terkena bahaya tanah longsor. Keadaan ini dikarenakan adanya alairan sungai yang melewati kawasan tersebut seringkali meluber karena dipicu oleh tingginya debit air hujan.

Terganggunya keutuhan hutan akan dapat menimbulkan bahaya erosi tanah. Erosi tanah adalah suatu proses hilangnya lapisan permukaan tanah atas (*top soil*), baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan menurunnya produktivitas tanah dan daya dukung tanah. Penanaman tanaman sayuran di dalam kawasan hutan bisa meningkatkan terjadinya erosi tanah. Seringkali selama musim hujan, sejumlah besar lapisan tanah dan air bergerak meluncur ke bawah dan merusakkan lapisan tanah atas yang banyak mengandung unsur hara. Jadi selain erosi tanah, bahaya lainnya yang mengancam adalah longsor.

Identifikasi tingkat kerusakan lahan menurut perum perhutani KPH Jombang pada lokasi yang rawan bencana alam, antara lain :

1. Kerusakan pada areal lahan perhutani pada perbatasan Tahura R. Soeryo dengan kondisi kelerengan diatas 40° , yang pada saat bencana longsor dan banjir bandang, diusahakan untuk tanaman semusim (Jagung, Wortel dll) merupakan areal yang rawan terhadap erosi dan tanah longsor.
2. Lokasi lahan perhutani pada areal Tahura R. Soeryo. Pada lahan tersebut hanya ditumbuhi alang-alang sehingga daya resap air sangat rendah untuk menampung air hujan.

4.2.1.1 Longsor

Berdasarkan dari perhutani, menurut identifikasi lahan kritis hampir disemua wilayah hutan yang ada di Kabupaten Jombang terdapat lahan kritis yang disebabkan oleh perubahan fungsi hutan, hal ini memicu terjadinya bahaya longsor terutama pada wilayah hutan dengan tingkat kemiringan lebih dari 45° seperti yang banyak terdapat di Desa Wonosalam, kemungkinan terjadinya longsor tersebut dipicu oleh :

- a. Peningkatan kandungan air dalam lereng sehingga terjadi akumulasi air yang merenggangkan ikatan antar butir tanah dan akhirnya mendorong butir-butir tanah untuk longsor.
- b. Peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah, beban yang berlebihan ini dapat berubah pohon-pohon yang terlalu rimbun dan rapat yang ditanam pada lereng lebih curam dari 40° .

Dari kondisi yang ada tersebut ditinjau dari sisi teknis yaitu Hidrologis dan Topografis, di daerah Kecamatan Wonosalam merupakan lokasi tertinggi di Kabupaten Jombang, yang sebagian besar wilayahnya merupakan Hutan dan Perkebunan dengan tingkat Curah Hujan paling tinggi yaitu sebesar 11.290 mm/tahun. Disamping itu Topografi di wilayah Kecamatan Wonosalam sebagian besar terdiri dari pegunungan dan banyak terdapat bukit serta lembah yang merupakan jajaran pegunungan Anjasmoro, yang sebagian besar wilayahnya memiliki kondisi kemiringan lereng lebih dari 40° , hal ini yang menyebabkan kondisi lahan yang ada berupa bukit dan lembah yang curam, yang lembah tersebut beberapa diantaranya berupa sungai dengan debit yang cukup besar dan alirannya kontinyu sepanjang tahun.

Menurut Laporan rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang tahun 2009, Daerah yang dikategorikan rawan terhadap penggundulan hutan di Kabupaten Jombang yaitu di sekitar Kecamatan Wonosalam termasuk Desa Wonosalam. Di Desa Wonosalam banyak dijumpai ladang atau tegalan dan lahan terbuka pada lereng tengah-atas yang seharusnya adalah kawasan lindung. Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan masa tanah atau batuan ataupun bercampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Pemicu dari terjadinya gerakan tanah/tanah longsor dan erosi adalah curah hujan yang tinggi serta kelerengan tebing.

Desa Wonosalam termasuk daerah rawan dan berpotensi terkena bahaya tanah longsor. Keadaan ini dikarenakan adanya aliran sungai yang melewati kawasan tersebut seringkali meluber karena dipicu oleh tingginya debit air hujan.

4.2.1.2 Erosi

Kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, dan Kecamatan Plandaan. Secara topografis, Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling tinggi (lereng tengah-atas), sementara itu Kecamatan Bareng, Mojoagung dan Mojowarno terletak

pada lereng kaki, dan Kecamatan Sumobito terletak pada dataran kaki dari Bukit Anjasmoro. (RTRW Kab Jombang 2009-2029)

Tabel 4.9 Tingkat Bahaya Erosi tiap Kecamatan di Kabupaten Jombang

No	Kecamatan	Tingkat Bahaya Erosi		Total Luas
		Berat	Sangat Berat	
1.	Bareng	617.41	304.35	921.8
2.	Kabuh	3386.64	696.70	4083.3
3.	Kudu	8.36	-	8.4
4.	Mojoagung	302.27	19.99	322.3
5.	Mojowarno	149.82	17.82	167.6
6.	Plandaan	7506.36	1626.62	9133.0
7.	Wonosalam	1748.6	2058.3	3806.9
Jumlah		13719.5	4723.8	18443.2

Sumber: RTRW Kab Jombang, 2009

4.2.2 Faktor Kerusakan Hutan

Pengelolaan sumber daya hutan secara bijaksana dan berkelanjutan telah menjadi kebijakan pemerintah dengan diterbikannya berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam prakteknya telah terjadi pemanfaatan Sumber Daya Hutan baik oleh masyarakat desa hutan atau pengusaha yang memiliki akses terhadap pemanfaatan hutan secara berlebihan. Penebangan liar/perambahan hutan yang tidak terkendali mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang diindikasikan menurunnya luasan hutan sehingga terjadi bencana longsor. Terjadinya penebangan liar di dalam kawasan hutan tersebut dikarenakan oleh minimnya tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan pada kawasan hutan itu sendiri, keterbatasan yang selama ini menjadi penyebab rusaknya hutan adalah :

- a. Keterbatasan pada aspek teknologi, yakni masyarakat yang berada pada kawasan hutan tidak mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas usaha bidang kehutanan dengan tetap memperhatikan sumber daya lokal.
- b. Keterbatasan pada aspek manajemen, yakni masyarakat tidak mampu mengelolah kawasan hutan untuk kepentingan jangka panjang akan tetapi hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Keterbatasan pengembangan ekonomi, yakni kemampuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya, peluang usaha dan akses informasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Keterbatasan pemahaman terhadap aspek ekologi, yaitu kepekaan yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat.
- e. Keterbatasan pada aspek sosial budaya, antara lain minimnya mengembangkan kondisi sosial dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat setempat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- f. Keterbatasan pemahaman terhadap aspek hukum, antara lain minimnya informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan.

Secara umum implikasi intervensi pemerintah daerah terhadap beberapa aspek di desa khususnya di wilayah hutan dan sekitar hutan dirasakan masih kurang. Faktor aksesibilitas berpengaruh terhadap kondisi perkembangan desa hutan. Kecenderungan daerah pedesaan dengan akses yang baik relatif mendapatkan lebih banyak dampak positif dari pembangunan dibandingkan daerah di dalam dan di luar kawasan hutan dengan akses sedang dan terpencil. Dari aspek ekonomi, aksesibilitas juga mempengaruhi tingkat harga barang atau bahan kebutuhan pokok. Ketersediaan fasilitas yang memadai khususnya yang berada di perkotaan maupun pedesaan yang jauh dari kawasan hutan ditunjang dengan lancarnya mobilitas alat transportasi, menyebabkan harga barang/bahan kebutuhan pokok relatif stabil. Berbeda halnya bagi desa-desa yang berada dalam kawasan hutan dengan jarak geografis yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi berpengaruh terhadap lonjakan harga. Kondisi ini semakin dipersulit oleh terbatasnya sumber mata pencaharian dan mekanisme pasar di tingkat lokal (khususnya dalam penjualan gaharu) yang tidak sehat dan cenderung merugikan masyarakat. Rendahnya daya beli masyarakat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga keinginan untuk memanfaatkan hasil hutan yang berdampak pada kerusakan hutan menjadi lebih besar karena untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

Selain itu, masalah pengelolaan hutan tidak terlepas dari pertimbangan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan hutan, antara lain :

a. Tersedianya lapangan pekerjaan

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat mempengaruhi proses pengelolaan hutan, dan bila lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat tersebut dapat menghambat pengelolaan hutan seperti banyaknya masyarakat yang bekerja di sector pertanian, sehingga di dalam pengelolaan hutan perlu menampung masyarakat agar dapat dilibatkan secara optimal.

b. Defisit kayu bakar dan kayu pertukangan

Apabila masyarakat di sekitar hutan menggunakan kayu atau renek sebagai bahan bakar, banyak terdapat pengrajin kayu atau pertukangan maka hal ini dapat menghambat proses pengelolaan hutan. Perlu diperhatikan pula laju pemakaian kayu untuk kebutuhan tersebut hingga perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan dalam mengeksploitasi hasil hutan (Departemen Kehutanan, 1996).

c. Defisit bahan pangan dan ternak

Apabila ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat di sekitar hutan terbatas, yang disebabkan oleh beberapa faktor alam, antara lain keterbatasan pemilikan lahan, maka akan berpengaruh pada cara hidup mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan hutan, sehingga pengelolaan hutan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan.

d. Kemungkinan untuk konservasi

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk konservasi perlu memperhatikan tanah, air, topografi, maupun pertukaran oksigen dan karbondioksida secara tepat sehingga pengelolaan hutan tidak berdampak negatif pada sisi lain. Selain itu pengelolaan hutan bisa dikembangkan untuk suaka alam atau obyek wisata (Simon dalam Isrowikah, 2003). Pengelolaan hutan harus ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan agar fungsi tanah, air, udara, dan iklim mampu memberikan manfaat bagi masyarakat (Arifin dalam Isrowikah, 2003).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan untuk kepentingan yang akan datang dapat membawa dampak pada beberapa faktor yang menimbulkan tekanan berat terhadap sumber daya hutan di Desa Wonosalam, antara lain :

- a. Konversi hutan untuk pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan;
- b. Penggundulan hutan;
- c. Pemungutan/pemanenan tegakan hutan secara berlebihan.

Terjadinya kerusakan hutan pada Kawasan Hutan Desa Wonosalam terjadi karena adanya factor perilaku manusia, perilaku pengusaha dan kebijakan pemerintah. Adanya factor manusia dan pengusaha yang seringkali mengeksploitasi sumber daya hutan dan kurangnya pedulian pada kondisi ekologi lingkungan di masa yang akan datang dapat menyebabkan banyaknya penggundulan hutan, maraknya illegal logging sehingga terjadi bencana longsor dan erosi.

4.2.2.1 Perilaku Manusia dan Pengusaha

Manusia sering memposisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki otonomi untuk menyusun perencanaan dan pengelolaan hutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun untuk anak cucunya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena manusia sering menganggap dirinya sebagai ciptaan yang lebih sempurna dari yang lainnya. Pemikiran antrhroposentris seperti ini menjadikan manusia sebagai pusat. Bahkan posisi seperti ini sering ditafsirkan memberi lisensi kepada manusia untuk “menguasai” hutan. Karena manusia memposisikan dirinya sebagai pihak yang dominan, maka keputusan dan tindakan yang dilaksanakanpun sering lebih banyak di dominasi untuk kepentingan manusia dan sering hanya memikirkan kepentingan sekarang daripada masa yang akan datang. Akhirnya hutan dianggap hanya sebagai sumber penghasilan yang dapat dimanfaatkan dengan sesuka hati. Masyarakat biasa melakukan pembukaan hutan dengan berpindah-pindah dengan alasan akan dijadikan sebagai lahan pertanian. Kalangan pengusaha menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan atau penambangan dengan alasan untuk pembangunan serta menampung tenaga kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran. Tetapi semua itu dilaksanakan dengan cara pengelolaan yang *exploitative* yang akhirnya menimbulkan kerusakan hutan. Dalam struktur birokrasi pemerintahan mentalitas demikian juga seakan-akan telah membuat aparat tidak serius untuk menegakkan hukum dalam mengatasi kerusakan hutan bahkan terlibat di dalamnya.

Kerusakan hutan yang terdapat di Desa Wonosalam bersumber dari beberapa faktor yang diantaranya berasal dari kegiatan masyarakat diantaranya dikarena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Masyarakat kurang mampu melakukan inovasi-inovasi dalam mengelola sumber daya hutan, sehingga hasil dari sumber daya hutan yang ada langsung dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menimbulkan permasalahan lingkungan yang menyebabkan hutan semakin gundul. Selain adanya masalah penebangan hutan untuk dijual, masyarakat juga melakukan pembukaan lahan pada hutan produksi untuk dijadikan lahan pertanian.

Permasalahan lingkungan yang terjadi Karena ketergantungan hasil hutan ini mengakibatkan pemanfaatan penebangan hutan secara terus menerus dan berlebihan untuk mengambil sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung sumber daya alam tersebut. Untuk mengejar kemakmuran, sumber daya alam dipandang sebagai faktor produksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam di Desa Wonosalam sampai saat ini lebih didasarkan kepada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi tanpa dibarengi pemulihan kondisi alam menjadi lebih baik lagi. Dengan perkataan lain sumber daya alam (hutan produksi) dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum dipahami sebagai *ecological & sustainabel sense*. Sementara itu di sisi lain ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitas. Perlakuan terhadap lingkungan yang demikian ini yang menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi terganggu yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik lingkungan antara eksploitir lingkungan yang biasanya pengusaha atau penanam modal dengan masyarakat yang merasa terganggu dengan turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut.

Konflik lingkungan antara peningkatan perekonomian masyarakat desa hutan Wonosalam yang tidak dibarengi dengan pemulihan kondisi ekologi hutan bisa terjadi sebagai akibat adanya bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis diantara institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang meliputi masyarakat, pemerintah dan pengusaha atau investor. Dalam hal ini terdapat pemahaman di kalangan pengusaha hasil hutan yang mengelola sebagian hasil hutan dari Kawasan Hutan Wonosalam mengatakan bahwa sumber daya alam yang terdapat di Kawasan hutan Wonosalam merupakan lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara kepadanya untuk dikelola secara komersial dengan tujuan memberikan keuntungan ekonomis yang besar. Dukungan dari pemerintah yang merupakan sumber

legalitas kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti adanya ijin-ijin penebangan oleh pengusaha tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan mencapai kesejahteraan dengan cara eksploitasi sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal justru seringkali tidak menyentuh masyarakat lokal tersebut. Lebih jauh upaya eksploitasi tersebut justru menjadi ancaman kehidupan social ekonomi mereka.

Perlakuan pengusaha yang didukung oleh pemerintah melalui kebijakannya yang tidak memihak dan tanpa melibatkan masyarakat yang biasanya sebagai penderita kerusakan lingkungan- menjadi pemicu utama terjadinya ketidakpuasan dalam masyarakat. Akumulasi ketidakpuasan yang bertemu dengan semangat berjuang memperbaiki nasib secara kolektif menjadi penyebab munculnya konflik ke permukaan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu pemicu timbulnya konflik lingkungan adalah adanya kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh pengusaha seringkali tidak memihak kepada masyarakat. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, seringkali masyarakat tidak dilibatkan, padahal dalam usaha pemanfaatan hasil hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan ini korbannya adalah masyarakat desa hutan sendiri. Manakala hubungan antara masyarakat dan pemerintah tidak harmonis dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan maka kemungkinan timbulnya konflik lingkungan semakin besar. Dalam rangka menghindari konflik lingkungan serta supaya pemanfaatan lingkungan dan memihak kepada kepentingan masyarakat maka monopoli akses terhadap lingkungan oleh pemerintah dan pengusaha harus mulai dikurangi dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan menjadi penting dilaksanakan untuk membentuk keseimbangan integrasi sosial antar komponen struktur sosial di atas. Dalam sosiologi, integrasi sosial lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk membentuk kedekatan hubungan baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik. Peran serta masyarakat ini dapat dijadikan sebagai proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat empat alasan yang menyebabkan adanya perilaku manusia dan pengusaha yang menyebabkan kerusakan hutan di Desa Wonosalam, diantaranya adalah adanya kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan, anggapan bahwa tingkat

kesuburan pada lahan jutan sangat tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah dan penjarahan hutan dan illegal logging.

Adanya Kemiskinan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan

Adanya kenyataan bahwa hampir semua masyarakat disekitar kawasan hutan adalah masyarakat miskin. Setiap wilayah mempunyai karakteristik kemiskinan tersendiri (Ali Djajono, 2009). Menurut Khaerul Tanjung (2006), masyarakat dipedesaan hanya mengandalkan sumber mata pencariannya dari sektor pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan masyarakat yang kurang mampu melakukan perluasan areal pertaniannya.

Sistem pertanian yang diterapkan oleh masyarakat desa hutan Wonosalam dengan sistem pertanian tradisional, akibatnya banyak lahan-lahan yang terbuka di luar kawasan menjadi lahan yang tidak produktif. Untuk meningkatkan produktifitas lahan salah satunya yang harus dimiliki adalah pengetahuan atau kemampuan dalam pengelolaan lahan dan ketersediaan modal. Sedangkan masyarakat disekitar kawasan hutan tidak memiliki kemampuan dan kurang atau tidak memiliki modal keuangan yang mencukupi.

Anggapan Bahwa Tingkat Kesuburan pada Lahan Hutan Sangat Tinggi

Selama ini banyak yang beranggapan bahwa kawasan hutan yang selalu hijau dan dihuni oleh pohon-pohon yang besar, memiliki lahan yang subur. Anggapan ini yang sebenarnya mendorong bagi perambah untuk melakukan perluasan lahan di kawasan hutan disamping ada faktor-faktor lainnya. Padahal masih banyak lahan-lahan di luar kawasan yang masih bisa dimanfaatkan untuk areal pertanian maupun perkebunan. Anggapan yang menganggap bahwa lahan hutan subur adalah anggapan yang keliru. Tanah-tanah di hutan yang nampaknya lebih subur sangat rentan terhadap gangguan dari faktor luar. Kesuburan tanah di hutan terjadi karena perjalanan waktu yang panjang sehingga ekosistem hutan menjadi stabil. Stabilitasnya ekosistem hutan karena di dalam hutan terjadi siklus hara tertutup. Jika ada gangguan atau kerusakan maka akan mempengaruhi interaksi yang terjadi di dalam ekosistem, seperti siklus hara, akibatnya unsur hara yang ada akan tercuci atau terbawa oleh air hujan yang mengalir dipermukaan tanah (run off).

Kehilangan unsur hara di dalam ekosistem hutan mengakibatkan lahan-lahan hutan yang dibuka akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya, ditambah

juga dengan sistem pembukaan lahan dengan sistem tebas, tebang dan bakar akan lebih banyak lagi kehilangan material-material unsur hara yang tersimpan pada tumbuhan.

Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Perambah

Masyarakat perambah hutan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang memiliki keahlian dibidang lain selain untuk memungut hasil hutan secara langsung tanpa mengolah hasil hutan tersebut sebelum dijual. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keahlian dalam pengelolaan hutan dapat mendorong masyarakat perambah untuk melakukan kegiatan perambahan hutan karena tidak ada pilihan lain, dan dilihat dari kepastian usaha lebih menjanjikan serta dapat menjamin untuk kelangsungan hidup anggota keluarganya. Perambahan dilakukan dengan harapan kondisi ekonomi keluarga akan menjadi lebih baik lagi. Biasanya kegiatan perambah dilakukan karena faktor kebiasaan dari generasi yang sebelum-belumnya dan kebiasaan itu masih terus dipelihara dan dijalankan oleh generasi selanjut.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah, berdampak pada kelestarian hutan dan keselamatan lingkungan. Memang terkadang di dalam masyarakat tradisional masih memiliki kearifan lokal yang bisa memanfaatkan dengan menekan dampak yang ditimbulkan, tetapi untuk waktu sekarang kearifan tersebut telah hilang dikarenakan tuntutan hidup dan desakan ekonomi yang semakin sulit.

Penjarahan hutan dan Illegal Logging

Keberadaan masyarakat desa hutan Wonosalam tidak terlepas dari kondisi kemiskinan. Masyarakat Desa Hutan Wonosalam rata-rata hidup dengan pola pertanian subsistensi (pertanian seadanya). Mengumpulkan bahan dari hutan untuk dikelola atau dijual adalah pola hidup yang mereka jalani sejak generasi sebelumnya sampai keperluan akan kayu meningkat secara tajam pada dasawarsa tahun 2000-an. Penjarahan hutan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang dari luar kawasan hutan dan tekanan hidup yang semakin menghimpit serta tidak adanya keterampilan yang dapat menghasilkan kreativitas dalam pola cocok tanam menjadikan masyarakat desa hutan untuk ikut melakukan *illegal logging*. Akibatnya tingkat kerusakan hutan menjadi semakin tidak bisa dikendalikan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan tetapi juga menurunnya fungsi hutan, seperti gundulnya hutan, timbulnya banjir yang tak biasanya, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan longsohnya tebing penyangga.

Kondisi hutan yang terdapat di Desa Wonosalam saat ini cukup memprihatinkan hal ini diakibatkan karena diakibatkan oleh kegiatan masyarakat yang kurang adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelangsungan hutan. karena adanya eksploitasi secara besar-besaran yang tidak diikuti dengan penanaman kembali secara benar, serta maraknya kegiatan illegal logging. Selain itu, kegiatan penanaman kembali melalui rehabilitasi hutan yang tidak disertai dengan kegiatan pemeliharaan membuat kerusakan hutan belum dapat diatasi dengan baik. Maraknya kegiatan illegal logging yang terjadi di Desa Wonosalam dapat dilihat pada data tabel 4.10 sampai tabel 4.14 yang menyatakan tentang pengungkapan kasus illegal logging dari Polres Jombang pada tahun 2008.

Tabel 4.10 Pengungkapan Kasus Illegal Logging Polres Jombang Tanggal 09 Pebruari 2008 S/D 15 Pebruari 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Minggu, 110 peb 2008, jam. 09.00 wib Lp/01/ii/2008/polsek 10 peb 2008	Dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	Suratno, 43 th, tani, dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	49 lembar papan jenis pinus	Dalam proses sidik
Sek Wonosalam	Minggu, 10 peb 2008 jam. 16.00 wib Lp/02/ii/2008/polsek 10 peb 2008	Dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	Waris, 32 th, tani, dsn. Tegal rejo, Jarak, Wonosalam, Jombang	6 batang pohon pinus berbagai ukuran	Dalam proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 4.11 Pengungkapan Kasus Illegal Logging Polres Jombang Tanggal 08 Maret 2008 S/D 14 Maret 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Jum'at, 29 peb 2008 di lapkan sabtu, 8 maret 2008 Lp/04/iii/2008/polsek 8 maret 2008	Dsn. Sidolegi, ds. Sumberejo, Wonosalam, Jombang	Marsup , 28 th, tani, dsn. Sidolegi, ds. Sumberejo, Wonosalam, Jombang	14 batang kayu sengon laut berbagai ukuran	Dalam proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 4.12 Pengungkapan Kasus Illegal Logging Polres Jombang Tanggal 26 April 2008 S/D 02 Mei 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Kamis, 1 mei 2008 jam. 06.30 wib Lp/08/iv/2008/polsek 1 mei 2008	Hutan Carangwulung, Wonosalam, Jombang	Sunari, 64 th, tani, dsn. Segunung, ds. Carangwulung, Wonosalam, Jombang	8 batang kayu mahoni berbagai ukuran dan 2 batang	Dalam proses sidik

kayu
nangka

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 4.13 Pengungkapan Kasus Illegal Logging Polres Jombang Tanggal 07 Juni 2008 S/D 13 Juni 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek Wonosalam	Rabu, 11 juni 2008, jam. 04.00 wib Lp/11/vi/2008/polsek 11 juni 2008	Dsn. Maduro, ds. Panglungan, Wonosalam, Jombang	1. Sutaji, 40 th, tani, dsn. Maduro, ds. Panglungan, Wonosalam, Jombang 2. Tumariono, 33 th, tani, dsn. Maduro, ds. Panglungan, Wonosalam, Jombang	23 ikat kayu bakar, 2 buah peck, dan sepeda motor	Proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Tabel 4.14 Pengungkapan Kasus Illegal Logging Polres Jombang Tanggal 11 Oktober 2008 S/D 17 Oktober 2008

Kesatuan	Waktu	Tkp	Tersangka	Barang bukti	Proses Sidik
Sek bandar kdm	Kamis, 16 oktober 2008, jam. 14.00 wib Lp/69/x/2008/polsek 16 oktober 2008		Zainuri bin badrun, 38 th, tani, ds. Puncangsimo, bandar kdm, Jombang	Satu btang kayu jati ukuran 12x12x250	Proses sidik
Sek perak	Senin, 13 oktober 2008, jam. 00.30 wib, Lp/39/x/2008/polsek 13 oktober 2008		Subari, 50 th, sopir, ds. Galendowo, Wonosalam, Jombang	Satu unit ruk no. Pol : n-8044-uk-36 batang kayu waru gunung	Proses sidik

Sumber: Perhutani, 2008

Produksi kayu merupakan sumber pendapatan utama dari kebanyakan masyarakat desa pemilik hutan. Namun biaya produksi untuk mendapatkan kayu yang baik termasuk tinggi, dan dalam banyak kasus tidak bisa ditutupi oleh pendapatan yang diterima. Hal ini dapat membuat dua pengaruh berbeda, yaitu adanya disinsentif untuk mengelola hutan secara tepat atau insentif untuk mencari pendapatan dari sumber daya hutan lainnya seperti menggembalakan ternak bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari sektor kehutanan telah pula melahirkan kondisi hutan yang semakin rusak. Kerusakan hutan yang terjadi sehingga

terjadi bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Wonosalam sangat berkaitan antara tidak seimbangnya kegiatan pemanfaatan hutan dengan kegiatan rehabilitasi hutan serta pemanfaatan hutan yang lebih cenderung pada hasil hutan berupa kayu saja.

4.2.2.2 Kebijakan Pemerintah

Selama ini Pemerintah Indonesia lebih menitikberatkan pengelolaan hutan yang mengarah pada pemanfaatan kayu (timber oriented) dibanding pemanfaatan lainnya. Padahal ada banyak manfaat lain dari sumber daya hutan yang belum dihitung maksimal, termasuk dalam menentukan nilai akhir dari satu meter kubik kayu saat dipasarkan (Khan et.al, 2000). Tentu saja nilai kayu hanyalah sebagian kecil saja dari nilai ekonomi manfaat sumber daya hutan. Seperti yang terjadi di Desa Wonosalam, sudah terdapat lahan kosong yang dulunya adalah kawasan hutan, menjadi lahan kosong yang terlantar seperti yang terlihat pada gambar 1.8. Hal ini dikarenakan bahwa sumber daya hutan yang dipanen hanya kayunya saja telah merusak hutan dan bahkan menghilangkan manfaat sumber daya hutan lainnya yang mungkin lebih bernilai dari manfaat hasil hutan berupa kayu.



Gambar 4.9 Lahan Kosong Milik Perhutani Setelah Panen Tegakan



Gambar 4.10 Lahan kosong milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan

Selain pemanfaatan hutan yang kurang optimal, Pemerintah Kabupaten Jombang juga belum memasukkan rencana pengembalian atau perbaikan kondisi hutan agar tidak terjadi adanya degradasi hutan pada Perencanaan daerah baik pada RPJM, RPJP dan RTRW. Adanya perencanaan kawasan hutan masih berdasar pada peningkatan perekonomian dengan diadakannya program optimalisasi pemanfaatan lahan di sekitar hutan untuk menunjang penguatan ketahanan pangan; program pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat; program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

Meskipun tidak bisa dipungkiri adanya keberhasilan pemerintah dalam bidang Penanganan konservasi lahan melalui penghijauan, pembuatan hutan rakyat dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan; dan peningkatan penanaman tanaman hutan (di dalam kawasan hutan) namun hal ini tidak bisa secara langsung mengatasi masalah penurunan degradasi hutan karena manfaat dari hasil penanaman tegakan di dalam kawasan hutan akan bisa dirasakan bertahun-tahun kemudian dan hal ini tidak sebanding dengan besarnya manfaat atas hasil hutan yang telah diambil dengan melalui ijin penebangan yang diberikan pada pemilik Hak Penguasaan Hutan (HPH).

Berbagai program pengembangan untuk pelestarian dan penghijauan kembali hutan telah dijalankan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jombang tapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan tingkat kerusakan hutan semakin mengawatirkan. Daerah yang memiliki kawasan hutan juga tidak luput dari ancaman kecemasan karena infrastruktur yang selama ini dibangun dengan susah payah rusak akibat banjir. Di satu sisi Pemerintah Daerah berkepentingan dengan pengelolaan dan kelestarian hutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan, namun di sisi lain kewenangan pengelolaan hutan berada di luar kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan sementara tingkat keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah daerah belum sistematis sehingga keterlibatan sekecil apapun dapat memicu kekhawatiran munculnya persepsi “telah mengambil alih kewenangan pusat”.

Apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam dalam Hutan Desa. Dan apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa. Namun dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

maupun hutan tanaman. Selain itu pemungutannya dibatasi paling banyak 50 m³ tiap lembaga desa per tahun.

Dengan mendapat hak pengelolaan hutan desa, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak pengelolaan hutan desa berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Namun untuk di hutan lindung tidak diijinkan memanfaatkan dan memungut hasil hutan kayu.

Dalam memanfaatkan kawasan hutan desa, baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon.

Masyarakat semakin berani untuk merambah kawasan dikarenakan dari kelompok-kelompok mereka yang telah lebih dahulu melakukan pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas tidak mendapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Anggota lain juga termotivasi untuk melakukan tindakan yang sama, pada akhirnya semakin lama mereka mendiami kawasan akan semakin memperkuat eksistensi mereka. Mereka juga menganggap bahwa mereka mendiami kawasan telah turun-temurun, sejak dari nenek moyang mereka sampai kepada anak cucunya.

4.2.2.3 Kurangnya Pengawasan terhadap Kawasan Hutan

Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan masuk perambah ke dalam kawasan hutan. Hal ini dapat memberikan anggapan kepada para perambah bahwa tindakan yang mereka lakukan masih dalam batas yang wajar dalam artian memfungsikan kawasan untuk dimanfaatkan sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para perambah.

Kurangnya pengawasan terhadap hutan kawasan Wonosalam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia tidak memadai atau mendukung untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih intensif,

diantaranya sarana komunikasi untuk pelaporan penebangan hutan secara illegal.

2. Jumlah personil pegawai kehutanan yang tidak seimbang dengan luas lahan yang harus di awasi
3. Sulitnya medan yang harus dilalui sehingga menuntut kecakapan personil untuk mampu mengawasi wilayah hutan desa.

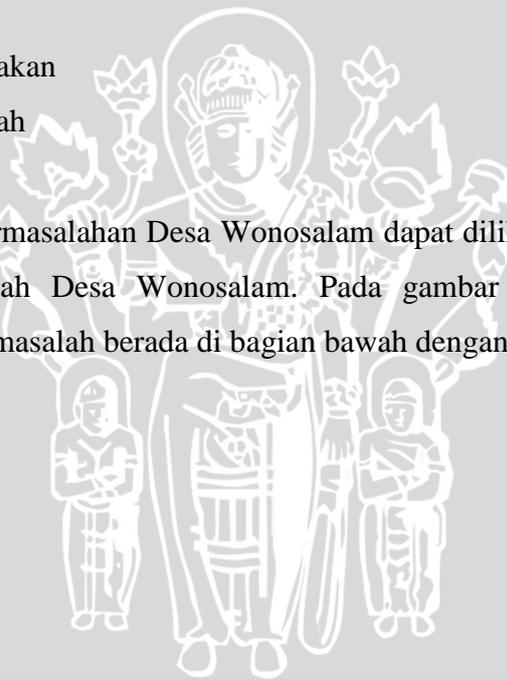
4.2.3 Akar Masalah Desa Hutan Wonosalam

Analisis akar masalah merupakan salah satu teknik untuk melihat akar dari suatu masalah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui permasalahan yang timbul di Desa Wonosalam. Dengan teknik analisis ini, dapat dilihat penyebab yang sebenarnya dari masalah yang terjadi di Desa Wonosalam. Permasalahan-permasalahan yang terdapat di Desa Hutan Wonosalam yaitu:

- kesejahteraan masyarakat rendah
- kualitas SDM rendah
- tingkat pendidikan rendah
- fasilitas SLTA yang berada paling dekat dengan Desa Wonosalam terlalu jauh
- biaya transportasi cukup tinggi
- pola pikir masyarakat bahwa lulus SD saja sudah merupakan hal yang baik
- hasil hutan tidak maksimal
- masyarakat sulit menembus jaringan pasar yang luas
- masih terdapat kendala-kendala hasil pemasaran tanaman dibawah tegakan
- Harga komoditi yang sering naik-turun secara tajam
- Tidak memadainya fasilitas seperti gudang
- Kurangnya respon lembaga keuangan dalam menunjang kegiatan usaha produktif komoditi pertanian
- biaya transportasi tinggi (high cost) yang membebani pemasaran
- kurangnya inovasi-inovasi atau pengembangan dalam pengelolaan hasil hutan
- Kekurangan modal;
- Masyarakat desa belum cukup memiliki kemampuan bernegosiasi dengan mitra kerja dalam pengelolaan sumber daya hutan
- rusaknya ekosistem hutan
- deforestasi
- jumlah penduduk desa semakin meningkat

- Rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum
- Kurangnya pengawasan terhadap hutan kawasan Wonosalam
- Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia tidak memadai atau mendukung untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih intensif
- Sulitnya medan yang harus dilalui sehingga menuntut kecakapan personil untuk mampu mengawasi wilayah hutan desa.
- Jumlah personil pegawai kehutanan yang tidak seimbang dengan luas lahan yang harus di awasi
- penebangan hutan untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga
- masyarakat sekitar hutan masih tergolong dalam masyarakat miskin yang hidupnya tergantung pada hasil hutan
- MDH hidup dengan mengumpulkan bahan dari hutan untuk dijual seperlunya.
- degradasi
- penurunan kualitas tegakan
- penurunan kualitas tanah
- bencana longsor

Lebih jelasnya permasalahan Desa Wonosalam dapat dilihat pada gambar 4.12 yaitu gambar akar masalah Desa Wonosalam. Pada gambar akar masalah Desa Wonosalam tersebut, akar masalah berada di bagian bawah dengan border hitam.



4.2.4 Rencana Pemecahan Masalah Degradasi Hutan

Kelestarian sumber daya hutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan Perum Perhutani, karena kerusakan sekecil apapun cepat atau lambat akan merugikan banyak orang. Tanggung jawab bersama ini harus dimulai dari kepedulian, penyadaran dan baru kemudian pemberdayaan masyarakat.

Bagi Pemerintah Pusat atau Perum Perhutani, pelestarian hutan dapat berfungsi untuk:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan;
2. Memperbaiki dan mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan;
3. Memperkecil rasio pencurian hutan.

Bagi Pemerintah Daerah setempat, kelestarian, pengelolaan secara baik dan terpeliharanya hutan dapat:

1. Menumbuhkan perekonomian wilayah;
2. Menumbuhkan rasa memiliki hutan dari masyarakat.

Bagi Masyarakat Desa Hutan, kepentingan dalam kelestarian sumber daya hutan adalah:

1. Memperluas lapangan kerja masyarakat;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Arifin (dalam Isrowikah, 2003) menyebutkan bahwa dalam pembangunan kehutanan memerlukan suatu kebijakan, yaitu suatu pengelolaan yang dikaitkan dengan hukum atau perundang-undangan yang tidak terlepas dari sudut ilmu-ilmu lainnya. Kebijakan pengelolaan hutan tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Pemanfaatan kawasan hutan tetap.
2. Peningkatan mutu dan produktifitas kawasan hutan negara dan hutan rakyat agar penghasilan negara dan rakyat meningkat.
3. Peningkatan efisiensi dan produktifitas pengelolaan hasil hutan
4. Peningkatan peran serta masyarakat.
5. Penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.
6. Pelestarian hutan sebagai pelindung lingkungan dan ekosistem.
7. Peningkatan pengawasan pembangunan kehutanan.

4.2.4.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah setempat, masyarakat, kalangan dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan harus membantu menyusun agenda untuk mendorong masyarakat menjadi aktor utama yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

Partisipasi penuh mutlak dilakukan. Pemerintah harus menjamin bahwa semua kelompok dapat mengekspresikan dan mempertahankan kepentingan masing-masing. Semua anggota masyarakat perlu ikut berperan dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya bersama. Diantara strategi pengelolaan yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan Tridaya.

Pendekatan Tridaya pada hakekatnya merupakan pendekatan yang menekankan proses pemberdayaan sejati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin disekitar hutan, yaitu :

1. Pemberdayaan Manusia agar tercipta masyarakat efektif secara sosial
2. Pemberdayaan Usaha agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi, terutama dibidang seperti : pertanian tanaman pangan, perikanan, kehutanan, peternakan, dan perikanan
3. Pemberdayaan Lingkungan agar tercipta lingkungan yang lestari, seperti kelestarian hutan, sanitasi, dan ruang sehat.

Dengan ketiga pemberdayaan tersebut diyakini bahwa pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat akan sangat ditentukan oleh individu-individu dari pelaksana, pemanfaat maupun pelaku-pelaku pembangunan di wilayah desa hutan, karena dengan memberdayakan individu-individu tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku yang positif, mandiri dan merdeka berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Perubahan perilaku yang positif inilah yang nantinya mampu membangun dan menumbuhkembangkan keberdayaan sosial kemasyarakatan, keberdayaan prasarana dan sarana serta keberdayaan kegiatan usaha ekonomi.

4.2.4.2 Penghijauan dan Agroforestry

Biaya yang dikeluarkan untuk reboisasi dan penghijauan sudah sangat besar namun hasilnya tidak menggembirakan, banyak pohon yang ditanam untuk penghijauan dan reboisasi dimatikan lagi oleh penduduk karena perpindahan ladang dan pembukaan lahan baru, untuk itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk reboisasi adalah dengan sistem tumpang sari, dalam sistem ini peladang diperbolehkan menanam tanaman pangan diantara larikan pohon dengan perjanjian petani memelihara pohon hutan yang ditanam dan setelah kira-kira lima tahun waktu pohon sudah besar petani harus pindah, namun dalam kenyataan petani banyak tidak memelihara pohon atau bahkan mematikan pohon tersebut karena dianggap mengganggu tanaman usaha taninya sehingga tidak jarang mereka menetap di tempat tersebut.

Kegagalan penghijauan dan reboisasi dapat dimengerti, karena penghijauan dan reboisasi itu pada hakikatnya menurunkan daya dukung lingkungan. Dalam hal penghijauan, pohon ditanam dalam lahan petani yang digarap, pohon itu mengambil ruas tertentu sehingga jumlah luas lahan yang tersedia untuk tanaman petani berkurang. Lagipula pohon itu akan menaungi tanaman pertanian dan akan mengurangi hasil. Oleh sebab itu, petani akan mematikan pohon atau memangkas pohon tersebut untuk mengurangi naungan dan mendapatkan kayu bakar.

Reboisasi mempunyai efek yang serupa seperti penghijauan yaitu, mengurangi luas lahan yang dapat ditanami oleh petani dan pengurangan produksi oleh naungan pohon. Jadi jelas dari segi ekologi manusia penghijauan dan reboisasi sukar untuk berhasil selama usaha itu mempunyai efek menurunkan daya dukung lingkungan dan menghilangkan atau mengurangi sumber pencaharian penduduk.

Cara lain yang dapat dilakukan selain penghijauan adalah agroforestry. Agroforestry pada dasarnya adalah pola pertanaman yang memanfaatkan sinar matahari dan tanah yang `berlapis-lapis` untuk meningkatkan produktivitas lahan. Ambil contoh berikut ini. Pada sebidang tanah, seorang petani menanam sengon (*Paraserianthes falcataria*) yang memiliki tajuk (*canopy*) yang tinggi dan luas. Di bawahnya, sang petani menanam tanaman kopi (*Coffea spp*) yang memang memerlukan naungan untuk berproduksi. Lapisan terbawah di dekat permukaan tanah dimanfaatkan untuk menanam empon-empon atau ganyong (*Canna edulis*) yang toleran/tahan terhadap naungan. Bisa dimengerti bahwa dengan menggunakan pola tanam agroforestry ini, dari sebidang lahan bisa dihasilkan beberapa komoditas yang bernilai ekonomi. Akan tetapi sebenarnya pola tanam agroforestry sendiri tidak sekedar untuk meningkatkan

produktivitas lahan, tetapi juga melindungi lahan dari kerusakan dan mencegah penurunan kesuburan tanah melalui mekanisme alami. Tanaman kayu yang berumur panjang diharapkan mampu memompa zat-zat hara (nutrient) di lapisan tanah yang dalam, kemudian ditransfer ke permukaan tanah melalui luruhnya biomasa. Mekanisme ini juga mampu memelihara produktivitas tanaman yang berumur pendek, seperti palawija. Mekanisme alami ini menyerupai ekosistem hutan alam, yakni tanpa input dari luar, ekosistem mampu memelihara kelestarian produksi dalam jangka panjang. Pola tanam agroforestry yang dianggap paling mendekati struktur hutan alam adalah pekarangan atau kebun. Pada pekarangan/kebun, tanaman-tanaman tumbuh secara acak sehingga menciptakan struktur tajuk dan perakaran yang berlapis. Jadi manfaat ganda dari pola agroforestry (yang ideal dan konsisten) adalah peningkatan produktivitas dan pemeliharaan lingkungan. Sebagai contoh tanaman Temu-Temuan yang ditanam di bawah tegakan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian keberadaan hutan dengan pola Tumpangsari. Pada tabel di bawah dapat diketahui nilai produksi untuk masing-masing komoditas.

Tabel 4.15 Nilai Produksi masing-masing komoditas tanaman dibawah tegakan

Komoditas	Bobot Rimpang (g/tanaman)	Jumlah anakan	Produksi (ton/ha)
Hutan Kemasyarakatan (Jati, Mahoni)			
Temulawak	417,56	5,60	13,06
Kunyit	274,02	7,62	7,77
Kencur	43,46	9,58	6,97
Hutan Rakyat (Sengon, Suren)			
Temulawak	527,08	5,68	15,73
Kunyit	307,10	9,10	8,54
Jahe kapur	311,20	10,42	8,89

Sumber Data : Perum Perhutani KPH Jombang

Tabel 4.16 Nilai Produksi masing-masing komoditas tanaman dibawah tegakan (produksi Temu-Temuan Wana Farma)

KOMODITI	TEGAKAN SENGON	TEGAKAN MAHONI
	(800 m dpl)	(200 m dpl)
Temulawak	19.65	16.25
Kunyit	10.6	9.8
Jahe emprit	11.1	-
Kencur	-	7.27

Sumber Data : Perum Perhutani KPH Jombang

Contoh Penerapan Usaha Tani di Bawah Tegakan :

1. Hutan Rakyat, tanaman utama : sengon umur 2-4 tahun (tingkat naungan sekitar 30-40%), Tanaman bawah tegakan :
 - Temu-temuan : jahe, kunyit, temulawak
 - Tanaman pangan : kacang tanah, jagung, tanaman sayuran
2. Hutan Produksi, tanaman utama : jati/mahoni < 3 tahun, tanaman bawah tegakan :
 - Temu-temuan : kunyit, temulawak, kencur
 - Tanaman pangan : kacang tanah, jagung,

Saran yang diberikan dari LMDH pada masyarakat Desa Hutan berkaitan dengan komoditas tanaman yang ditanam di bawah tegakan, dengan bertambahnya umur tanaman pokok, maka tanaman dibawah tegakan juga harus disesuaikan. Tanaman padi dan palawija baik ditanam pada lahan dengan umur tegakan di bawah 5 tahun, sedangkan untuk tegakan di atas 5 tahun tidak diperkenankan menanam padi dan palawija. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menanam jenis empon-empon. Guna mencukupi kebutuhan benih dan bibit tanaman di bawah tegakan sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait mau dan mampu memfasilitasi kebutuhan benih dan bibit sesuai dengan kebutuhan.

4.2.4.3 Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti melakukan inventarisasi perambah hutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah perambah dan luas yang dirambah. Selain itu memasukkan rencana pengelolaan hutan dalam dokumen perencanaan, desa, kecamatan dan Kabupaten;

Mewujudkan masyarakat desa hutan yang mandiri, maju dan sejahtera memerlukan sinergisitas antar lembaga, perlu diadakan larangan untuk mengubah fungsi dan kepemilikan hutan pendampingan dalam rangka pemberdayaan memasukkan rencana pengelolaan sumberdaya hutan dalam dokumen perencanaan desa, kecamatan dan kabupaten sharing pembiayaan dan tanggungjawab antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Untuk rencana pemerintah daerah terkait bidang kehutanan dan perkebunan adalah:

- Pengembangan bibit unggul hutan/perkebunan
- Pengembangan hasil hutan non-kayu
- Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

- Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
- Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan & lahan

Sedangkan strategi untuk pengentasan kemiskinan bagi masyarakat desa hutan direncanakan sebagai berikut:

1. Mampu membangun dan mengembangkan kelembagaan berdasarkan pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan
2. Memberikan pendampingan dalam bentuk pembinaan, pendanaan maupun evaluasi kegiatan
3. Meningkatkan peran pemda dalam bermitra dengan organisasi masyarakat desa hutan

4.2.4.4 Insentif-disinsentif dan penegakan hukum

Metode insentif-disinsentif dan penegakan hukum bisa dilakukan untuk mengatasi masalah degradasi hutan.

Insentif

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Tabel 4.17 Pemberian Insentif dalam beberapa aspek pengelolaan hutan

Aspek	Insentif
Administratif	- Kemudahan prosedur - Apresiasi/penghargaan
Ekonomi/ keuangan	- Pengurangan pajak - Kompensasi - Mempermudah pelaksanaan (<i>reward</i> dan prosedur untuk penyewaan tempat dan bagi hasil)
Fisik	- Pemberian subsidi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana - Bonus/insentif - TDR - Penyediaan kelengkapan teknis

Realisasi pemberian insentif dalam pengelolaan hutan bersama masuarakat dapat dilakukan dengan pemberian modal kepada para petani yang mau mengubah ladang mereka menjadi hutan rakyat. Bentuknya bisa berupa suntikan modal dengan pemberian bibit pohon. Selama pohon buah-buahan yang mereka tanam belum menghasilkan, pemerintah menyubsidi mereka.

Ada tiga skema pemberian insentif untuk merehabilitasi kawasan lindung, yaitu (i) pemberian keringan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada petani atau pemilik lahan yang telah memanfaatkan lahannya sesuai dengan peruntukannya; (ii) pemberian subsidi kepada petani atau pemilik lahan tidur atau lahan tidak produktif dengan bibit tanaman produktif yang ramah lingkungan atau pemberian subsidi untuk mereboisasi kawasan hutan yang gundul dan (iii) pemberian insentif untuk merubah pemanfaatan lahan di kawasan lindung, seperti perubahan pola tanam di areal pertanian, yaitu dari tanaman semusim ke tanaman tahunan yang produktif; pemberian insentif untuk merelokasi atau memindahkan areal pemukiman dari kawasan lindung ke luar kawasan lindung atau pembuatan sumur-sumur resapan atau situ di areal pemukiman; dan atau pemberian insentif merubah fungsi hutan dari fungsi produksi menjadi fungsi lindung.

Disinsentif

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Tabel 4.18 Pemberian Insentif dalam beberapa aspek pengelolaan hutan

Aspek	Disinsentif
Administratif	- Prosedur yang lebih rumit - Persyaratan tambahan
Ekonomi/ keuangan	- Penetapan pajak yang tinggi - Pembiayaan yang tinggi - Denda
Fisik	- Ketidaktersediaan/pembatasan akses terhadap sarana dan prasarana

Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat

ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

4.2.4.5 Kurikulum

Pengembangkan kurikulum pendidikan yang menunjukkan kaitan antara lingkungan masyarakat setempat dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akibat kerusakan sumber daya.

4.2.4.6 Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan tebang pulih

Sistem THPB merupakan sistem silvikultur yang paling tua, digunakan untuk membentuk tegakan hutan tanaman seumur. Pohon-pohon dalam hutan tanaman seumur, membesar bersamaan dengan ukuran pohon yang hampir seragam sehingga dapat (tidak harus) dipanen bersamaan dan diremajakan bersamaan lagi. Sistem ini bisa menghasilkan tanaman yang terdiri atas satu jenis (species) saja, disebut tegakan monokultur, bisa juga membentuk tegakan tanaman campuran (multi species).

Tegakan hutan tanaman dibangun untuk membudidayakan jenis tanaman pohon yang diinginkan pasar. Produktivitas ekonomis hutan tanaman bisa sepuluh kali lebih tinggi daripada produktivitas ekonomis hutan alami. Sebagai contoh, karena terjepit oleh banyak pohon lain dalam hutan bekas tebang pilih di hutan alami produksi, pohon-pohon jenis komersial kerapatannya rendah dan hanya menghasilkan riap 1-2 m³/ha.th. Sedangkan hutan tanaman merantimera dapat mencapai riap 10-15 m³/ha.th.

Hutan tanaman sering membudidayakan jenis-jenis pohon yang dapat cepat membesar (jenis bagur, fast growing tree species), karena perusahaan yang membudidayakannya ingin modalnya cepat kembali, dan labanya dapat cepat diperoleh. Jenis-jenis hutan tanaman yang umum dijumpai dibudidayakan di Indonesia adalah: mangium (*Acacia mangium*), gmelina (*Gmelina arborea*), sengon (*Falcataria moluccana*), mahoni (*Swietenia macrophylla*), jati (*Tectona grandis*), tusam (*Pinus merkusii*).

Penanaman setelah tebang habis dilakukan karena dua alasan: (1) karena ingin mengganti jenis tanaman untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menghasilkan kayu pulp, (2) ingin mengganti klon yang satu dengan klon lainnya hasil pemuliaan tanaman.

Sistem silvikultur THPB terdiri atas perlakuan: penataan areal kerja, penyiapan lahan, pengadaan benih dan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman muda,

pemeliharaan tegakan, dan pemanenan pohon tua sekaligus. Pemerintah Indonesia sering menyebut sistem THPB sebagai sistem silvikultur intensif.

Dengan sistem THPB, hutan yang rusak dapat direhabilitasi dan ditingkatkan produktifitasnya. Produksi dari THPB merupakan hasil yang dapat diperoleh dalam jangka pendek. Keuntungan dari sisi cashflow, pengelolaan hutan menggunakan multisistem silvikultur akan lebih ancar sehingga akan lebih menjamin kelayakan usaha dalam bisnis kehutanan. Jaminan keamanan kawasan hutan juga akan menjadi lebih mantap karena pengelolaan hutan menjadi optimal dan menyeluruh pada semua bagian hutan. Prinsip-prinsip THPB diantaranya:

1. Diterapkan pada areal bekas tebangan dan non hutan yang telah
2. ditetapkan sebagai areal THPB dalam RKUPHHK.
3. Sistem silvikultur untuk membangun tegakan seumur.
4. Teknik pemanenan dengan tebang habis.
5. Meningkatkan produktivitas lahan dengan permudaan buatan.

Tujuan THPB adalah memaksimalkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat. Sasaran THPB adalah hutan alam produksi bekas tebangan di areal Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Konversi (HPK).

4.2.4.7 Keamanan

Sebagai upaya mengurangi kerugian akibat gangguan keamanan utamanya pencurian pohon, perlu dilakukan kegiatan operasi pengamanan dan patroli didalam maupun diluar kawasan hutan baik yang dilakukan oleh Perum Perhutani maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak eksternal/aparat keamanan terkait. Di dalam kegiatan pengamanan hutan personil bertugas menjaga kelestarian hutan dari gangguan keamanan baik secara struktural maupun fungsional.

Dalam upaya pengamanan hutan selaian melalui tindakan represif, dilakukan pula tindakan-tindakan yang bersifat preventif dengan selalu mengikutsertakan masyarakat desa hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan sehingga diharapkan selain meningkatkan kesejahteraan juga membangkitkan kesadaran hukum masyarakat desa hutan. Untuk saat ini masyarakat LMDH Wonosalam Asri masi belum dilengkapi dengan alat komunikasi sehingga untuk keamanan hutan, perlu alat komunikasi karena bila ada pencurian kayu bisa dengan cepat menghubungi Perum Perhutani.

Karena itu, partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam mengamankan dan juga mengelola sangat penting seperti yang diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, PP No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Dengan payung hukum ini, masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting untuk menjaga dan melestarikan. Kelestarian kawasan hutan turut mendukung dan memfasilitasi keberadaan Pengaman Hutan Swadaya Masyarakat (Pamhut Swakarsa). partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk masyarakat pengamanan hutan yang dikonsepsikan sebagai Pengaman Hutan Swadaya Masyarakat (Pamhut Swakarsa) terutama di kawasan hutan milik perhutani.

Persyaratan Anggota Pamhut adalah Masyarakat setempat/warga Desa yang dipilih melalui musyawarah desa. Adapun Tugas Pamhut Desa Wonosalam yaitu mengumpulkan dan menyampaikan informasi terkait persoalan hutan yang ada wilayahnya. Membantu melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Membantu patroli bersama pihak terkait dalam rangka menjaga keamanan dan kelestarian hutan dari pengrusakan oleh pihak luar

Keberadaan Pamhut Swakarsa memang sangat diperlukan terkait dengan adanya beberapa keterbatasan dari pihak instansi yang berwenang dalam masalah hutan baik dari sisi anggaran dan personil. Melalui Pamhut, masyarakat dapat mengontrol keberlangsungan kelestarian kawasan hutan sekaligus juga untuk mempertahankan kehidupan sosial, budaya, dan ekonominya serta menepis anggapan masyarakat sebagai perusak hutan,

4.2.4.8 Model Pendekatan penanggulangan kemiskinan Desa Wonosalam

Secara umum model pendekatan dalam program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa hutan dapat dibingkai sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan Manusia.** Tujuannya adalah peningkatan SDM masyarakat desa hutan yang berorientasi pada :
 - Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial guna mendukung penciptaan peluang usaha dan pengembangan usaha yang sudah ada.

- Peningkatan mutu kehidupan keluarga miskin melalui perbaikan kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
 - Ruang lingkup kegiatannya meliputi penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang terorganisir berdasarkan keswadayaan besama (gotong royong)
2. **Pemberdayaan Usaha.** Dengan tujuan utama pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin. Ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberian pelayanan keuangan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) bagi RTM di Desa hutan, pengembangan permodalan usaha mikro, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis para pengusaha kecil, pembentukan dan pengembangan wirausaha baru, pengembangan kemampuan pemasaran produk, pembentukan jaringan kerja antar lembaga sosial ekonomi masyarakat, serta peningkatan hubungan antara usaha ekonomi masyarakat dengan lembaga keuangan dan permodalan.
 3. **Pemberdayaan Lingkungan.** Komponen ini meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan saran/prasarana pendukung pengembangan sosial ekonomi, kebutuhan dasar RTM di bidang pendidikan, kesehatan dan fisik lingkungan, pembuatan rencana teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan. Pemberdayaan lingkungan juga mencakup pengembangan sistem pemeliharaan sarana/prasarana secara mandiri oleh masyarakat sehingga dapat dijaga kelestarian manfaatnya. Selain itu dikembangkan pula konsep "*Kader Pelestarian*" lingkungan, yang akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara prasarana lingkungan secara mandiri dan berkesinambungan.
 4. **Manajemen Pendampingan,** monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen fasilitas pendampingan, pembimbingan langsung oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), kegiatan pemantauan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan program secara keseluruhan.

4.2.5 Analisis Penentuan fungsi kawasan di Desa Hutan Wonosalam

Arahan penggunaan lahan atau fungsi kawasan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi yang berkaitan dengan karakteristik fisik DAS berdasarkan SK Menteri Pertanian No.387, yaitu:

- Kondisi kemiringan lereng
- Jenis tanah dan kepekaannya terhadap erosi
- Curah hujan harian rata-rata

Karakteristik DAS tersebut pada setiap satuan lahan diklasifikasikan dan diberi skor. Penentuan fungsi kawasan ditetapkan menurut hasil dari skor yang sudah dijumlahkan.

Pemberian skor untuk tiap-tiap karakteristik DAS menurut kondisi kemiringan lereng, jenis tanah dan kepekaannya terhadap erosi dan curah hujan harian rata-rata dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3. Sedangkan kondisi eksisting kemiringan lereng dan jenis tanah di Desa Hutan Wonosalam dapat dilihat pada gambar 4.13 dan gambar 4.14. Curah hujan di Desa Wonosalam sebesar 11.290mm/tahun atau 31,36 mm/hari.

Tabel 4.19 Skor kemiringan lereng

Kemiringan Lereng	Nilai Skor
Kelas 1 : 0-8 % (datar)	20
Kelas 2 : 8-15 % (landai)	40
Kelas 3 : 15-25 % (agak curam)	60
Kelas 4 : 25-45 % (curam)	80
Kelas 5 : ≥ 45 % (sangat curam)	100

Sumber: SK Menteri Pertanian No.387

Tabel 4.20 Skor Jenis Tanah

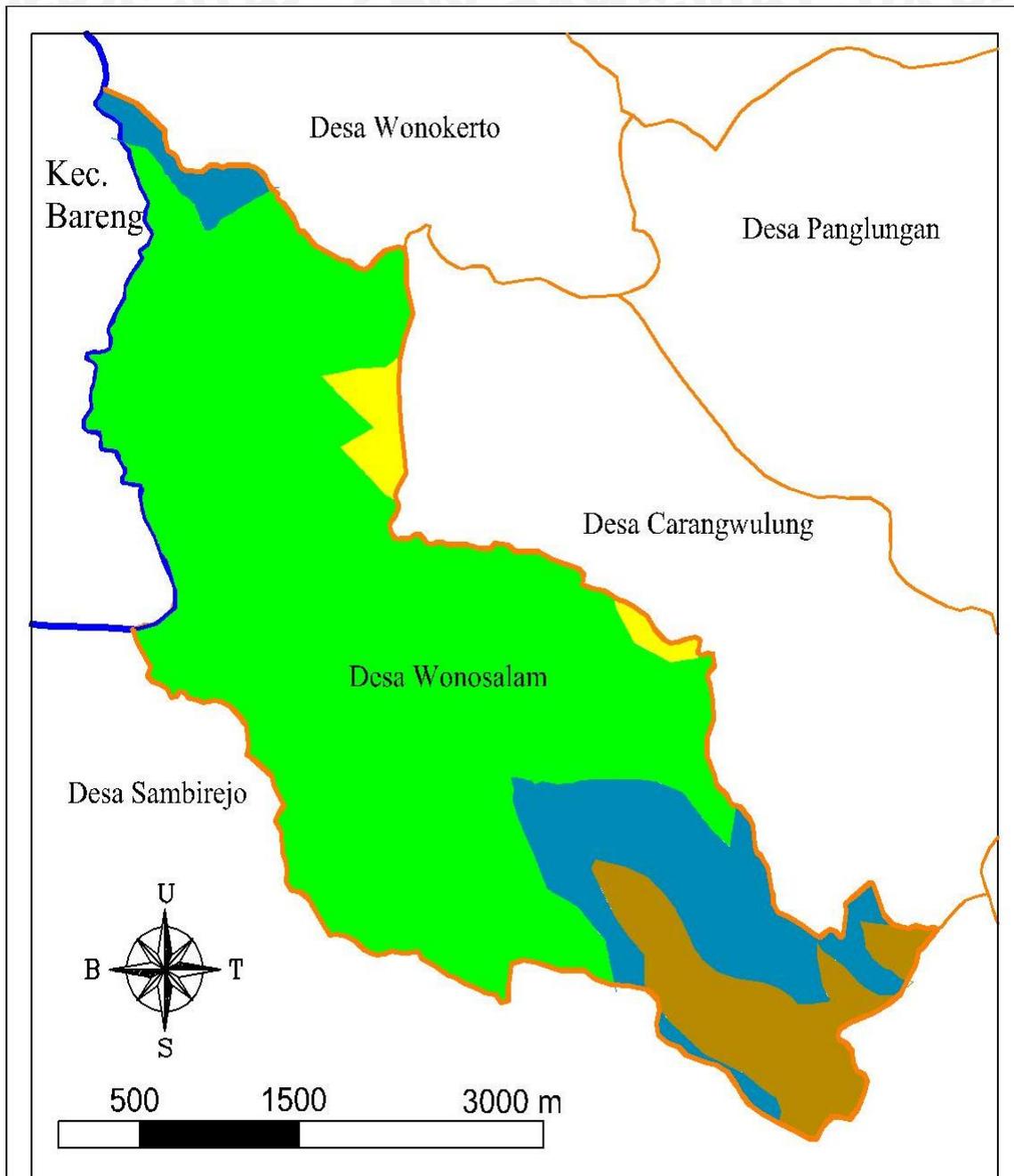
Tanah menurut kepekaannya terhadap erosi	Nilai Skor
Kelas 1 : Aluvial, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik (tidak peka)	15
Kelas 2 : Latosol (agak peka)	30
Kelas 3 : Tanah hutan coklat, tanah mediteran (kepekaan sedang)	45
Kelas 4 : Andosol, laterik, grumosol, podsol, podsolic (peka)	60
Kelas 5 : Regosol, litosol, organosol, renzina (sangat peka)	75

Sumber: SK Menteri Pertanian No.387

Tabel 4.21 Skor Jenis Tanah

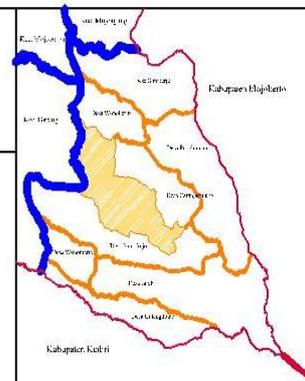
Kemiringan Lereng	Nilai Skor
Kelas 1 : ≤ 13.6 mm/hari (sangat rendah)	10
Kelas 2 : 13.6-20.7 Mm/hari (rendah)	20
Kelas 3 : 20.7-27.7 mm/hari (sedang)	30
Kelas 4 : 27.7-34.8 mm/hari (tinggi)	40
Kelas 5 : ≥ 34.8 mm/hari (sangat tinggi)	50

Sumber: SK Menteri Pertanian No.387



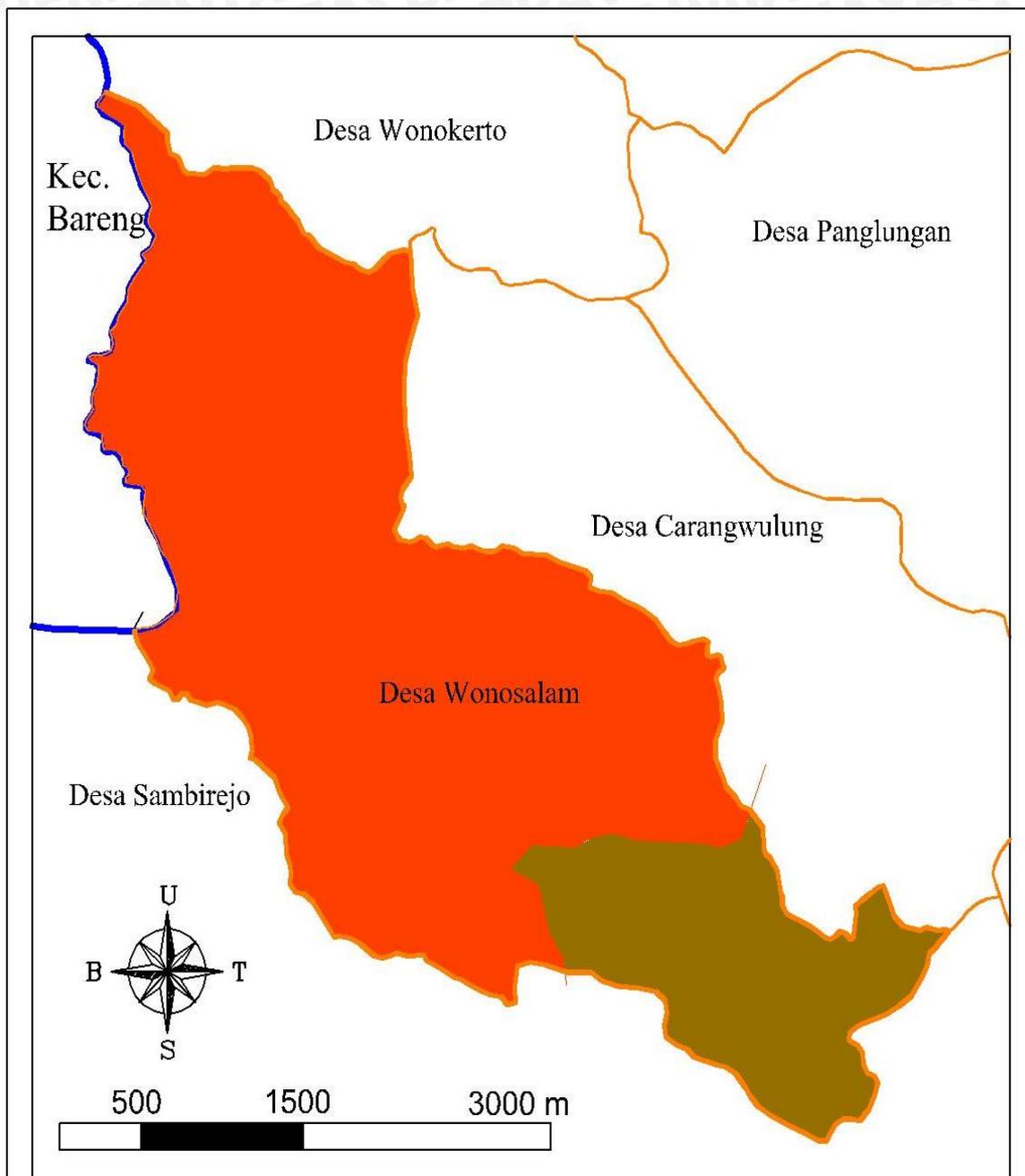
**PETA 4.3
KELERENGAN
DESA WONOSALAM**

-  : Batas Administrasi Desa
-  : Kelerengan 8-15
-  : Kelerengan 15-25
-  : Kelerengan 25-45
-  : Kelerengan >45



Sumber : Perum Perhutani KPII Jombang





**PETA 4.4
JENIS TANAH
DESA WONOSALAM**

-  : Batas Administrasi Desa
-  : Kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan
-  : Kompleks latosol coklat kemerahan



Sumber : Perum Perhutani KPH Jombang

Penetapan lahan setiap satuan lahan kedalam suatu kawasan fungsional dilakukan dengan menjumlahkan nilai skor ketiga faktor tersebut dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Dengan cara demikian, dapat dihasilkan kawasan lindung, kawasan penyangga dan kawasan budidaya.

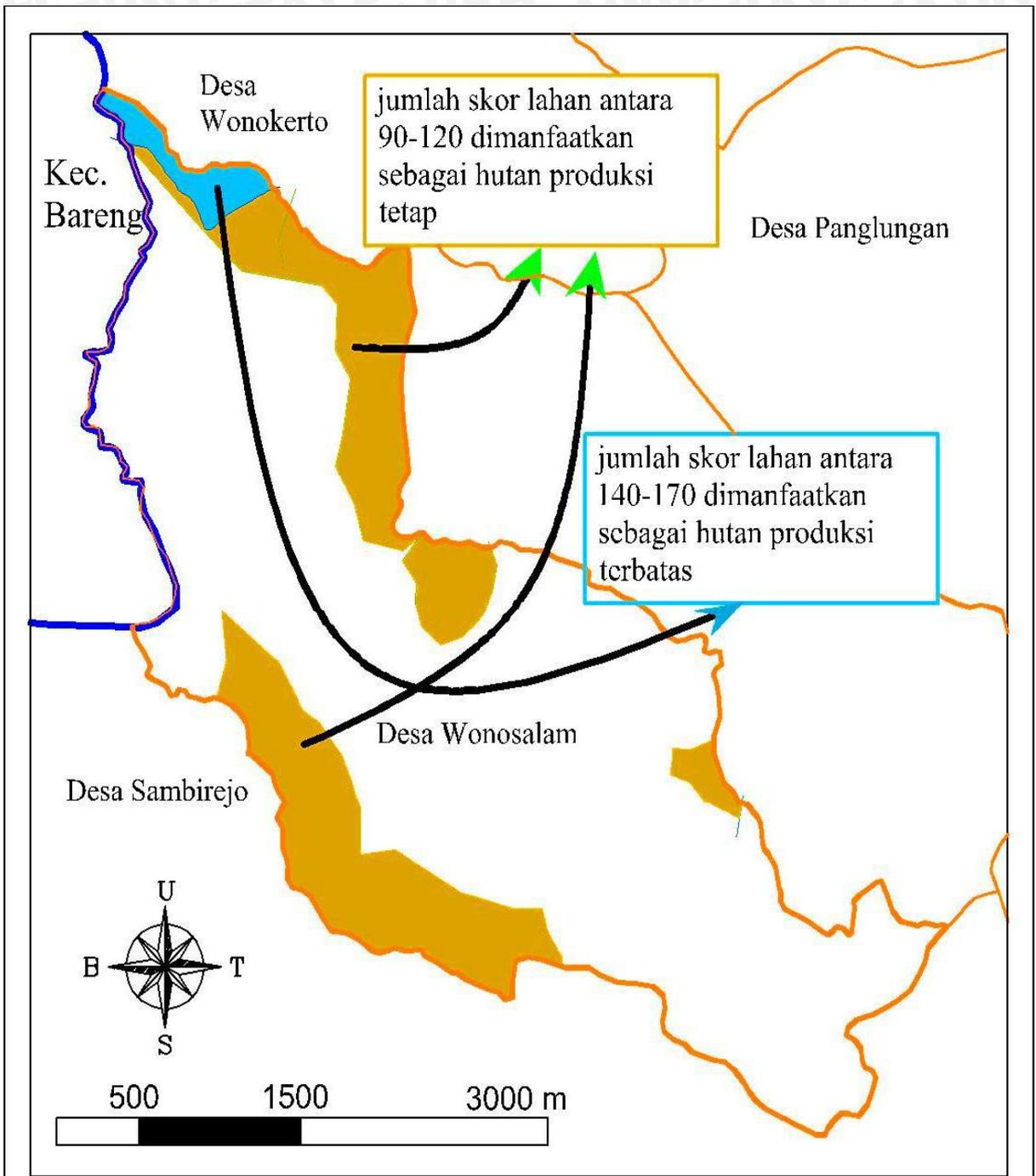
Dari analisis penetapan lahan Desa Wonosalam, setiap satuan lahan kedalam suatu kawasan fungsional dilakukan dengan menjumlahkan nilai skor ketiga faktor tersebut dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Sehingga dihasilkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peta arahan penggunaan lahan di Desa Wonosalam dapat dilihat pada peta 4.5.

4.2.6 Analisis Penentuan Jenis Hutan Produksi Berdasarkan Karakteristik Lokasi dan Kesesuaian Lahan

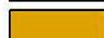
Menurut Pedoman Krteria Teknis Kawasan Budidaya Permen PU NO.41/PRT/M/2007, peruntukan ruang berdasarkan karakteristik lokasi & kesesuaian lahan untuk hutan produksi dibedakan menjadi tiga, yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonfersi. Parameter yang digunakan dalam pembagian hutan menurut jenisnya tersebut dibedakan menurut skoring dalam penentuan fungsi kawasan yang telah dibahas pada sub bab 4.2.5.

Berdasarkan hasil penjumlahan skoring parameter tersebut yaitu lereng, jenis lahan, dan intensitas hujan suatu wilayah hutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai:

- Hutan Produksi Tetap jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai < 125 ; tidak merupakan kawasan lindung; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya;
- Hutan Produksi Terbatas jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai $125 - 175$; tidak merupakan kawasan lindung; mempunyai satuan bentangan sekurang-kurangnya 0,25 Ha (pada ketelitian skala peta 1 : 10.000); serta bisa berfungsi sebagai kawasan penyangga;



PETA 4.6
PEMBAGIAN HUTAN PRODUKSI MENURUT
JENISNYA DI DESA WONOSALAM

-  : Batas Administrasi Desa
-  : Hutan Produksi Tetap
-  : Hutan Produksi Terbatas
-  : Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi



- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai >175 ; tidak merupakan kawasan lindung; dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan kegiatan budi daya lainnya; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya.

Setelah dioverlay dengan peta penentuan fungsi kawasan di Desa Wonosalam, maka hasil dari kawasan tiap-tiap hutan produksi berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada peta 4.6. Pemanfaatan tiap hutan produksi tersebut berbeda sesuai dengan jenisnya, yaitu:

- Untuk kawasan hutan produksi tetap, diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasi dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.
- Untuk kawasan hutan produksi terbatas, kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam.
- Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan yang bilamana diperlukan dapat dialihgunakan untuk menjaga terjadinya degradasi lahan.

4.3 Pengelolaan Bersama Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan di Desa Wonosalam

Pengelolaan hutan produksi di Desa Wonosalam terbagi menjadi dua menurut kepemilikan lahan hutan. Yaitu hutan produksi milik masyarakat yang biasa disebut hutan rakyat dan hutan milik negara disebut hutan kawasan.

Pengelolaan hutan kawasan di Desa Wonosalam berada di bawah pengawasan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jombang yang kegiatannya adalah mengelola hutan dan memanfaatkan hasil hutan dengan lebih mengutamakan keadaan ekosistem hutan agar tetap lestari dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Pengelolaan hutan kawasan di Desa Wonosalam dilakukan bersama dengan masyarakat desa hutan Wonosalam dengan cara pembagian tugas dan wewenang. Pihak Perhutani menyerahkan sebagian hak pengelolaan hasil hutan dengan bentuk masyarakat desa hutan Wonosalam dapat menanam tanaman dibawah tegakan yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat penanam. Masyarakat yang menanam tanaman dibawah tegakan mendapat bantuan berupa bibit dan pupuk dari Dinas Kehutanan Kabupaten Jombang. Sedangkan kewajiban masyarakat terhadap Perhutani adalah dengan ikut

membuka lahan hutan dan menanam tanaman tegakan sesuai dengan rencana pengelolaan dari Perum Perhutani, menjaga dan mengawasi tegakan untuk mengurangi adanya pencurian kayu di dalam hutan kawasan dan melaporkan hasil panen tegakan setelah batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak perhutani ketika tegakan telah siap untuk dipanen. Sedangkan untuk hasil dari panen tanaman tegakan di hutan kawasan, masyarakat desa hutan yang telah menjaga dan mengawasi hutan kawasan ikut mendapat bagian sebesar 30% setelah hasil hutan dijual ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK). Sedangkan untuk pengelolaan hutan rakyat, sepenuhnya diserahkan kepada pemilik hutan.

Pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Wonosalam berbentuk kerjasama dalam produksi hasil hutan dan pembagian hasil keuntungan dari hasil panen tegakan pada lahan hutan milik perhutani.. Kegiatan partisipasi ini dilakukan antara pihak perhutani dan masyarakat desa hutan yang masuk dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Kegiatan pengelolaan lahan milik perhutani ini disebut dengan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Kegiatan PHBM di Desa Wonosalam dilakukan dibawah pengawasan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), lembaga LMDH dibawah naungan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jombang. Dalam kegiatan PHBM, proses produksi hasil hutan dilakukan oleh masyarakat desa yang masuk dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Sebagai imbalan atas kerja dari masyarakat, maka perhutani memberi keuntungan dari hasil penjualan panen tegakan sebesar 30%. Kegiatan panen tegakan dilakukan oleh masyarakat desa huyan yang masuk dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang hasilnya langsung dilaporkan pada pihak Perhutani KPH Jombang. Sedangkan untuk memberikan masukan tambahan bagi masyarakat desa hutan Wonosalam, maka perhutani memperbolehkan adanya penanaman pohon yang dapat tumbuh dibawah tegakan. Bibit tanaman ini didapat dari bantuan Dinas Kehutanan Kabupaten Jombang yang hasilnya dimiliki pihak penanam atau masyarakat yang bersangkutan.

Kegiatan yang masuk dalam program PHBM di Desa Wonosalam sudah masuk kedalam pengelolaan bersama yang disebutkan oleh Pinkerton yaitu meliputi pembagian kekuasaan antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan Wonosalam dalam pemanfaatan hasil hutan baik tanaman tegakan maupun tanaman dibawah tegakan yang sesungguhnya antara pengelola pada tingkatan lokal (LMDH Wonosalam Asri) dengan

kantor pemerintah (Perum Perhutani) sehingga masing-masing dapat mengontrol penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain.

Alasan diterapkannya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat pada sumber daya hutan adalah masyarakat harus ikut terlibat dalam mengelola sumber daya yang ada karena keterbatasan peran dan kapasitas pemerintah. Selain itu pemerintah juga melihat bahwa masyarakat harus diberikan pendampingan dalam pengelolaan agar sumber daya tersebut berkelanjutan. Pendamping masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam adalah LMDH yang kegiatannya dibawah pengawasan Perhutani KPH Jombang. Selain itu, alasan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah untuk mengelola sumber daya alam (hutan, air dan lainnya) secara bersama untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki masing-masing pihak antara Dinas Kehutanan, Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan.

4.3.1 Bentuk-Bentuk Pengelolaan Bersama

Bentuk pengelolaan bersama antara Dinas Kehutanan, Perum Perhutani dan Masyarakat yang masuk dalam kegiatan PMDH merupakan perwujudan dari berbagai tingkatan partisipasi, yang menandakan tingkatan kekuatan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat. Bentuk-bentuk pengelolaan bersama dalam pemanfaatan hutan produksi di Desa Wonosalam bisa dilihat pada Gambar 4.10.

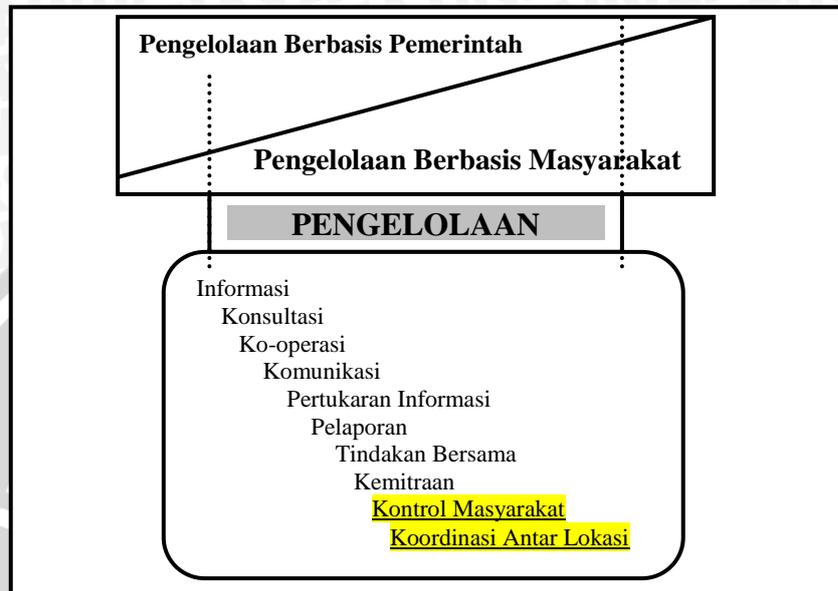
Hierarki pengelolaan secara bersama dalam Pengelolaan Hutan Secara Bersama di Desa Wonosalam sudah berada dalam kutup yang sama, yaitu bentuk pengelolaan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Bila pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa hutan secara bersama, maka pengelolaan bersama sudah terwujud dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara bersama di Desa Wonosalam sudah terdapat pembagian tanggung jawab, otoritas dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat. Penerapan berbagai macam bentuk hirarki pengelolaan bersama ini diantaranya:

- Informasi: meliputi kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai pengelolaan hutan yang *sustainable*.
- Konsultasi: meliputi konsultasi tentang kebutuhan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan seperti keterbatasan bibit dan pupuk, yang kemudian dibantu oleh dinas kehutanan. Selain itu, konsultasi adanya pemilihan tegakan yang sesuai dengan kondisi lahan yang terdapat di kawasan Desa Wonosalam oleh

pihak masyarakat desa hutan yang kemudian mendapat timbal balik dari perhutani berupa pengarahan jenis tegakan.

- Ko-operasi: kerjasama ko-operasi yang terdapat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Wonosalam berupa pembagian tugas pengelolaan hutan yang nggotanya masuk dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan mengelola lahan dan menjaga keamanan hutan milik perhutani dan pembagian keuntungan ketika panen tegakan pada lahan hutan milik perhutani.
- Komunikasi: kegiatan komunikasi dilakukan antara Masyarakat Desa Hutan (MDH), Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan berupa pertukaran informasi mengenai kegiatan pelaporan penanaman tegakan dan tanaman dibawah tegakan sampai pada pemanenan hasil tegakan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan dan adanya penyuluhan dan pelatihan dari dinas kehutanan dan perum perhutani.
- Pertukaran Informasi: pertukaran informasi yang terdapat dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam berupa pelatihan, sosialisasi pengelolaan hutan yang baik dan penyuluhan untuk meningkatkan SDM.
- Pelaporan: masyarakat desa hutan yang masuk dalam LMDH dalam melaksanakan kegiatannya selalu melaporkan keadaan yang terjadi pada hutan milik perhutani. Selain itu, masyarakat juga melaporkan hasil dari panen tebangan hutan. Selain itu, pada pihak perhutani dan dinas kehutanan, bentuk pelaporan kepada masyarakat berupa kebijakan-kebijakan yang berlaku atas sumber daya.
- Tindakan Bersama: tindakan bersama sudah dilakukan di Desa Wonosalam dalam pengelolaan hutan, hal ini dicerminkan dalam kegiatan LMDH yang di dalamnya telah dilakukan kerjasama antara masyarakat, perhutani dan pemerintah daerah dalam mengelola hutan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai rasa memiliki hutan yang terdapat di Desa Wonosalam.
- Kemitraan: kegiatan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah dan pihak ketiga (PT Seng Fong Moulding) yang mengolah hasil hutan Kayu rimba untuk hasil industri moulding dan PT Mentari International yang mengolah kayu rimba campur menjadi puzzle.

Bentuk pengelolaan bersama dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam merupakan bentuk pengelolaan bersama yang sejajar yaitu pemerintah dan masyarakat desa hutan sudah memiliki peranan yang sebanding yaitu “komunikasi”, “pertukaran informasi”, “tindakan bersama” dan “kemitraan”. Sedangkan untuk kegiatan kontrol masyarakat dan koordinasi antar lokasi masih belum terjadi di Desa Wonosalam.



Keterangan:

 = belum terdapat di Desa Wonosalam

Gambar 4.13 Hirarki Pengelolaan Hutan Desa Wonosalam Antara Masyarakat dan Pemerintah

Tantangan terbesar bagi pengelolaan sumberdaya alam adalah menciptakan dan mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam, karena yang terjadi pada saat ini adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlebihan hingga telah menyebabkan semakin berkurangnya sumberdaya alam.

Pemanfaatan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Maka kata kunci yang menjadi penting bagi pengelolaan hutan adalah konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Hutan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di kawasan desa hutan itu sendiri, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Ketergantungan utama masyarakat pada hutan adalah karena hutan menjadi satu-satunya sumberdaya bagi mereka, sehingga sulit untuk mengharapkan mereka turut serta melestarikan hutan tanpa memberikan alternatif sumberdaya bagi mereka.

Masyarakat yang tergantung pada hutan ada yang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan energi, ada pula yang menjadikan sebagai mata pencaharian. Masyarakat yang menjadikan hutan sebagai mata pencaharian yang patut diperhatikan karena masyarakat yang memandang hutan sebagai sumberdaya yang dapat menghasilkan uang untuk membayar kebutuhan sehari-hari harus memanfaatkan hutan sebesar-besarnya sehingga kurang memperhatikan kondisi ekologi hutan.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan cara memberi bantuan, mobilisasi atau menggerakkan masyarakat, instruksi, membayar masyarakat sebagai tenaga kerja, bagi hasil, bahkan eksploitasi masyarakat atau benar-benar sebagai mitra yang sejajar dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasinya.

Peran serta masyarakat juga sangat tergantung kesepakatan kedua belah pihak apakah bekerja sebagai buruh atau sebagai mitra untuk bagi hasil yang seimbang dengan sumbangan atau modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak. Jika lahan milik perorangan atau masyarakat maka di situ bisa muncul PHBM murni karena semua perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dan pengambilan hasil dilakukan sendiri oleh masyarakat

Sedangkan menurut Pasal 68 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara bersama berupa :

1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat :
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
 - c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

3. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat desa hutan Wonosalam dalam pengelolaan hutan di Wonosalam telah sesuai dengan dengan undang-undang no.41 tahun 1999 pasal 68 tentang kehutanan. Masyarakat bisa menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan dengan adanya proyek agroforestry antara Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan masyarakat desa hutan Wonosalam; memanfaatkan hasil hutan produksi dengan pembagian keuntungan hasil panen tanaman tegakan sebesar 30% dengan Perum Perhutani KPH Jombang; mengetahui rencana peruntukan lahan dari Perum Perhutani KPH Jombang mengenai tanaman tegakan dan tanaman dibawah tegakan yang sesuai dengan kondisi lahan hutan yang dikelola, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan yang dilaporkan langsung pada pihak Perhutani. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan perum perhutani dengan masyarakat desa hutan dapat mengurangi pengangguran yang terdapat di Desa Wonosalam.

4.3.2 Unsur-Unsur dalam Pengelolaan Bersama

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan di desa Wonosalam diwujudkan dengan membangun suatu kemitraan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber daya alam yang akan dikelola. Hal ini diantaranya dilakukan antara pihak Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan Masyarakat Desa Hutan. Pihak perhutani berinisiatif untuk mengadakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang didalamnya banyak terdapat kegiatan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Kehutanan membantu masyarakat desa hutan untuk mengembangkan usaha dari hasil alam dengan memberikan penyuluhan, bibit tanaman dan pupuk bersubsidi.

Identifikasi tingkat pelibatan masyarakat desa hutan Wonosalam dalam berbagai tingkatan, mulai dari tanpa partisipasi sampai peneteraman (*placation*) sudah dirangkum dalam Tabel 4.15. Dalam keterlibatan masyarakat Desa Hutan Wonosalam, tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan masuk dalam tingkatan Peneteraman (*placation*), lingkup partisipasi di Desa Wonosalam dilakukan dengan menerima masukan atau saran dari masyarakat tetapi belum tentu masukan atau saran

tersebut ditindaklanjuti. Sedangkan derajat pembagian wewenang pada kegiatan ini masuk dalam tingkat wewenang dihargai (*degrees of tokenism*). Tingkatan 3, 4 dan 5 adalah klasifikasi adanya penghargaan terhadap masyarakat, di mana masyarakat sudah diberi informasi, diajak bicara dan berdiskusi namun masyarakat belum diajak memutuskan

Tabel 4.22 Tingkatan Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Wonosalam

No	Tingkatan Partisipasi	Kriteria	Eksisting	Derajat Pembagian Wewenang
1	Manipulasi (manipulation)	Tercatat sebagai anggota panitia	Masyarakat tercatat sebagai anggota panitia LMDH	Tidak ada partisipasi
2	Terapi (therapy)	Pendidikan terhadap masyarakat	Pendidikan terhadap masyarakat LMDH	
3	Informasi (information)	Hak/pilihan masyarakat dikenali	Hak/pilihan masyarakat dikenali dengan pembagian hasil panen tegakan hutan	
4	Konsultasi (consultation)	Pendapat masyarakat didengar tetapi tidak harus diperhatikan	Pendapat masyarakat didengar tetapi tidak harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan	Tingkat wewenang dihargai (<i>degrees of tokenism</i>)
5	Penenteraman (placation)	Saran masyarakat diterima tetapi belum tentu ditindaklanjuti	Saran masyarakat diterima tetapi belum tentu ditindaklanjuti	
6	Kemitraan (partnership)	Timbal balik dirundingkan	Lingkup partisipasi ini belum terdapat di Desa Wonosalam karena belum timbul timbal balik dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih belum dirundingkan	Pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang dengan masyarakat belum dilaksanakan di
7	Delegasi wewenang (delegated power)	Masyarakat mengelola sebagian atau seluruh program	Masyarakat desa hutan Wonosalam belum mengelola sebagian atau seluruh program pengelolaan hutan	Desa Wonosalam dalam pengelolaan hutan
8	Kontrol Masyarakat (citizen control)	Kendali oleh masyarakat	Kendali masih terdapat di tangan pemerintah, yaitu perhutani dan	

No	Tingkatan Partisipasi	Kriteria	Eksisting	Derajat Pembagian Wewenang
			pemerintah daerah.	

4.3.3 Aspek-Aspek Penting Pengelolaan Bersama

Menurut Pinkerton, dalam Mitchell [1997 : 313-318] terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pengelolaan bersama yang efektif. Aspek-aspek tersebut diantaranya pra-kondisi yang paling diinginkan, kondisi dan mekanisme yang paling diinginkan, cakupan spasial yang terbaik, mempunyai kelompok yang siap diajak melakukan pengelolaan bersama, manusia. Pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Wonosalam sudah mencakup kelima aspek penting tersebut. Untuk penjelasan aspek-aspek penting yang terdapat di Desa Wonosalam bisa terdapat pada tabel 4.15 tentang Aspek-aspek penting dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Wonosalam.

Tabel 4.23 Aspek-Aspek Penting dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Wonosalam.

No	Aspek	Kriteria	Penjelasan
1	Pra-kondisi yang paling diinginkan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya krisis nyata dengan langkanya atau kerusakan sumber daya alam, misalnya hilangnya spesies ikan atau kerusakan hutan. Kemauan pengguna sumber daya alam lokal untuk ikut menyumbang secara finansial atau pun menerima berbagai bentuk bantuan lain untuk merehabilitasi sumber daya maupun tugas-tugas pengelolaan lainnya. Terbukanya kesempatan untuk bernegosiasi atau mengenalkan satu bentuk pengelolaan bersama untuk salah satu jenis sumber daya, yang kemudian dapat berkembang untuk sumber daya lain. 	<ul style="list-style-type: none"> adanya kerusakan sumber daya alam, seperti kerusakan hutan. Kemauan masyarakat, Perum Perhutani maupun Dinas Kehutanan untuk mengelola sumber daya alam lokal baik menyumbang secara finansial atau pun menerima berbagai bentuk bantuan lain untuk merehabilitasi sumber daya maupun tugas-tugas pengelolaan lainnya. Terbukanya kesempatan untuk bernegosiasi atau mengenalkan satu bentuk pengelolaan bersama untuk salah satu jenis sumber daya, yang kemudian dapat berkembang untuk sumber daya lain.
2	Kondisi dan mekanisme yang paling diinginkan	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan dicapai dan diresmikan berdasarkan hukum serta diberlakukan dalam kurun waktu yang jelas. Adanya mekanisme yang disusun jelas agar keuntungan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kesepakatan berupa MoU antara Perhutani, Dinas Kehutanan dan Masyarakat. Kesepakatan ini dicapai dan diresmikan berdasarkan hukum serta diberlakukan dalam kurun waktu yang jelas. Adanya mekanisme yang disusun

No	Aspek	Kriteria	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme disusun sedemikian rupa agar memelihara dan meningkatkan integritas sistem budaya setempat. Bantuan eksternal (misalnya dari perguruan tinggi atau LSM) dapat disertakan, sementara forum diskusi yang menyertakan peserta ahli dari luar yang langsung terlibat dalam proses juga dapat dikembangkan. 	<p>• jelas agar keuntungan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat.</p> <p>• Mekanisme disusun sedemikian rupa agar memelihara dan meningkatkan integritas sistem budaya setempat.</p> <p>• Belum terdapat bantuan eksternal (misalnya dari perguruan tinggi atau LSM) belum dapat disertakan karena adanya keterbatasan dalam informasi dari pemerintah dan perum perhutani. forum diskusi yang menyertakan peserta ahli dari luar yang langsung terlibat dalam proses juga belum dapat dikembangkan.</p>
3	Cakupan spasial yang terbaik	<ul style="list-style-type: none"> Mencakup areal yang relatif tidak terlalu luas, seperti pada suatu wilayah aliran sungai, yang mana keuntungannya dapat secara langsung diketahui dan dihargai oleh mereka yang terlibat. Jumlah peserta dan komunitas tidak terlalu besar sehingga komunikasi yang efektif dapat dikembangkan. Birokrasi pemerintah cukup kecil dan efisien, serta jelas wewenangnya. 	<p>• Mencakup areal yang relatif tidak terlalu luas, yaitu pada lahan hutan milik perhutani yang dikelola oleh Masyarakat Desa Hutan, dan keuntungannya dapat secara langsung diketahui dan dihargai oleh masyarakat desa hutan dan perhutani.</p> <p>• Jumlah peserta dan komunitas tidak terlalu besar yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan Wonosalam Asri sehingga komunikasi yang efektif dapat dikembangkan.</p> <p>• Birokrasi pemerintah cukup kecil dan efisien, serta jelas wewenangnya.</p>
4	Mempunyai kelompok yang siap diajak melakukan pengelolaan bersama	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok-kelompok lokal sudah cukup solid dan berpengalaman mengelola lingkungan setempat berdasar keunikan lokal setempat (tradisi, budaya, kekerabatan dan lain-lain). Kelompok-kelompok tersebut mempunyai batas teritori yang jelas, sehingga memungkinkan membagi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan menerapkan sanksi. 	<p>• Kelompok-kelompok lokal sudah cukup <i>solid</i> dalam mengelola lingkungan setempat berdasar keunikan lokal setempat (tradisi dan kekerabatan).</p> <p>• Kelompok-kelompok tersebut mempunyai batas <i>teritori</i> yang jelas, sehingga memungkinkan membagi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan menerapkan sanksi.</p>

No	Aspek	Kriteria	Penjelasan
5	Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dapat ditingkatkan oleh sesama mereka yang menggunakan sumber-sumber daya alam secara bersama. • Komitmen dapat dikembangkan antar mereka, terutama untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang akan didapat melalui pengelolaan bersama. • Terdapat mekanisme negosiasi yang disepakati, agar berbagai konflik dapat diselesaikan, sementara alokasi sumber daya alam dibagikan dengan adil. • Mekanisme negosiasi juga dikembangkan antara mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengelolaan suatu sumber daya alam secara bersama. • Muncul kemauan atau kesepakatan untuk saling membagi informasi dan data tentang sumber daya alam yang dikelola bersama. • Kepercayaan dan penghargaan tumbuh antara pengguna sumber daya alam dan aparat pemerintah, yang memungkinkan pemerintah menyerahkan lebih banyak kekuatan pada penduduk lokal. • Terdapat seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dedikasi tinggi untuk mengembangkan hubungan dalam pengelolaan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerja sama yang dapat ditingkatkan oleh masyarakat desa hutan yang menggunakan sumber-sumber daya alam secara bersama. • Belum terdapat komitmen yang dapat dikembangkan, terutama untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang akan didapat melalui pengelolaan bersama. • Muncul kemauan atau kesepakatan untuk saling membagi informasi dan data tentang sumber daya alam yang dikelola bersama. • Kepercayaan dan penghargaan tumbuh antara pengguna sumber daya alam dan aparat pemerintah, yang memungkinkan pemerintah menyerahkan lebih banyak kekuatan pada penduduk lokal. • Terdapat seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dedikasi tinggi untuk mengembangkan hubungan dalam pengelolaan bersama

Aspek-aspek di atas adalah hal-hal yang dapat membantu dalam mewujudkan pengelolaan bersama. Selain itu dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam, Para peserta kunci (dalam hal ini wakil dari pemerintah dan kelompok bisnis) juga memberikan akses ke informasi, tata cara partisipasi, mekanisme yang digunakan, waktu partisipasi serta masukan kembali ke masyarakat sehingga pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Wonosalam sudah cukup ideal untuk dikembangkan karena aspek-aspek penting dalam pengelolaan bersama sudah terdapat di Desa Hutan Wonosalam seperti yang telah dijelaskan pada tabel 4.16.

Perubahan-perubahan yang dicita-citakan sangat mungkin dilakukan dan bisa terwujud karena adanya penerapan yang disertai dengan visi dan komitmen yang jelas

yang terdapat dalam MoU antara pemerintah Kabupaten Jombang, Perhutani KPH Jombang dan Masyarakat Desa Hutan yang masuk dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Namun hal ini kurang ditunjang dengan motivasi dan sikap masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hutan, sehingga hal ini dapat menyebabkan dua hal yaitu membantu atau merusak proses pengelolaan bersama.

4.3.4 Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Bersama

Pengelolaan bersama adalah suatu perpaduan pengelolaan antara tingkat lokal dan negara dengan dilandasi berbagi wewenang dan tanggung jawab secara bersama. Pengertian lokal sebagai satu tingkatan (*local level*) seringkali disamakan dengan tingkatan masyarakat (*community level*) yang dalam penelitian ini tingkatan masyarakat berupa masyarakat desa hutan.

Namun untuk mewujudkan upaya pengembangan kelembagaan lokal tersebut harus mengkaji beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pembentuknya. Beberapa hal yang harus dikaji pada dasarnya merupakan karakteristik interaksi antara sumber daya hutan dengan para penggunanya, yang terdiri dari pembatasan sumber daya dan penggunanya (*boundedness of resources and users*), distribusi biaya dan manfaat (*distribution of costs and benefits*), karakteristik sumber daya (*characteristic of resources*) dan karakteristik penggunanya (*characteristic of the users*) serta lembaga lokal untuk pengelolaan bersama. Kajian pada aspek-aspek tersebut akan menjadi masukan berharga dan penting bagi arahan pembentukan dan pengembangan suatu kelembagaan lokal.

4.3.4.1 Pembatasan Sumber Daya dan Penggunanya

Dalam pengelolaan sumber daya alam dari segi pembatasan sumber daya dan penggunanya pada desa hutan Wonosalam, dapat ditelaah sebagai berikut:

- a) pengguna (*resource user-manager*) merupakan sekelompok orang yang tergabung dalam masyarakat desa hutan Wonosalam; dan
- b) Perum Perhutani KPH Jombang

Masyarakat desa hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan telah mengetahui adanya batasan jumlah dan kualitas sumber daya yang dikelola, yaitu hutan yang dikuasai oleh perhutani, yang pengelolaannya dibebankan pada LMDH Wonosalam Asri, sedangkan ketersediaan sumber daya yang dikelola telah jelas sehingga ketika pembagian hasil hutan masyarakat bisa mendapatkan haknya 30% dari hasil hutan yang telah dikelola. Ketika jumlah dan ketersediaan sumber daya dapat

diketahui, kemungkinan pengelolaan yang efektif dapat meningkat cepat dan lebih mungkin dilakukan oleh perum perhutani KPH Jombang.

4.3.4.2 Distribusi Biaya dan Manfaat

Perkiraan biaya dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam akan bervariasi menurut cakupan waktu dan areal geografis. Perkiraan ini dipengaruhi oleh sampai seberapa jauh biaya dan manfaat tersebut dapat diukur (*tangible*) dan dapat dimengerti (*perceptible*), serta sampai sejauh mana biaya dan manfaat tersebut dipikul oleh orang yang sama. Pertimbangan-pertimbangan ini mempengaruhi kelayakan pengembangan kelembagaan lokal yang dipilih (Uphoff, 1986). Terdapat empat dimensi biaya dan manfaat pengelolaan sumber daya hutan desa Wonosalam yang diidentifikasi bisa mempengaruhi keterlibatan masyarakat desa hutan, yaitu sebagai berikut pada Tabel 4.17.

Tabel 4.24 Empat Dimensi Biaya dan Manfaat pengelolaan hutan bersama masyarakat desa hutan Wonosalam

No	Dimensi	Biaya dan Manfaat
1	Temporal (<i>temporal dimensions</i>)	Manfaat bertambah dengan segera karena dalam pengelolaan hutan yang dilakukan LMDH Wonosalam Asri dapat dikelola dengan sistem tumpang sari, dalam pemanfaatan hasil hutan dibawah tegakan bisa dipanen dalam jangka waktu yang relatif singkat. (manfaat bertambah dalam kurun waktu yang singkat)
2	Spasial (<i>spatial dimension</i>)	Manfaat pengelolaan hutan secara bersama yang telah dilakukan oleh masyarakat desa hutan Wonosalam dapat memberikan manfaat pada lokasi hutan ketika proses pengembalian fungsi hutan setelah ditebang atau di panen dengan cara penanaman tegakan kembali, meskipun manfaat dari kegiatan ini tidak sebanding dengan apa yang telah diambil dari kawasan hutan. (Manfaat bertambah sedikit pada lokasi tersebut)
3	Kemampuan untuk Diraba (<i>tangibility</i>)	pengelolaan hutan yang dilakukan LMDH sudah cukup jelas, masyarakat yang mengelola hutan milik perhutani bisa memanfaatkan lahan hutan dengan menanam tanaman dibawah tegakan, dan kewajibannya menjaga tanaman tegakan dan jika waktu penebangan hasil hutan sudah bisa dilaksanakan, masyarakat yang mengelola hutan tersebut juga mendapat hasil sebesar 30% dari hasil panen. (manfaat cukup jelas)
4	Distribusi (<i>distribution</i>),	Manfaat bertambah pada orang-orang yang menanggung biaya pengelolaan (dalam hal ini perum perhutani KPH Jombang) dan masyarakat yang ikut mengelola hutan kawasan

Analisis berdasarkan biaya dan manfaat pengelolaan hutan bersama masyarakat menyatakan bahwa dalam mengelola sumber daya hutan desa Wonosalam tidak memerlukan banyak biaya yang meliputi investasi tenaga kerja karena tenaga kerja yang direkrut oleh perhutani adalah masyarakat desa hutan yang berada disekitar hutan kawasan sedangkan imbalan kepada masyarakat desa hutan dapat berupa hasil *agroforestry* dan hasil panen tegakan hutan sebesar 30%. Untuk biaya yang meliputi dana bibit tegakan, perawatan tanaman dan perlindungan untuk kelestarian harus lebih ditingkatkan lagi untuk menjaga kelestarian hutan demi masa depan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan akan lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam karena keuntungannya datang dengan segera, bertambah pada lokasi yang sama, dan pada orang-orang yang menanggung biaya pengelolaan. Kondisi yang sebaliknya sangat tidak mungkin untuk mengembangkan kelembagaan lokal bilamana keuntungannya lambat, manfaatnya sedikit, kurang jelas dikenali dan manfaat bertambah pada orang lain.

4.3.4.3 Karakteristik Sumber Daya Hutan Kawasan di Desa Wonosalam

Sifat sumber daya yang akan dikelola mempengaruhi bagaimana pilihan kelembagaan yang diinginkan (Uphoff, 1986). Terdapat tiga perbedaan karakteristik sumber daya, yaitu kemampuan sumber daya untuk diperbaharui (*resource renewability*), musim (*seasonality*), dan persepsi masyarakat terhadap sumber daya (*perception of resource*). Ketiga karakteristik sumber daya ini perlu dipertimbangkan agar sumber daya yang ada dapat dikelola sesuai dengan pilihan kelembagaannya.

Hutan merupakan sumber daya yang kompleks, dalam artian terdiri atas unsur-unsur yang dapat diperbaharui (kayu, tumbuh-tumbuhan, hewan) dan sekaligus unsur-unsur yang tidak dapat diperbaharui (tanah dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya). Pemanfaatan atas kandungan bahan tambang yang ada di dalamnya harus hati-hati, mengingat resiko yang ditimbulkan jika pengelolaannya yang tidak tepat. Dalam pengelolaan hutan Desa Wonosalam, sudah memiliki susunan kelembagaan yang jelas yaitu dengan dibentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang pengelolaannya dibawah naungan Perum Perhutani.

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat desa hutan Wonosalam banyak ditentukan oleh kebutuhan yang seringkali atau kadang-kadang tidak teratur dan bersifat periodik seperti komoditas pertanian yang tergantung musim. Lembaga Masyarakat Desa Hutan terkait dengan tanggung jawab pengelolaan hutan yang memiliki *seasonality* tinggi

yang kegiatannya cenderung beroperasi lebih fleksibel dan informal sesuai dengan kegiatan pemanfaatan lahan hutan. Ketika adanya pembukaan lahan hutan dan pemanenan hasil hutan, LMDH bekerja lebih giat untuk melakukan tugasnya, sedangkan ketika proses pemeliharaan tanaman tegakan, kinerja LMDH cenderung menurun. Padahal pengelolaan hutan membutuhkan pola pelibatan dan penanganan yang lebih teratur dan periodik.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh LMDH Wonosalam Asri menggunakan sumberdaya hutan sebagai barang privat (*private goods*) yang diberikan kepada Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara sedangkan pengelolaann dan pemanfaatannya juga dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat yang measuk dalam pengelolaan hutan tersebut. Sedangkan masyarakat desa hutan telah menilai bahwa hutan kawasan milik negara merupakan barang privat (*private goods*) yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

4.3.4.4 Karakteristik Pengguna

Dalam uraian pembatasan sumber daya dan penggunaannya telah dijelaskan mengenai apakah pengguna merupakan seperangkat orang tertentu dan memiliki struktur kewenangan yang diakui atau tidak. Menurut Uphoff (1986), sebagai tambahan pertimbangan untuk menentukan alternatif kelembagaan adalah saling ketergantungan (*interdependence*), homogenitas (*homogeneity*), dan tradisi (*tradition*).

Sampai tingkat tertentu, para pengguna sumber daya hutan tergantung pada pihak atau pengguna yang lain untuk mempertahankan keberadaannya seperti adanya insentif dari pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan lewat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Berkenaan dengan hal tersebut, upaya-upaya untuk membuat berperannya lembaga-lembaga lokal lebih besar. Dengan adanya saling ketergantungan di antara para pengguna hutan yang tinggi, sehingga beroperasinya dan semakin berperannya lembaga-lembaga lokal lebih memperoleh dorongan. Sehingga terlihat adanya hubungan kepentingan di antara mereka.

Begitu pula halnya dengan homogenitas pemanfaat, pengelolaan hutan akan jauh lebih mudah dan sederhana jika penggunaannya homogen dan bisa mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil lebih seragam. Sebagai contoh, tidak ada suatu jaminan pasti bahwa pemerintah daerah akan (mungkin) mengalokasi dan mengatur sumber daya secara optimal jika terdapat konflik internal. Dalam kasus ini, kelembagaan lokal lebih memungkinkan untuk mengalokasi dan mengatur sumber daya.

Hal tersebut mengingat konflik yang muncul atas penggunaan sumber daya alam mungkin relatif kurang muncul karena di antara para penggunanya telah tertanam perasaan terikat oleh suatu ikatan kekerabatan (*kinship*), pekerjaan (*occupation*) dan lain-lain.

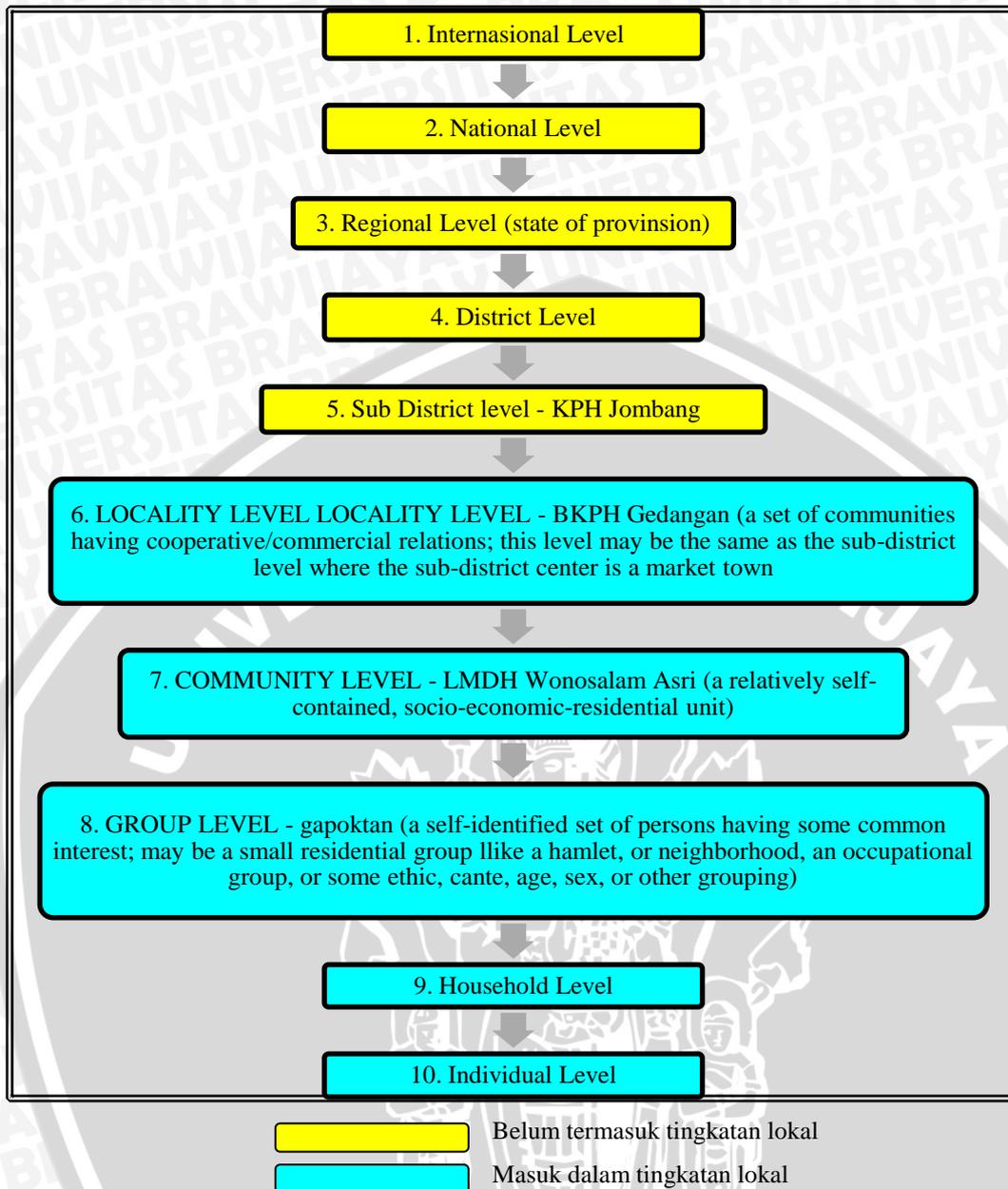
Seringkali ada anggapan bahwa upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan tanpa konflik harus diterapkan oleh para pengguna hutan yang hidup dalam kehidupan sosial dengan kearifan tradisional tertentu. Ironisnya anggapan tersebut seringkali tidak tepat. Seringkali penurunan kapasitas sumber daya diakibatkan oleh tidak tepatnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Kalau ditelusuri lebih jauh hal ini seringkali berkaitan dengan menurunnya fungsi atau pengaruh lembaga-lembaga tradisional setempat beserta pemimpin-pemimpinnya dalam kehidupan masyarakat.

4.3.4.5 Lembaga Lokal Untuk Pengelolaan Bersama

Dalam kasus ini, terminologi lembaga lokal seringkali dikaitkan dengan tingkatan aktivitas dan pengambilan keputusan sebagaimana yang disusun oleh Uphoff (1986) pada Gambar 4.11.

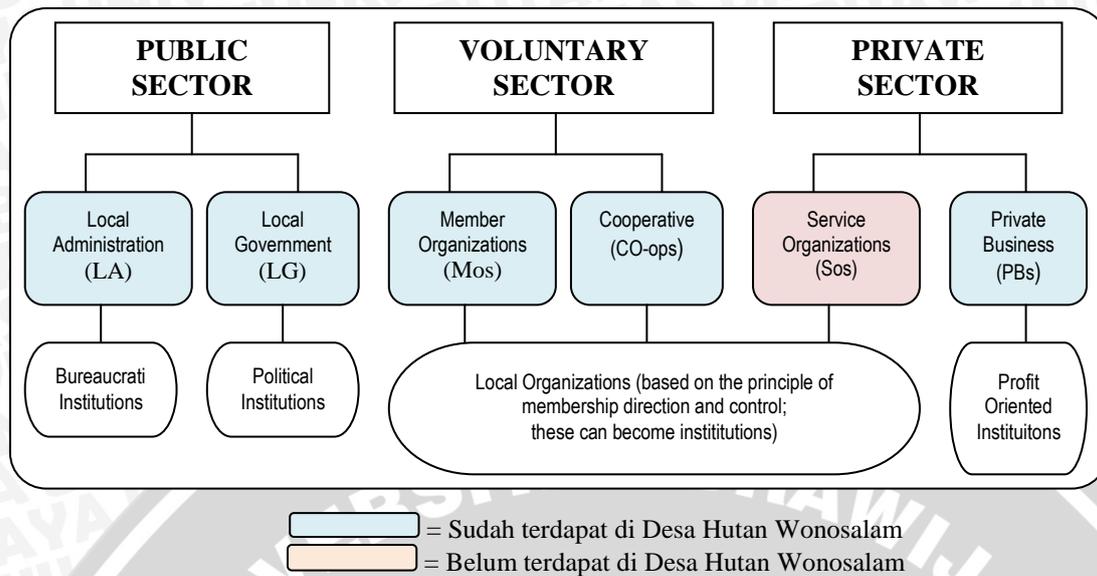
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II tentang terminologi lembaga lokal yang disusun oleh Uphoff (1986), maka apa yang disebut sebagai tingkatan lokal adalah sekurang-kurangnya mencakup tiga tingkatan yaitu *Locality Level*, *Community Level*, *Group Level* (6, 7 dan 8), yang barangkali dalam konteks Indonesia setingkat kecamatan ke bawah. Sedangkan 1-5 tidak disebut lokal karena perbedaan yang muncul sudah menyangkut kewenangan dan unit pengambilan keputusan serta aktivitas yang terlibat relatif besar.

Pengelolaan hutan bersama masyarakat desa hutan di desa Wonosalam sudah masuk ke dalam tingkatan ke delapan yang masyarakat atau anggotanya berdasarkan kesamaan bidang yang dilakukan dan tergabung dalam gapoktan. Sedangkan untuk tingkatan ketujuh adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonosalam Asri.



Gambar 4.14 Tingkatan Aktivitas dan Pengambilan Keputusan di Desa Hutan Wonosalam

Sementara itu lembaga-lembaga lokal di sini dimaksudkan mencakup lembaga pemerintah (*public sector*) maupun lembaga swasta (*private sector*), yang aktivitasnya dihubungkan oleh *intermediate sector*, seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti yang terdapat pada gambar 4.12.



Gambar 4.15 Rangkaian Kesatuan Lembaga Lokal Berdasarkan Sektor yang terdapat di Desa Hutan Wonosalam

Rangkaian kesatuan lembaga lokal berdasarkan sektornya, Desa Wonosalam telah memiliki *Local Administration (LA)*, yaitu instansi-instansi di daerah yang merupakan aparat departemen pemerintah pusat, yang bertanggung jawab kepada atasan langsung (*accountabel to bureaucratic superiors*). Dalam pengelolaah hutan desa Wonosalam, instansi yang merupakan aparat departemen pemerintah pusat dan bertanggung jawab langsung adalah perum perhutani KPH Jombang. *Local Government (LG)*, yaitu badan-badan perwakilan atau yang disetujui untuk menangani tugas-tugas pembangunan dan pengaturan, yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah (*accountabel to local residents*) dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Membership Organizations (MOs), merupakan *local self-help associations* yang anggota-anggotanya menangani :

- berbagai macam tugas (*multiple tasks*), seperti perkumpulan pembangunan daerah atau komite pembangunan desa, dan sebagainya.
- tugas-tugas khusus (*specific tasks*), seperti perkumpulan petani pemakai air (P3A), kelompok tani hutan (KTH), dan sebagainya.
- kebutuhan-kebutuhan (*needs*) anggota yang memiliki karakteristik atau kepentingan yang sama, seperti kelompok arisan ibu-ibu, perkumpulan pengajian, dan sebagainya.

MOs dalam pengelolaan hutan bersama di Desa Wonosalam adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonosalam Asri. LMDH Wonosalam Asri ini telah memiliki tugas khusus untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Cooperatives (CO-ops), yaitu semacam organisasi lokal yang menyatukan sumber daya ekonomi anggota-anggotanya untuk memperoleh keuntungan, Koperasi MDH Wonosalam yang kegiatannya bergerak dalam usaha simpan pinjam, pengadaan pupuk dan bibit bersubsidi, perikanan dan peternakan. Permodalan Koperasi MDH Wonosalam diperoleh dari simpanan pokok/wajib tiap anggotanya,

Tabel 4.25 Data Perkembangan Koperasi Masyarakat Desa Hutan Wono Slamet di Desa Wonosalam

Tahun	Perkembangan modal s/d bulan April 2010	Kegiatan Usaha	Permasalahan
2009	1.250.000	Simpan Pinjam Pengadaan pupuk	- Membutuhkan modal dan pendampingan serta pelatihan
2010	4.200.000	Simpan Pinjam Pengadaan pupuk	- Membutuhkan modal dan pendampingan serta pelatihan

Sumber: Perum Perhutani KPH Jombang

Namun, di Desa Wonosalam belum terdapat *Service Organizations (SOs)*, yaitu organisasi lokal yang dibentuk terutama untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang bukan anggota, seperti lembaga-lembaga pelayanan, palang merah dan sebagainya. Sedangkan *Private Business (PBs)*, yaitu cabang-cabang atau kelompok pelaksana independen dari perusahaan ekstra lokal yang bergerak di sektor pabrik, produksi, jasa, ataupun perdagangan sudah terdapat di Desa Wonosalam terutama untuk pengolah hasil kayu rimba dan rimba campur. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.13 mengenai rangkaian kesatuan lembaga lokal berdasarkan sektor yang terdapat di desa hutan Wonosalam.

Setiap kategori di atas mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Setiap kategori tersebut merupakan rangkaian kesatuan (*continuum*) yang merentang dari sektor publik sampai sektor swasta. Jadi yang termasuk sebagai lembaga lokal mencakup MOs, CO-ops dan SOs. Sedangkan LA dan LG tidak termasuk karena merupakan bagian-bagian dari lembaga lainnya (departemen pemerintah pusat dan dinas-dinas pemerintah daerah), yang mempunyai kekuatan hukum dan sumber daya di balik kedudukan mereka. Begitu juga dengan PBs yang meskipun sama-sama menghasilkan keuntungan bagi orang-orang di luar organisasinya (seperti SOs)

Jenis lembaga-lembaga lokal yang efektif dan *sustainable* bagi pengelolaan sumber daya alam tergantung dari, (a) sifat sumber daya yang hendak dikelola, dan (b) komposisi masyarakat pengguna sumber daya tersebut, khususnya mengenai apakah mereka merupakan masyarakat yang dapat diidentifikasi (*identifiable community*) (Uphoff,1986). Pada tingkat tertentu sumber daya dan penggunaannya dapat dibatasi (dalam artian dapat diidentifikasi dan jelas batasannya), maka tugas-tugas pengelolaan akan lebih mudah dan lebih dapat dipertanggung jawabkan jika dikerjakan oleh lembaga-lembaga lokal. Untuk konteks pengelolaan bersama yang melibatkan pemerintah, badan-badan yang mempunyai kewenangan dan inklusif seperti *local government* (LG) menjadi lebih efektif dalam situasi ketika sumber daya dapat ditentukan dan dibatasi dari pengguna-penggunanya.

4.3.5 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Wonosalam

Menurut Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS). Perum Perhutani menyempurnakan system pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Hingga tahun 2006 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2007 disempurnakan kembali dalam PHBM PLUS. Dengan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Wonosalam merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kerjsama yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan (dinas kehutanan) dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan yang kegiatannya bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Jombang terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model ketjasama yang dilegalkan (MoU).

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Pada dasarnya program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, produktifitas dan keamanan hutan.
- d. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

Dari kelima tujuan yang ingin dicapai dalam program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat tersebut, faktor penduduk sekitar hutan sangat diperhatikan. Hal ini di sadari karena hutan dipandang sebagai suatu ekosistem dengan lingkungannya. Hutan merupakan asset nasional yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungannya. Hilangnya keserasian antara hutan dengan lingkungannya akan menimbulkan kerusakan, salah satu elemen ekosistem yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.

Manfaat program PHBM adalah :

- a. Manfaat ekologi: Pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah akan bermanfaat bagi keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan itu sendiri.
- b. Manfaat ekonomi: Melalui pemanfaatan berbagi yang jelas akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa hutan melalui pembagian hasil hutan.

- c. Manfaat sosial: Memberikan manfaat sosial khususnya dalam menciptakan lapangan kerja serta peningkatan teknologi bagi masyarakat.

1. Ruang Lingkup PHBM

PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara.

2. Prinsip-prinsip PHBM

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- a. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.
- b. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
- c. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
- d. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
- e. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
- f. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
- h. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
- i. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
- j. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

3. Organisasi dalam PHBM desa Wonosalam

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonosalam Asri merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa LMDH tersebut berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan

main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM. Secara hukum FK PHBM bertanggung jawab kepada Pemerintah. Tugas FK PHBM adalah:

- a. Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.
- b. Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dan perkembangan PHBM.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.
- d. Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan.

4. Pelaksanaan PHBM

Pelaksanaan PHBM di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut :

- a. Bidang Perencanaan
 - 📄 Penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan.
 - 📄 Perencanaan disusun oleh LMDH, Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.
- b. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan
 - 📄 Persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan LMDH.
 - 📄 Pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM PLUS.
 - 📄 Pembuatan pusat informasi dan komunikasi PHBM.
 - 📄 Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH.
 - 📄 Pemberdayaan terhadap LMDH bersama dengan para pihak (Perhutani, Dinas Kehutanan dan Bappeda).

-  Pembangunan dan pengembangan training centre (pusat pelatihan) PHBM PLUS untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis community development (pembangunan masyarakat).

5. Keterlibatan Para Pihak dalam PHBM

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu: Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.

Pemerintah Daerah dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Lembaga Pendidikan, memiliki peran dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatannya pada PHBM.

6. Bagi Hasil dalam PHBM

Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang

dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan). Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif dengan pembagian tugas pengelolaan hutan. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan PHBM. Monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan PHBM. Monitoring dalam pelaksanaan PHBM dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang berkepentingan.

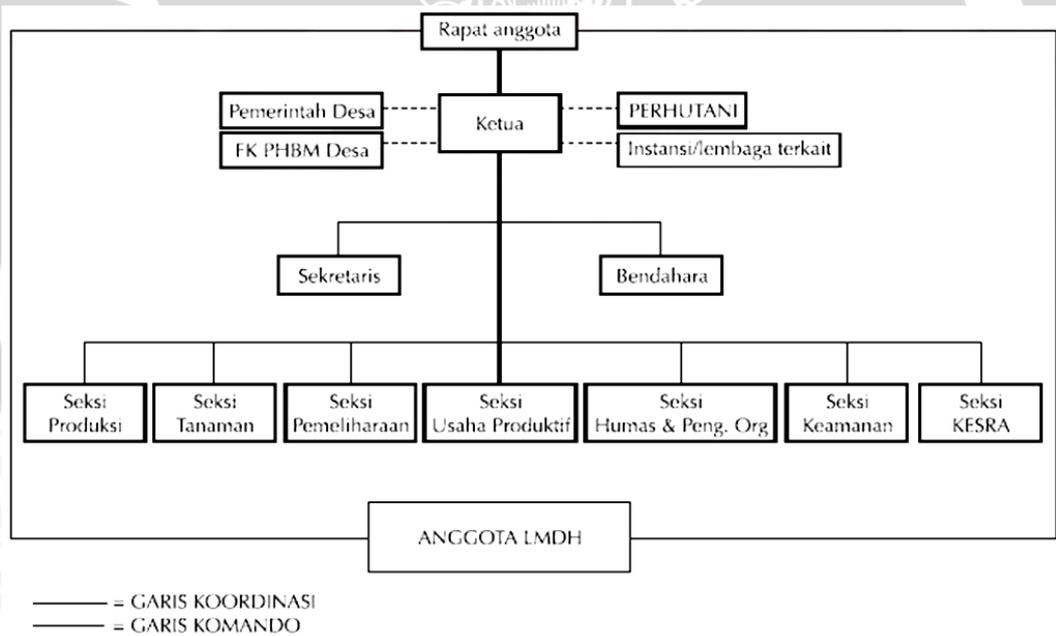
Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan PHBM. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan PHBM pada masing-masing wilayah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang dirumuskan bersama oleh semua pihak. Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan digunakan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif mulai dari perumusan alat yang digunakan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

4.3.6 Lembaga Masyarakat Desa Hutan

LMDH merupakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yaitu lembaga yang berada di bawah Perhutani bagi masyarakat yang berada di perbatasan hutan. LMDH sangat diperlukan bagi kelestarian hutan, karena mereka sehari-hari berhubungan langsung dan beraktifitas di daerah sekitar hutan. Masyarakat di sekitar hutan diharapkan berperan aktif dalam rangka untuk ikut melestarikan hutan, tetapi mereka juga harus memperoleh manfaat dari hutan tersebut tanpa merusak hutan.

LMDH Wonosalam Asri berfungsi sebagai:

- Wahana pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi; mental dan spiritual, wawasan kebangsaan dan patriotisme, pengembangan jiwa sosial dan kesetiakawanan, kepedulian dan solidaritas nasional, motor penggerak dinamika dan kreativitas serta kemandirian usaha bagi para pengurus kelembagaan Masyarakat Desa Hutan.
- Media penyaluran aspirasi dan partisipasi Masyarakat Desa Hutan melalui kelembagaannya, dalam rangka pelaksanaan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, turut serta mensukseskan program pembangunan di desa hutan yang berakumulasi pada keberhasilan pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan.
- Barisan terdepan dalam melakukan pembelaan dan perlindungan atas hak-hak hukum Masyarakat Desa Hutan dan pemersatu segenap komponen Masyarakat Desa Hutan.



Gambar 4.16 Struktur Organisasi LMDH Wonosalam Asri

Sumber: Perum Perhutani KPH Jombang

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonosalam Asri memiliki kegiatan strategis berupa :

- Membentuk jaringan komunikasi Masyarakat Desa Hutan melalui kelembagaannya yang efektif dan efisien, melalui konsolidasi organisasi, komunikasi dua arah yang aktif dan intensif, secara vertikal dan horisontal baik

internal maupun eksternal, melalui kegiatan Jambore Masyarakat Desa Hutan di berbagai tingkatan, kunjungan dan temu lapangan, serta kegiatan sosial yang dilandasi oleh rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial nasional.

- b. Melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumberdaya alam, kelestarian hutan dan sumberdaya manusia, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Desa Hutan (capacity building), pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, seminar, lokakarya, diskusi, kompetisi dalam hal keterampilan dan pengetahuan alih teknologi pengelolaan sumberdaya hutan, serta pengembangan usaha agroforestry secara profesional.
- c. Meningkatkan kemampuan kemandirian usaha, melalui kegiatan usaha produktif secara berkelompok, temu usaha, pameran potensi unggulan, bursa peluang kerja serta menciptakan dan menjalin keterkaitan usaha yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sekitar hutan.
- d. Mensosialisasikan dampak positif implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Pusat melalui departemen terkait, Komunitas Legislatif, Dunia Usaha, Organisasi kemasyarakatan, Komunitas Pendidikan, Komunitas pemerhati kehutanan serta stakeholder lainnya.
- e. Membangun kebersamaan sinergis para pemangku kepentingan, dalam upaya mempercepat, meningkatkan dan memperluas dampak positif dari Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi-fungsi hutan (fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial), dengan tujuan akhir mewujudkan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera.

Kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Wonosalam dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan social secara proporsional. Tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

- c. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan keamanan hutan.
- d. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat desa hutan.

4.3.7 MoU Perhutani Dinas Kehutanan dan Masyarakat Desa Hutan

MoU antara perhutani, dinas kehutanan dan masyarakat desa hutan Wonosalam dilatarbelakangi adanya kejadian bencana alam yang terjadi pada bulan desember 2008. Kejadian awal terjadi di Desa Galengdowo Dusun Pengajaran yang termasuk wilayah Kecamatan Wonosalam. Kejadian bencana alam tersebut merupakan lokasi kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) yang kejadian bencana alam tersebut akibat adanya Debris (Rekahan Tanah) seluas lebar 12 M x tinggi 100 M yang terjadi pada tebing dengan material dari batu dan tanah lumpur. Dengan tingginya curah hujan serta jenis tanah yang kedap terhadap penyerapan air sehingga tebing yang sebelumnya sudah retak sudah tidak mampu lagi menahan debit air yang tinggi sehingga menyebabkan longsor.

Kejadian yang terjadi di wilayah Pengajaran berdampak luas di sepanjang aliran sungai yang menuju ke arah Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Mojoagung. Dengan terjadinya Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Jombang maka perlu langkah-langkahantisipasi melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan rawan bencana.

Kejadian bencana alam yang terjadi akhir tahun 2008, dengan terjadinya bencana ini kecamatan daerah kabupaten Jombang merasa perlu melakukan langkah-langkah penanganan pasca bencana dan melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konserfasi kawasan rawan rencana serta pembinaan masyarakat sekitar hutan. Dari pemikiran bahwa penanganan hutan serta pembinaan masyarakat hutan bukan hanya jadi tanggung jawab perum perhutani tapi juga tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu dilakukan kerjasama melalui MOU antara Pemerintah Daerah, Perum Perhutani KPH Jombang dan masyarakat desa hutan. Dalam pelaksanaan MOU, Pemda Jombang melakukan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan Perum Perhutani.

MoU dilaterbelakangi pendekatan kewenangan terhadap kawasan hutan, bahwa pengelolaan kawasan hutan didasarkan atas kurangnya pemahaman pada potensi dan akses serta permasalahan kaw hutan dengan tanpa mengubah status dan fungsi kaw hutan. Terdapat sepuluh bidang MoU:

1. Bidang kehutanan dan perkebunan: berupa pembangunan, pengembangan, pembinaan dan kelestarian kaw hutan
2. industri dan perdaganga: produk-produk hasil hutan
3. perkoperasian: pengembangan sistem pendukung UKM
4. pertanian: berupa peningkatan ketahanan pangan
5. ternak dan perikanan: budidaya ternak dan perikanan
6. lingkungan hidup: rehabilitasi, pemulihan dan konserfasi sdh
7. bidang pekerjaan umum: pengembangan dan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengelolaan sumberdaya air
8. sumberdaya air: pemanfaatan embung dan pengadaan air bersih
9. pendidikan: berupa pembangunan dan pembinaan dikaw desa sekitar hutan
10. bidang pariwisata: dengan mengadakan pengembangan obyek tujuan pariwisata.

4.3.8 Hambatan-hambatan Partisipasi Masyarakat Lokal

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan memang sangat ideal dalam rangka pemanfaatan lingkungan berbasis kepentingan masyarakat. Namun dalam praktek, proses pelibatan bukan berarti tanpa kendala yang mana kendala tersebut justru akan berpengaruh pada tujuan dari pelibatan itu sendiri. Terdapat beberapa kendala yang perlu memperoleh perhatian dalam merancang rencana pelibatan masyarakat. Kendala-kendala dimaksud adalah antara lain:

- Semakin banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan, baik mereka yang diundang ataupun tidak sebagai pengelola dan pemanfaatan hutan yang justru menghambat proses komunikasi yang hendak dibangun.
- Banyaknya kelompok-kelompok tersebut terutama yang aktif mewakili kepentingan kelompok stakeholders yang akan terkena suatu kebijakan. Akibatnya pemerintah dan atau pengusaha harus melakukan usaha khusus untuk melakukan pendekatan terhadap kelompok stakeholders tersebut. ini tentunya berkaitan dengan kesulitan untuk menentukan siapa yang menjadi wakil masyarakat.
- Masyarakat kurang memahami Informasi tentang lingkungan dan bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Biasanya masyarakat baru akan mengeluh apabila sudah menderita kerugian. Tingkat kesadaran yang kurang

ini bisa dipahami karena kehidupan mereka sudah disibukkan dengan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- Kurangnya atau tidak adanya informasi dalam masyarakat tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hak dimaksud adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban memelihara lingkungan.

Kelamahan lain yang lebih penting adalah seringkali masyarakat kehilangan semangat selama masa pengembangan proyek yang cukup lama. Hambatan-hambatan di atas tentunya tidak seharusnya dipandang oleh pemerintah ataupun perhutani sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Apabila partisipasi masyarakat hanya dipahami sebagai strategi memperoleh legitimasi dari publik terhadap suatu kegiatan eksploitasi sumberdaya alam hambatan-hambatan tersebut akan menjadi tidak penting dipersoalkan. Tetapi apabila pendekatan partisipatif benar-benar akan digunakan sebagai instrumen komunikasi antar kelompok kepentingan, hambatan tersebut tentunya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

4.3.9 Pengelolaan Hutan Yang dibutuhkan Masyarakat Desa Hutan

Upaya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sebagai suatu ekosistem yang perlu untuk dilestarikan dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Hutan Wonosalam, hal tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan kejadian bencana alam akibat menurunnya kondisi lingkungan hidup yang semakin mengarah pada tingkat kerusakan serta semakin berkurangnya luasan lahan hutan yang ada di Desa Wonosalam. Dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat perlu diperhatikan potensi-potensi yang terdapat di kawasan hutan Desa Wonosalam. Potensi ini berupa sumberdaya hutan yang dapat dikembangkan yang perkembangan produksinya mengalami peningkatan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Masyarakat di sekitar hutan diharapkan berperan aktif dalam rangka untuk ikut melestarikan hutan, tetapi mereka juga harus memperoleh manfaat dari hutan tersebut tanpa merusak hutan. Peran LMDH sebagai lembaga Masyarakat Desa Hutan juga mutlak diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan Desa Hutan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan akan tepat penggunaan, tepat sasaran dan tepat manfaat.

4.3.9.1 Kemitraan

Sebuah kemitraan (partnership) adalah pengaturan yang saling disepakati antara dua atau lebih publik, organisasi swasta, lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan bersama, atau untuk merealisasikan kegiatan yang disepakati bersama demi lingkungan dan masyarakat.

Dengan kehadiran pelaku usaha hutan tanaman (perusahaan swasta) yang mampu mendukung permodalan dan penampungan hasil melalui pola kemitraan maka dapat diwujudkan pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan (HTRPK), yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK) hanya dapat terwujud apabila partisipasi masyarakat pemilik lahan yang memiliki keterbatasan modal dapat menjamin pengusaha untuk menjadi mitra. Sebagai langkah antisipatif dalam menjalin kerjasama kemitraan pembangunan HTRPK harus dimulai dengan penelaahan kepastian status lahan yang merupakan prasyarat utama. Status lahan menentukan juga langkah koordinasi sebagai tahapan kajian legalitas apakah oleh instansi Pemerintah yang berwenang, misalnya oleh Perhutani atau Dinas Kehutanan.

Pengembangan HTRPK merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan. Pengembangan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dicapai dalam bentuk peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam di sekitar mereka, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akses terhadap pasar. Pengembangan hutan rakyat selain bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat – dengan bantuan fasilitasi/pendampingan baik dari instansi pemerintah terkait, perusahaan, LSM dan dunia akademisi secara efektif dan berkelanjutan -- juga bertumpu pada penetapan kebijakan atas dasar kepentingan kegiatan ekonomi hutan (tanaman) rakyat.

Peranan investor swasta/perbankan (dan mungkin perusahaan milik daerah) sangat diharapkan sebagai pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan hutan rakyat. Posisi lembaga keuangan alternatif dalam sistem keuangan nasional merupakan prasyarat yang perlu segera ditindak lanjuti guna mengakomodasi karakteristik khusus pembangunan kehutanan, termasuk pengembangan HTRPK.

Permasalahan yang terkait pembangunan HTRPK meliputi masalah pertanahan: keterbatasan modal masyarakat, menyebabkan bukti kepemilikan lahan oleh masyarakat sampai saat ini masih terbatas pada surat keterangan tanah (SKT). Seharusnya sejak tahun 1984 tidak ada lagi SKT sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri kepada Camat dan Kepala Desa No. 593/5709/SJ tanggal 22 Mei 1984 untuk tidak menerbitkan kembali SKT. Dengan demikian dasar kepemilikan lahan dari sisi hukum sangatlah lemah, sehingga sangatlah rentan terhadap kemungkinan munculnya permasalahan lahan dikemudian hari. Dengan memperhatikan pelaksanaan HTRPK di lapangan dan berbagai kendala yang dijumpai, maka telah disusun rekomendasi sbb:

Meningkatkan kepastian status lahan, dengan: (1) Areal yang sudah dicadangkan untuk HPHTI tidak dialihkan statusnya; (2) Peningkatan koordinasi dengan lembaga/institusi terkait dalam rangka kepastian status lahan melalui program percepatan sertifikasi tanah/lahan; (3) Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta Departemen Kehutanan secara serius mensosialisasikan kejelasan status hukum terkait areal yang telah diberikan kepada pemegang ijin/investor, sehingga (a) iklim investasi kondusif; (b) masyarakat lebih mengerti status kawasan hutan serta manfaat kehadiran Perusahaan/investor, serta (c) meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk rehabilitasi di lahan miliknya.

Memperjelas kepastian status lahan, juga perlu dilakukan melalui: (a) Memperkuat dasar kepemilikan lahan dari sisi hukum untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan lahan dikemudian hari; (b) Perlu adanya penyederhanaan dan proses murah bagi masyarakat untuk mendapatkan bukti kepemilikan lahan.

Prosedur pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan didukung oleh kebijakan/regulasi yang lebih sederhana dengan biaya murah bagi prosedur pengembangan HTRPK (ijin pencadangan, perijinan persiapan lahan, perijinan pemanfaatan hasil) dalam upaya mendukung percepatan investasi pada pembangunan Hutan (Tanaman) Rakyat dan HTI pada umumnya. Departemen Kehutanan sebaiknya proaktif dalam mengkonsultasikan peraturan perundangan terkait pembentukan kelembagaan keuangan alternatif bagi pembangunan kehutanan termasuk pembangunan HTRPK.

Bentuk kemitraan dengan menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama berarti memfungsikan Pemerintah Desa dalam pengelolaan hutan dan ini merupakan perwujudan nyata desentralisasi pengelolaan hutan di Kabupaten Jombang. Untuk itu dan sebagai keonsekuensi reformasi pembangunan, maka dukungan

seluruh jajaran pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan desa), antar sektor baik usaha serta para pihak kehutanan lainnya sangat diperlukan. Partisipasi yang bersifat kemitraan lebih potensial untuk dikembangkan sebagai instrumen komunikasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Pemahaman pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fundamen pengembangan partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Karena menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat maka masukan, pandangan dan pendapat masyarakat haruslah diposisikan sebagai masukan yang bernilai untuk mewujudkan keputusan yang responsif. Dengan konsep kemitraan, partisipasi masyarakat didayagunakan sebagai instrumen penting untuk mendapatkan masukan berupa informasi dari kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dinas kehutanan menyarankan partisipasi dengan konsep kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting. Kalau tidak demikian publik akan melihat proses partisipasi hanya sekedar sebagai, apa yang disebut oleh Arnstein, tokenism yaitu ketidak adanya penghargaan terhadap masyarakat, dan masyarakat kurang mendapat informasi dan kurang menghargai adanya perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, karena banyak keputusan kunci diambil tanpa melibatkan masyarakat.

Hubungan sosial yang terjadi dalam konsep kemitraan ini adalah hubungan yang paralel, yang masyarakat dan pemerintah atau pengusaha berada pada satu tingkatan yang sejajar, bukan hubungan yang hirarki. Dengan hubungan yang paralel ini akan terwujud hubungan yang harmonis dalam pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dengan pengusaha. Partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan ini akan terwujud apabila pemerintah memberikan dukungan dengan menuangkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengusaha (eksploitor) mengambil keputusan bersama-sama dengan masyarakat. Tanpa dukungan pemerintah tersebut menjadi sangat sulit kedua kelompok yang berbeda kepentingan untuk disatukan menjadi mitra. Dengan demikian kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penentu terjadinya komunikasi yang seimbang antara pengusaha dengan masyarakat. Dalam tahapan ini seharusnya sudah terjadi perubahan paradigma pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dengan tidak lagi melakukan keberpihakan kepada pemilik modal semata.

Dalam partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi, masyarakat mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kedudukan yang seimbang akan lahir kemampuan tawar-menawar yang sama antara pemrakarsa dan masyarakat.

Menurut Perum Perhutani KPH Jombang, banyak potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan Desa Wonosalam yang ada di Kabupaten Jombang berupa potensi sumber daya air, lahan maupun potensi pariwisata. Jika dilihat lebih jauh potensi yang ada tersebut berupa :

a. Tanaman Hutan Non Kayu

Jenis tanaman yang ada di wilayah kawasan hutan Wonosalam yang ada di Kabupaten Jombang antara lain Pinus, Mahoni, Mindi dan Sono yang kesemuanya telah dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat yang ada dalam kawasan hutan melalui sharing pembagian hasil.

Disamping itu di wilayah kawasan hutan dengan rata-rata ketinggian 600 diatas permukaan laut berdasarkan data tahun 2004 potensi yang ada berupa jenis tanaman Kopi yang ada di Kecamatan Wonosalam dengan areal lahan seluas 907.3 Ha dan total produksi sebesar 616.9 ton, tanaman Cengkeh yang ada di Kecamatan Barend dan Wonosalam dengan areal lahan seluas 1,761.20 Ha dan total produksi sebesar 739.71 ton, tanaman Kakao yang berada di Kecamatan Wonosalam dengan areal lahan seluas 138.15 Ha dan total produksi 119.64 ton.

b. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan yang menjadi potensi pada kawasan hutan desa Wonosalam berdasarkan data pada tahun 2004 antara lain tanaman Jagung yang tersebar di semua daerah kawasan hutan dengan total produksi 1.604.600 Kg, tanaman Kacang Tanah dengan total produksi sebanyak 56.380 Kg, tanaman Ketela Pohon, Bawang dan Cabai sebanyak 6.740 Kg.

c. Tanaman Pertanian

Tanaman Pertanian yang selama ini dikembangkan pada wilayah kawasan hutan berupa tanaman padi yang pada tahun 2004 berdasarkan data yang ada total produksi mencapai 89.960 Kg.

d. Sumber Daya Air

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Jombang mempunyai potensi yang sangat besar berkenaan dengan sumber daya air. Keberadaan Waduk/Embung yang Semuanya berada pada areal Sekitar Hutan yaitu sebanyak 15 buah. Mata Air Banyak Tersebar di Kecamatan Wonosalam

- Desa Carang Wulung ada 10 unit yang dapat melayani 1.200 KK
- Desa Pangklungan ada 6 Unit yang dapat melayani 425 KK
- Desa Sumberjo ada 7 unit yang dapat melayani 100 KK
- Desa Wonosalam ada 3 unit yang dapat melayani 162 KK
- Desa Galengdowo ada 4 unit yang dapat melayani 325 KK
- Desa Jarak ada 6 unit yang dapat melayani 5 KK
- Desa Sambirejo 3 unit yang dapat melayani 65 KK

Kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun swasta harusnya lebih menitik beratkan pada potensi-potensi yang ada di Desa Wonosalam dan lebih menggalakkan sosialisasi program-program yang dijalankan pemerintah dengan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk dapat bermitra dengan organisasi masyarakat desa hutan dalam penyediaan pelayanan umum melalui penyediaan serta pengembangan bantuan penanggulangan kemiskinan.

Pemilihan bibit, pengadaan pupuk

Dalam pemilihan tanaman sebaiknya memilih tanaman yang diminati pasar dengan harga relatif stabil, menghasilkan banyak manfaat serta sesuai dan cocok dengan keadaan lahan.

Pemilihan bibit dalam kegiatan ini melibatkan masyarakat. Artinya masyarakat yang berperan sebagai mitra kerja, dapat memberikan usulan jenis-jenis tanaman apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Begitu juga untuk pemilihan tanaman hutan. Dalam pemilihan bibit tanaman buah, sedapat mungkin yang memiliki nilai ekonomi tinggi, artinya untuk jangka panjang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi, durian misalnya. Bibit yang dipilih juga merupakan bibit dengan kualitas tinggi, artinya daya tumbuh dan hasil produksi dari tanaman tersebut dapat dijamin mutu dan kualitasnya.

Menurut Perum Perhutani KPH Jombang, Daerah hutan desa Wonosalam mempunyai potensi penanaman kunyit dibawah tegakan, namun ketika panen tiba, masyarakat desa hutan Wonosalam tidak mampu membuka peluang pasar sehingga harga kunyit menjadi jatuh. Hal ini dikarenakan kurangnya pemasaran hasil panen dibawah tegakan hutan keluar desa. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah ikut memberi peluang pasar pada petani kunyit dengan pengadaan sarana angkutan atau biaya transportasi.

Monitoring

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan program kemitraan ini adalah monitoring. Perlu perawatan dan pemantauan dari masyarakat secara rutin mengenai pertumbuhan tanaman. Jika terjadi kematian pada beberapa tanaman, perlu dilakukan penyulaman sebagai pengganti tanaman yang mati.

4.3.9.2 Peningkatan Sarana Produksi

Bantuan sarana produksi sudah pernah diberikan oleh dinas kehutanan kabupaten Jombang berupa peralatan mesin pengolah Kakao, Kopi dan Keripik Pisang kepada masyarakat desa Wonosalam, namun sampai pada bulan maret 2010 belum dioperasikan secara maksimal karena belum memiliki gedung produksi dan masyarakat kurang memiliki interest yang besar untuk memanfaatkan sarana produksi pengolah kakao, kopi dan keripik karena masyarakat lebih terbiasa menggunakan alat tradisional. Selain itu alasan yang membuat masyarakat enggan untuk mengelola hasil tanaman dibawah tegakan adalah adanya proses produksi yang tidak sesuai dengan harga jual sehingga masyarakat hanya mendapatkan sedikit keuntungan.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting perannya sebagai perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

4.3.9.3 Optimalisasi Koperasi Masyarakat Desa Hutan

Koperasi MDH Wonosalam, sampai sekarang terlambat dalam melaksanakan RAT sehingga perlu bimbingan dan pembinaan dari Dinas terkait. Keberadaan koperasi masyarakat desa Wonosalam sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan hutan di Desa Wonosalam, hal ini dikarenakan Koperasi MDH Wonosalam dapat menyediakan pupuk bersubsidi, namun pupuk bersubsidi ini hanya diberikan pada masyarakat yang masuk dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang hanya mengelola lahan hutan mili perhutani, sedangkan untuk masyarakat sekitar hutan tidak bisa menikmati adanya pupuk bersubsidi. Seharusnya pupuk bersubsidi juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan untuk memupuk tanaman yang berada di wilayah hutan rakyat.

4.3.9.4 Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Mengelola Kawasan Hutan

Menurut masyarakat desa hutan Wonosalam, terjadinya kerusakan hutan diakibatkan oleh adanya persetujuan pemerintah untuk mengadakan perusakan hutan dengan alasan positif seperti meningkatkan perekonomian. Hal ini sama seperti yang telah diungkapkan Zain (2001:5)

“Istilah “kerusakan hutan” yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Disatu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Disisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah.”

Namun jika perusakan hutan yang bersifat ini tidak diperhitungkan sebelumnya dan hanya mengutamakan sebuah tujuan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan maka akan terjadi bencana longsor yang pernah terjadi pada tahun 2008. Peran LMDH sebagai lembaga Masyarakat Desa Hutan mutlak diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan Desa Hutan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan akan tepat penggunaan, tepat sasaran dan tepat manfaat.

4.4 Analisis Dan Alternatif Strategi Pengembangan Hutan Desa Wonosalam

4.4.1 SWOT Pengelolaan Hutan Desa Wonosalam

Analisis SWOT adalah analisis mengenai potensi, masalah, peluang, dan ancaman yang dimiliki Desa Wonosalam terkait dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis dari PRA yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dengan faktor internal dan eksternal yang memegang peranan penting. Bentuk analisis SWOT ini nantinya akan lebih ditekankan pada pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Wonosalam. Dengan memakai metode analisis SWOT ini akan diperoleh semacam *core strategy* yang prinsipnya merupakan :

- Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada secara terbuka.
- Strategi yang mengatasi hambatan yang ada, dan
- Strategi yang memperbaiki kelemahan yang ada.

Pengerjaan analisis ini dilakukan dengan cara pembagian yang didasarkan pada sektor kehutanan, bidang partisipasi masyarakat dan bidang sosial ekonomi masyarakat yang terdapat di Desa Wonosalam. Untuk lebih jelas mengenai pengembangan sektor kehutanan di Desa Wonoslam ini dapat dilihat pada tabel 4.35 tentang analisis SWOT pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Desa Wonosalam.



Tabel 4.26 Analisis SWOT Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Desa Wonosalam

NO	SEKTOR	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
1	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan hutan yang luasnya 476.1Ha atau 43.51% dari luas lahan desa. (4.1) ▪ pengelolaan hutan di desa Wonosalam sudah berbentuk PHBM (4.2) ▪ Banyak masyarakat yang memanfaatkan hutan dengan menanam tanaman dibawah tegakan. (4.2) ▪ Terdapat program pemerintah berupa pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hasil hutan (4.2.4.6) ▪ Adanya bantuan pemerintah dalam bentuk bibit dan pupuk bersubsidi (4.2.2) ▪ Terdapat hasil hutan non kayu unggulan berupa coklat dan durian (4.1.2) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek ekologi (4.1.1.7) ▪ Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum (4.1.1.7) ▪ Jumlah personil pegawai kehutanan yang tidak seimbang dengan luas lahan yang harus di awasi. (4.1.6.4) ▪ adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak serta tidak adanya keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan hasil hutan secara optimal membuat masyarakat di Desa Wonosalam untuk melakukan penggundulan hutan. (4.1.6.1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya permintaan yang besar untuk hasil hutan non kayu berupa coklat dan durian (4.1.2) ▪ Terdapat dua industri besar yang mengadakan kegiatan kemitraan dengan mesyarakan desa hutan dalam pengelolaan hasil hutan(4.3.1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya transportasi untuk memasarkan hasil hutan yang cukup mahal (4.1.3) ▪ Harga komoditi hasil hutan yang berfluktuasi secara tajam (4.1.3) ▪ pengembangan proyek dalam perawatan tanaman sampai pada pemanenan yang cukup lama(4.1.5)
2	Partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang pengelolaannya langsung dibawah Perum Perhutani KPH Jombang (4.3.2) ▪ Pengelolaan lahan hutan sudah berbentuk PHBM (4.3.5) ▪ Bentuk pengelolaan bersama dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam merupakan bentuk pengelolaan bersama yang sejajar dimana pemerintah dan masyarakat desa hutan sudah memiliki peranan yang sebanding yaitu “komunikasi”, “pertukaran informasi”, “tindakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat kurang memahami Informasi tentang lingkungan dan bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Biasanya masyarakat baru akan mengeluh apabila sudah menderita kerugian. Tingkat kesadaran yang kurang ini bisa dipahami karena kehidupan mereka sudah disibukkan dengan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. (4.3.5) ▪ Kurangnya atau tidak adanya informasi dalam masyarakat tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hak dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya ketertarikan pihak pengusaha pengelola hasil hutan yang masuk dalam Desa Wonosalam (4.1.2) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saran atau masukan dari masyarakat untuk pengelolaan hutan masih kurangh ditanggapi oleh pemerintah. (4.3.1)

NO	SEKTOR	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
		bersama” dan “kemitraan” seperti yang telah disebutkan Berkes dan Pomeroy [1997] (4.3.1) <ul style="list-style-type: none"> tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan sudah masuk dalam tingkatan Penenteraman (placation) dimana Saran masyarakat diterima tetapi belum tentu ditindaklanjuti (4.3.2) Pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Wonosalam sudah mencakup lima aspek penting pengelolaan bersama menurut Pinkerton, dalam Mitchell (1997) Aspek-aspek di atas adalah hal-hal yang dapat membantu dalam mewujudkan pengelolaan bersama. (4.3.3) 	adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban memelihara lingkungan. (4.3.5)		
3	Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Hutan	<ul style="list-style-type: none"> jumlah usia produktif di Desa Wonosalam lebih besar dari pada usia non produktif. (4.1.1.4) redahnya tingkat pengangguran di Desa Wonosalam. (4.1.1.4) tingkat buta huruf hanya berjumlah 17 orang atau 2% dari seluruh jumlah penduduk yang umurnya di atas 10 tahun. (4.1.1.4) sudah terdapat koperasi masyarakat desa hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> belum mempunya masyarakat dalam penguasaan teknologi khususnya sebagai produsen hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu (4.1.1.6) Masyarakat desa belum cukup memiliki kemampuan bernegosiasi dengan mitra kerja dalam pengelolaan sumber daya hutan (4.1.1.7) Kekurangan modal (4.1.1.7) 	<ul style="list-style-type: none"> Tanamn porang yang tumbuh subur di Desa Wonosalam mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi (4.1.2) Hasil komoditas durian dan coklat Desa Wonosalam sangat laku dipasaran sampai keluar kota. (4.1.3) 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi desa hutan yang jauh dari daerah perkotaan sejauh 35km (4.1) Harga komoditi hasil tanaman dibawah tegakan yang sering naik-turun secara tajam. (4.1.3) biaya transportasi tinggi (high cost) yang membebani pemasaran. (4.1.1.4)

Tabel 4.27 Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Wonosalam sektor kehutanan

		Internal		
		Strength	Weaknes	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan hutan yang luasnya 675Ha atau 43.51% dari luas lahan desa. ▪ pengelolaan hutan di desa Wonosalam sudah berbentuk PHBM ▪ Banyak masyarakat yang memanfaatkan hutan dengan menanam tanaman dibawah tegakan. ▪ Terdapat program pemerintah berupa pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hasil hutan ▪ Adanya bantuan pemerintah dalam bentuk bibit dan pupuk bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek ekologi. ▪ Rendahnya pemahaman msyarakat terhadap aspek hukum. ▪ Jumlah personil pegawai kehutanan yang tidak seimbang dengan luas lahan yang harus di awasi. ▪ kebutuhan ekonomi yang mendesak serta tidak adanya keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan hasil hutan secara optimal membuat masyarakat di Desa Wonosalam untuk melakukan penggundulan hutan. 	
Eksternal	Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dua industri besar yang mengadakan kegiatan kemitraan dengan mesyarakan desa hutan dalam pengelolaan hasil hutan. ▪ Adanya permintaan yang besar untuk hasil hutan non kayu berupa coklat dan durian. 	<p>Strategi SO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan hasil hutan yang terdapat di Desa Hutan Wonosalam dengan memberdayakan masyarakat yang bekerja disektor kehutanan dan perkebunan untuk memenuhi permintaan hasil hutan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (industri besar) 	<p>Strategi WO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agroforestry untuk melestarikan hutan produksi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan kayu yang semakin besar tiap tahunnya ▪ THPB/tebang pilih ▪ Insentif-disinsentif dan penegakan hukum ▪ Penghijauan berkelanjutan/reboisasi
	Threat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya transportasi untuk memasarkan hasil hutan yang cukup mahal (4.1.3) ▪ Harga komoditi hasil hutan yang berfluktuasi secara tajam. ▪ pengembangan proyek dalam perawatan tanaman sampai pada pemanenan yang cukup lama. 	<p>Strategi ST :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan hutan yang luasnya 476.1Ha atau 60% dari luas lahan desa. berpotensi untuk dimanfaatkan secara optimal karena dapat mengurangi pembentukan lahan kritis akibat tanaman dibawah tegakan maupun tanaman tegakan merupakan vegetasi yang dapat mengurangi terjadinya erosi tanah. ▪ Banyak masyarakat yang memanfaatkan hutan dengan menanam tanaman dibawah tegakan.sehingga masyarakat dapat mendapatkan hasil dengan cepat dari hasi tanaman dibawah tegakan, selain itu unsure hara yang terdapat di lahan tetap stabil. 	<p>Strategi WT :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah ikut berusaha dalam menetapkan harga jual komoditas hasil tanaman dibawah tegakan agar ketika masyarakat desa hutan memanen hasil hutan harga jual tidak jatuh ▪ pengadaan sarana produksi yang tepat untuk masyarakat desa hutan ▪ pemerintah dan dinas terkait melakukan pelatihan dan penyuluhan mengenai inovasi-inovasi baru tentang pengelolaan hasil hutan secara optimal

Tabel 4.28 Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Wonosalam bidang partisipasi masyarakat

		Internal		
		Strength	Weakness	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang pengelolaannya langsung dibawah Perum Perhutani KPH Jombang . ▪ Pengelolaan lahan hutan sudah berbentuk PHBM. ▪ Bentuk pengelolaan bersama dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam merupakan bentuk pengelolaan bersama yang sejajar dimana pemerintah dan masyarakat desa hutan sudah memiliki peranan yang sebanding yaitu “komunikasi”, “pertukaran informasi”, “tindakan bersama” dan “kemitraan” seperti yang telah disebutkan Berkes dan Pomeroy [1997]. ▪ tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan sudah masuk dalam tingkatan Penenteraman (placation) dimana Saran masyarakat diterima tetapi belum tentu ditindaklanjuti. ▪ Pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Wonosalam sudah mencakup lima aspek penting pengelolaan bersama menurut Pinkerton, dalam Mitchell (1997) Aspek-aspek di atas adalah hal-hal yang dapat membantu mewujudkan pengelolaan bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat kurang memahami Informasi tentang lingkungan dan bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Biasanya masyarakat baru akan mengeluh apabila sudah menderita kerugian. Tingkat kesadaran yang kurang ini bisa dipahami karena kehidupan mereka sudah disibukkan dengan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. . ▪ Kurangnya atau tidak adanya informasi dalam masyarakat tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hak dimaksud adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban memelihara lingkungan. 	
Eksternal	Opportunities	<p>Opportunities :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya ketertarikan pihak pengusaha pengelola hasil hutan yang masuk dalam Desa Wonosalam . 	<p>Strategi SO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pengelolaan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang sejajar dapat dikembangkan dengan mengadakan kemitraan antara kedua belah pihak dengan pihak ketiga (investor) 	<p>Strategi WO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membatasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pengelolaan hutan yang dapat menghambat proses komunikasi yang hendak dibangun ▪ Perlunya pemberian informasi tentang pengadaan kemitraan
	Thre	<p>Threat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saran atau masukan dari masyarakat untuk 	<p>Strategi ST :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat lebih dilibatkan dalam pengambilan 	<p>Strategi WT :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat perlu diberi pelatihan dn penyuluhan

	pengelolaan hutan masih kurang ditanggapi oleh pemerintah.	keputusan dalam rencana pengelolaan hutan produksi	agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk pengelolaan hutan secara tepat pada lahan hutan masing-masing sehingga dapat memberi masukan yang tepat pada dinas terkait untuk bantuan pengelolaan hutan yang dibutuhkan,
--	--	--	--

Tabel 4.29 Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Wonosalam dibidang social ekonomi MDH

		Internal	
		Strength	Weakness
		Strength : <ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah usia produktif di Desa Wonosalam lebih besar dari pada usia non produktif. ▪ redahnya tingkat pengangguran di Desa Wonosalam. ▪ tingkat buta huruf hanya berjumlah 17 orang atau 2% dari seluruh jumlah penduduk yang umurnya di atas 10 tahun. ▪ sudah terdapat UKM kerajinan, dan agrobisnis 	Weakness : <ul style="list-style-type: none"> ▪ belum mampunya masyarakat dalam penguasaan teknologi khususnya sebagai produsen hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. ▪ Masyarakat desa belum cukup memiliki kemampuan bernegosiasi dengan mitra kerja dalam pengelolaan sumber daya hutan. ▪ Kekurangan modal.
Eksternal	Opportunities	Opportunities : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil komoditas durian dan coklat Desa Wonosalam sangat laku dipasaran sampai keluar kota. 	Strategi SO : <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengelolaan hutan produksi lebih melibatkan dan memberdayakan masyarakat agar masyarakat lebih merasa memiliki dan menjaga hutan
	Threat	Threat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga komoditi hasil tanaman dibawah tegakan yang sering naik-turun secara tajam. ▪ biaya transportasi tinggi (high cost) yang membebani pemasaran. 	Strategi ST : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian bantuan berupa pemasaran hasil hutan dengan cara menurunkan biaya transportasi lewat retribusi atau biaya transportasi umum
			Strategi WO : <ul style="list-style-type: none"> ▪ agroforestry dan pelatihan
			Strategi WT : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum, ▪ Membuka koperasi ▪ Pengadaan sarana produksi

4.4.2 Alternatif Strategi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengisian kuisisioner yang dibuat berdasarkan kaidah AHP, yang pertanyaannya secara keseluruhan terkait dengan hutan lindung di Garut seperti: pengelolaan hutan lindung, permasalahan yang ada, dan alternatif strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pandangan/pendapat para stakeholder terhadap bobot kepentingan terhadap masalah hutan produksi di Desa Wonosalam dihitung dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Menurut Saaty (1993), metode ini mampu memecahkan permasalahan yang terstruktur maupun kompleks (tidak terstruktur) dengan data atau informasi yang terbatas dengan membangun hirarki sistem yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok menurut hubungan yang esensial.

Elemen-elemen penyusun hirarki ditentukan berdasarkan data sekunder dan wawancara stakeholders. Pemberian bobot kepentingan dilakukan dengan membandingkan masing-masing elemen yang sudah ditentukan secara berpasangan dengan menggunakan skala komparasi seperti pada Tabel 4.18. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, kuisisioner (pemberian bobot kepentingan) dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Alternatif strategi pengelolaan hutan lindung yang dirumuskan mengacu pada pandangan stakeholder terhadap masing-masing elemen penting dalam pengelolaan hutan lindung serta permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi.

Tabel 4.30 Skala Perbandingan Berpasangan

Skala/tingkat kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen penyumbang sama kuat pada sifatnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas elemen lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominasinya telah terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkannya
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara 2 pertimbangan	Kompromi diperlukan di antara 2 pertimbangan
Kebalikan (1/2,1/3...dst)	Jika untuk aktivitas i mendapat suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dengan i.	

Sumber: saaty (1993)

Kondisi hutan produksi di Desa Wonosalam pada saat ini sangat mengkhawatirkan, disebabkan oleh penurunan degradasi hutan dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Jawa diketahui bahwa hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani berubah fungsinya menjadi Hutan Lindung. Pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut menyepakati dibentuknya forum PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) supaya para masyarakat desa hutan dapat diberdayakan.

4.4.2.1 Hutan Kawasan (Hutan produksi milik pemerintah)

Penggunaan AHP untuk kawasan hutan (milik pemerintah) dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam hirarki terdapat tujuan utama, dan kriteria-kriteria yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Dibawah ini menunjukkan stuktur hirarki dari kasus permasalahan yang ingin diteliti yakni prioritas rencana pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat desa hutan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu menekan tingkat degradasi hutan, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan meningkatkan sumber daya manusia. Penetapan alternative strategi tiap-tiap tujuan tersebut bisa dilihat pada gambar 4.15.

Tabel 4.31 Struktur Hierarki Pengelolaan Hutan Kawasan Bersama Masyarakat

Meningkatkan Perekonomian MDH	Menekan Tingkat Degradasi Hutan	Meningkatkan SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan hasil hutan secara optimal • Kemitraan • Mengoptimalkan Koperasi MDH • Peningkatan sarana produksi yang sesuai dengan masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Agroforestry • Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) • Penegakan hukum • Penghijauan berkelanjutan • 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah • Pelatihan dan Penyuluhan kepada MSD •

Meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan bisa dicapai dengan empat alternative strategi yaitu mengembangkan hasil hutan secara optimal, kemitraan antara masyarakat dinas terkait dan pihak ketiga, mengoptimalkan koperasi MDH, dan meningkatkan sarana produksi yang sesuai dengan masyarakat desa hutan. Sedangkan alternative strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan menekan degradasi hutan dapat dilakukan dengan cara agroforestry, tebang habis permudaan buatan (THPB), penegakan hukum dan penghijauan berkelanjutan, sedangkan untuk meningkatkan

sumber daya manusia di desa Wonosalam alternative strategi yang akan dilakukan yaitu pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah dan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan.

Alternatif strategi untuk mencapai tiga tujuan utama pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat dimisalkan dengan huruf sebagai berikut:

- A = Mengembangkan hasil hutan secara optimal
- B = Agroforestry
- C = THPB
- D = Penegakan hukum
- E = Pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah
- F = Penghijauan berkelanjutan
- G = Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan
- H = Kemitraan
- I = Mengoptimalkan koperasi MDH; dan
- J = Meningkatkan sarana produksi

Tabel 4.32 Matriks perbandingan berpasangan hasil survey di Bappeda untuk Pengelolaan Hutan Rakyat

Bappeda										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	1.00	1.00	0.33	3.00	0.33	1.00	1.00	0.50	2.00	2.00
b	1.00	1.00	3.00	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
c	3.00	0.33	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	2.00	1.00
d	0.33	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
e	3.00	0.33	3.00	0.33	1.00	0.33	0.50	0.33	3.00	3.00
f	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
g	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
h	2.00	1.00	1.00	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
i	0.50	0.33	0.50	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	0.50
j	0.50	1.00	1.00	0.33	0.25	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Σ	18.83	10.00	13.33	8.00	16.25	8.00	8.17	10.17	25.00	14.50

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah $n(n-1)/2$ karena saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Responden dari Bappeda menyatakan bahwa faktor-faktor untuk memilih alternative strategi e (pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) kurang penting dibandingkan c (tebang pilih), namun alternatif strategi tebang pilih agak kurang penting dari i (Pengembangkan kurikulum pendidikan yang

berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) maupun pengembangan pendidikan kurang penting disbanding dengan alternative strategi yang lainnya.

Tabel 4.33 Bobot Relatif dan Eigen Vektor Utama dari Hasil Survey di Bappeda

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Σ	eigen vector utama
A	0.08	0.10	0.02	0.38	0.02	0.13	0.12	0.05	0.08	0.14	0.70	0.07
B	0.08	0.10	0.16	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.66	0.17
C	0.23	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.04	0.10	0.08	0.07	1.18	0.12
D	0.03	0.30	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.30	0.12	0.21	1.10	0.11
E	0.23	0.03	0.16	0.04	0.06	0.04	0.06	0.03	0.12	0.21	0.98	0.10
F	0.08	0.10	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.10	0.11
G	0.08	0.10	0.16	0.13	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.12	0.11
H	0.15	0.10	0.05	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.06	0.11
I	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.35	0.03
J	0.04	0.10	0.05	0.04	0.02	0.13	0.12	0.10	0.08	0.07	0.74	0.07

Dari hasil eigen vector utama pada hasil kuisioner AHP dari Bappeda diketahui bahwa prioritas alternative strategi yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.21

Tabel 4.34 Prioritas Pengembangan Hutan Kawasan menurut Bappeda

Eigen Vector Utama`	prioritas pengembangan
0.17	B = Agroforestry
0.12	C = THPB
0.11	D = Penegakan Hukum
0.11	F = penghijauan berkelanjutan
0.11	G = pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan
0.11	H = kemitraan
0.10	E = Pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah
0.07	A = pengembangan hasil hutan secara optimal
0.07	J = meningkatkan sarana produksi
0.03	I = meningkatkan koperasi MDH

Secara umum, prioritas pengembangan yang dipilih oleh bappeda dalam pengelolaan hutan rakyat adalah mengembangkan hasil hutan secara optimal, hal ini dikarenakan keberadaan hutan rakyat merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil hutan lebih maksimal untuk mencukupi perekonomian masyarakat sendiri.

Hasil kuisioner AHP dari Bappeda dapat diketahui nilai CI. Apabila C.I bernilai nol, berarti matrik konsisten. batas ketidakkonsistensi yang ditetapkan Saaty(1987), diukur dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI) yang ditabelkan dalam tabel

4.20. Nilai ini bergantung pada ordo matriks n . Dengan demikian, Rasio konsistensi dapat dirumuskan: untuk menentukan apakah hasil dari kuisioner dapat dipakai. Apabila nilai CR diatas 0,1 maka hasil kuisioner AHP tidak konsisten sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.35 Perhitungan CI dan CR pada hasil kuisioner di Bappeda

Σ matriks perbandingan berpasangan	Σ bobot relatif	Hasil kali
a	b	a x b
13.33	0.07	1.47
10.00	0.17	1.10
18.83	0.12	1.32
8.00	0.11	1.33
16.25	0.10	1.60
8.00	0.11	0.94
8.17	0.11	0.91
10.17	0.11	1.08
25.00	0.03	0.87
14.50	0.07	1.08
λ maksimum =		11.71
		1.71
C.I =		0.19
C.R =		0.1

Hasil perhitungan responden dari Bappeda memiliki nilai CR = 0,1 sehingga jawaban yang diberikan dari responden konsisten sehingga bisa dipergunakan dalam perencanaan.

Tabel 4.36 Matriks perbandingan berpasangan hasil survey di Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk Pengelolaan Hutan Rakyat

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	1.00	1.00	0.33	3.00	0.33	1.00	1.00	0.50	2.00	2.00
b	1.00	1.00	3.00	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
c	3.00	0.33	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	2.00	1.00
d	0.33	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
e	3.00	0.33	3.00	0.33	1.00	0.33	0.50	0.33	3.00	3.00
f	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
g	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
h	2.00	1.00	1.00	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
i	0.50	0.33	0.50	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	0.50
j	0.50	1.00	1.00	0.33	0.25	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Σ	13.33	10.00	18.83	8.00	16.25	8.00	8.17	10.17	25.00	14.50

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah $n(n-1)/2$ karena saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Responden dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyatakan bahwa faktor-faktor untuk memilih alternative strategi e (pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

secara lestari di tingkat sekolah) kurang penting dibandingkan c (tebang pilih), namun alternative strategi tebang pilih agak kurang penting dari i (Pengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) maupun pengembangan pendidikan kurang penting disbanding dengan alternative strategi yang lainnya.

Tabel 4.37 Bobot Relatif dan Eigen Vektor Utama dari Hasil Survey di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Σ	eigen vector utama
A	0.08	0.10	0.02	0.38	0.02	0.13	0.12	0.05	0.08	0.14	1.10	0.11
B	0.08	0.10	0.16	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.10	0.11
C	0.23	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.04	0.10	0.08	0.07	0.70	0.07
D	0.03	0.30	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.30	0.12	0.21	1.66	0.17
E	0.23	0.03	0.16	0.04	0.06	0.04	0.06	0.03	0.12	0.21	0.98	0.10
F	0.08	0.10	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.18	0.12
G	0.08	0.10	0.16	0.13	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.12	0.11
H	0.15	0.10	0.05	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.06	0.11
I	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.35	0.03
J	0.04	0.10	0.05	0.04	0.02	0.13	0.12	0.10	0.08	0.07	0.74	0.07

Dari hasil eigen vector utama pada hasil kuisioner AHP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan diketahui bahwa prioritas alternative strategi yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.21

Tabel 4.38 Prioritas Pengembangan Hutan Kawasan menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Eigen Vector Utama`	prioritas pengembangan
0.17	D = Penegakan hukum
0.12	F = Penghijauan berkelanjutan
0.11	G = Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan
0.11	A = Mengembangkan hasil hutan secara optimal
0.11	B = Agroforestry
0.11	H = Kemitraan
0.10	E = Pengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah
0.07	J = Meningkatkan sarana produksi
0.07	C = THPB
0.03	I = Mengoptimalkan koperasi MDH

Secara umum, prioritas pengembangan yang dipilih oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pengelolaan hutan rakyat adalah mengembangkan hasil hutan secara

optimal, hal ini dikarenakan keberadaan hutan rakyat merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil hutan lebih maksimal untuk mencukupi perekonomian masyarakat sendiri.

Hasil kuisioner AHP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat diketahui nilai CI. Apabila C.I bernilai nol, berarti matrik konsisten. batas ketidakkonsistensi yang ditetapkan Saaty(1987), diukur dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI) yang ditabelkan dalam tabel 4.20. Nilai ini bergantung pada ordo matrik n. Dengan demikian, Rasio konsistensi dapat dirumuskan: untuk menentukan apakah hasil dari kuisioner dapat dipakai. Apabila nilai CR diatas 0,1 maka hasil kuisioner AHP tidak konsisten sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.39 Perhitungan CI dan CR pada hasil kuisioner di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Σ matriks perbandingan berpasangan	Σ bobot relatif	Hasil kali
a	b	a x b
13.33	0.11	1.47
10.00	0.11	1.10
18.83	0.07	1.32
8.00	0.17	1.33
16.25	0.10	1.60
8.00	0.12	0.94
8.17	0.11	0.91
10.17	0.11	1.08
25.00	0.03	0.87
14.50	0.07	1.08
λ maksimum =		11.71
		1.71
C.I =		0.19
C.R =		0.1

Hasil perhitungan responden dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki nilai CR = 0,1 sehingga jawaban yang diberikan dari responden konsisten sehingga bisa dipergunakan dalam perencanaan.

Tabel 4.40 Matriks perbandingan berpasangan hasil survey di Perum Perhutani KPH Jombang untuk Pengelolaan Hutan Rakyat

Perum Perhutani KPH Jombang										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	1.00	1.00	0.33	3.00	0.33	1.00	1.00	0.50	2.00	2.00
b	1.00	1.00	3.00	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
c	3.00	0.33	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	2.00	1.00
d	0.50	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
e	3.00	0.33	3.00	0.33	1.00	0.33	0.50	0.33	3.00	3.00
f	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
g	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
h	2.00	1.00	1.00	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
i	0.50	0.33	0.50	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	0.50
j	0.50	1.00	1.00	0.33	0.25	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Σ	14.5	10.00	18.83	8.00	16.25	8.00	8.17	10.17	25.00	14.50

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah $n(n-1)/2$ karena saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Responden dari Perum Perhutani KPH Jombang menyatakan bahwa faktor-faktor untuk memilih alternative strategi e (pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) kurang penting dibandingkan c (tebang pilih), namun alternative strategi tebang pilih agak kurang penting dari i (Pengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) maupun pengembangan pendidikan kurang penting disbanding dengan alternative strategi yang lainnya.

Tabel 4.41 Bobot Relatif dan Eigen Vektor Utama dari Hasil Survey di Perum Perhutani KPH Jombang

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Σ	eigen vector utama
A	0.08	0.10	0.02	0.38	0.02	0.13	0.12	0.05	0.08	0.14	1.10	0.11
B	0.08	0.10	0.16	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.10	0.11
C	0.23	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.04	0.10	0.08	0.07	0.70	0.07
D	0.03	0.30	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.30	0.12	0.21	1.18	0.12
E	0.23	0.03	0.16	0.04	0.06	0.04	0.06	0.03	0.12	0.21	0.98	0.10
F	0.08	0.10	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.66	0.17
G	0.08	0.10	0.16	0.13	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.12	0.11
H	0.15	0.10	0.05	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.06	0.11
I	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.35	0.03
J	0.04	0.10	0.05	0.04	0.02	0.13	0.12	0.10	0.08	0.07	0.74	0.07

Dari hasil eigen vector utama pada hasil kuisioner AHP dari Perum Perhutani KPH Jombang diketahui bahwa prioritas alternative strategi yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.21

Tabel 4.42 Prioritas Pengembangan Hutan Kawasan menurut Perum Perhutani KPH Jombang

Eigen Vector Utama`	prioritas pengembangan
0.17	F = Penghijauan berkelanjutan
0.12	D = Penegakan hukum
0.11	G = Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan
0.11	A = Mengembangkan hasil hutan secara optimal
0.11	B = Agroforestry
0.11	H = Kemitraan
0.10	E = Mengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah
0.07	J = Meningkatkan sarana produksi
0.07	C = THPB
0.03	I = Mengoptimalkan koperasi MDH

Secara umum, prioritas pengembangan yang dipilih oleh Perum Perhutani KPH Jombang dalam pengelolaan hutan rakyat adalah mengembangkan hasil hutan secara optimal, hal ini dikarenakan keberadaan hutan rakyat merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil hutan lebih maksimal untuk mencukupi perekonomian masyarakat sendiri.

Hasil kuisioner AHP dari Perum Perhutani KPH Jombang dapat diketahui nilai CI. Apabila C.I bernilai nol, berarti matrik konsisten. batas ketidakkonsistensi yang ditetapkan Saaty(1987), diukur dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI) yang ditabelkan dalam tabel 4.20. Nilai ini bergantung pada ordo matrik n. Dengan demikian, Rasio konsistensi dapat dirumuskan: untuk menentukan apakah hasil dari kuisioner dapat dipakai. Apabila nilai CR diatas 0,1 maka hasil kuisioner AHP tidak konsisten sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.43 Perhitungan CI dan CR pada hasil kuisioner di Perum Perhutani KPH Jombang

Σ matriks perbandingan berpasangan	Σ bobot relatif	Hasil kali
a	b	a x b
13.33	0.11	0.11
10.00	0.11	0.11
18.83	0.07	0.07
8.00	0.17	0.12
16.25	0.10	0.10
8.00	0.12	0.17
8.17	0.11	0.11
10.17	0.11	0.11
25.00	0.03	0.03
14.50	0.07	0.07
λ maksimum =		11.81
		1.81
C.I =		0.13
C.R =		0.1

Hasil perhitungan responden dari Perum Perhutani KPH Jombang memiliki nilai CR = 0,1 sehingga jawaban yang diberikan dari responden konsisten sehingga bisa dipergunakan dalam perencanaan.

Hasil kuisioner AHP dari Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani dapat disimpulkan dengan menjumlahkan hasil dari jumlah eigen vector utama dari kedua hasil perhitungan kuisioner AHP. Untuk perhitungan hasil jumlah eigen vector utama dapat dilihat pada tabel 4.35.

Tabel 4.44 Jumlah Eigen vector utama perhitungan AHP Bappeda dan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan Rakyat

Alternatif strategi	eigen vector utama I	eigen vector utama II	eigen vector utama III	Σ Eigen Vector utama
A	0.07	0.11	0.11	0.29
B	0.17	0.11	0.11	0.39
C	0.12	0.07	0.07	0.26
D	0.11	0.17	0.12	0.40
E	0.07	0.06	0.10	0.23
F	0.11	0.12	0.17	0.40
G	0.11	0.11	0.07	0.29
H	0.11	0.11	0.03	0.25
I	0.03	0.07	0.11	0.21
J	0.07	0.03	0.11	0.21

alternative strategi yang memiliki nilai *eigen vector* terbesar adalah yang memiliki prioritas tertinggi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. dari perhitungan penjumlahan *eigen vector* ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa alternative strategi B, D dan F memiliki prioritas tertinggi dengan nilai eigen vector terbesar. Maka

alternatif strategi yang dilakukan untuk pengelolaan hutan kawasan bersama masyarakat di Desa Wonosalam yaitu agrofotestry, THPB dan Penghijauan berkelanjutan. Pemilihan untuk menekan tingkat degradasi hutan di Hutan Kawasan sangat diperlukan untuk menjaga luas dan kualitas tegakan hutan agar tetap terjaga.

4.4.2.2 Hutan Rakyat (Hutan produksi milik masyarakat desa hutan)

Penggunaan AHP untuk hutan produksi milik masyarakat dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam hirarki terdapat tujuan utama, dan kriteria-kriteria yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Dibawah ini menunjukkan stuktur hirarki dari kasus permasalahan yang ingin diteliti yakni prioritas rencana pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat desa hutan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu menekan tingkat degradasi hutan, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan meningkatkan sumber daya manusia.

Meningkatkan Perekonomian MDH	Menekan Tingkat Degradasi Hutan	Meningkatkan SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan hasil hutan secara optimal • Kemitraan • Mengoptimalkan Koperasi MDH • Peningkatan sarana produksi yang sesuai dengan masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Agroforestry • Tebang Pilih • insentif dan disinsentif • Penghijauan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah • Pelatihan dan Penyuluhan kepada MSD

Maningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan bisa dicapai dengan empat alternative strategi yaitu mengembangkan hasil hutan secara optimal, kemitraan antara masyarakat dinas terkait dan pihak ketiga, mengoptimalkan koperasi MDH, dan meningkatkan sarana produksi yang sesuai dengan masyarakat desa hutan. Sedangkan alternative strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan menekan degradasi hutan dapat dilakukan dengan cara agroforestry, tebang pilih, dan penghijauan berkelanjutan, sedangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa Wonosalam alternative strategi yang akan dilakukan yaitu pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah dan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan.

Alternatif strategi pengelolaan hutan bersama masyarakat dimisalkan dengan huruf sebagai berikut:

A = Mengembangkan hasil hutan secara optimal

B = Agroforestry

C = Tebang pilih

D = Insentif dan disinsentif

E = Mengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah

F = Penghijauan berkelanjutan

G = Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan

H = Kemitraan

I = Mengoptimalkan koperasi MDH; dan

J = Meningkatkan sarana produksi

Hasil perhitungan dari kuisisioner AHP dapat dilihat pada tabel 4.19 dan 1.20.

Tabel 4.45 Matriks perbandingan berpasangan hasil survey di Bappeda untuk Pengelolaan Hutan Rakyat

Bappeda										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	1.00	1.00	8.00	3.00	7.00	1.00	1.00	0.50	2.00	2.00
b	1.00	1.00	3.00	0.33	9.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
c	0.13	0.33	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	2.00	1.00
d	0.33	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
e	0.14	0.11	3.00	0.33	1.00	0.33	0.50	0.33	3.00	0.14
f	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
g	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
h	2.00	1.00	1.00	0.33	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
i	0.50	0.33	0.50	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00	0.50
j	0.50	1.00	1.00	0.33	7.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Σ	7.60	9.78	26.50	8.00	35.67	8.00	8.17	10.17	25.00	11.64

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah $n(n-1)/2$ karena saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Responden yang jawabannya tertera pada tabel 4.19 menyatakan bahwa faktor-faktor untuk memilih alternative strategi e (pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) kurang penting dibandingkan c (tebang pilih), namun alternative strategi tebang pilih agak kurang penting dari i (Pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) maupun pengembangan pendidikan kurang penting disbanding dengan alternative strategi yang lainnya.

Tabel 4.24 merupakan hasil perhitungan bobot relatif yang dinormalkan dari contoh di tabel 2.23 Eigen vektor utama yang tertera pada kolom terakhir tabel 4.20 didapat dengan merata-rata bobot relatif yang dinormalkan pada setiap baris.

Tabel 4.46 Bobot Relatif dan Eigen Vektor Utama dari Tabel 4.42

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Σ	eigen vector utama
A	0.08	0.10	0.02	0.38	0.02	0.13	0.12	0.05	0.08	0.14	1.10	0.11
B	0.08	0.10	0.16	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.10	0.11
C	0.23	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.04	0.10	0.08	0.07	0.70	0.07
D	0.03	0.30	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.30	0.12	0.21	1.66	0.17
E	0.23	0.03	0.16	0.04	0.06	0.04	0.06	0.03	0.12	0.21	0.98	0.10
F	0.08	0.10	0.16	0.13	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.18	0.12
G	0.08	0.10	0.16	0.13	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.12	0.11
H	0.15	0.10	0.05	0.04	0.18	0.13	0.12	0.10	0.12	0.07	1.06	0.11
I	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.35	0.03
J	0.04	0.10	0.05	0.04	0.02	0.13	0.12	0.10	0.08	0.07	0.74	0.07

Dari hasil eigen vector utama pada tabel 4.20 diketahui bahwa prioritas alternative strategi yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.21

Tabel 4.47 Prioritas Pengembangan Hutan Kawasan

Eigen Vector Utama`	prioritas pengembangan
0.17	A = Mengembangkan hasil hutan secara optimal
0.16	D = Insentif dan disinsentif
0.12	B = Agroforestry
0.11	F = Penghijauan berkelanjutan
0.11	H = Kemitraan
0.11	G = Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan
0.10	J = Meningkatkan sarana produksi
0.05	C = Tebang pilih
0.05	E = Mengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah
0.04	I = Mengoptimalkan koperasi MDH

Secara umum, prioritas pengembangan yang dipilih oleh bappeda dalam pengelolaan hutan rakyat adalah mengembangkan hasil hutan secara optimal, hal ini dikarenakan keberadaan hutan rakyat merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil hutan lebih maksimal untuk mencukupi perekonomian masyarakat sendiri.

Hasil kuisioner AHP pada tabel 4.25 dapat diketahui nilai CI. Apabila C.I bernilai nol, berarti matrik konsisten. batas ketidakkonsistensi yang ditetapkan Saaty(1987), diukur dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI) yang ditabelkan dalam tabel 4.20. Nilai ini bergantung pada ordo matrik n. Dengan demikian, Rasio konsistensi dapat dirumuskan: untuk menentukan apakah hasil dari kuisioner dapat dipakai. Apabila

nilai CR diatas 0,1 maka hasil kuisisioner AHP tidak konsisten sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.48 Perhitungan CI dan CR pada tabel 4.43

Σ matriks perbandingan berpasangan	Σ bobot relatif	Hasil kali
a	b	a x b
7.60	0.17	1.26
9.78	0.12	1.17
26.50	0.05	1.29
8.00	0.16	1.27
35.67	0.05	1.72
8.00	0.11	0.89
8.17	0.11	0.88
10.17	0.11	1.10
25.00	0.04	0.92
11.64	0.10	1.11

$$\lambda \text{ maksimum} = 11.60$$

$$C.I = 1.60$$

$$C.R = 0.1$$

Hasil perhitungan responden dari Bappeda memiliki nilai CR = 0,1 sehingga jawaban yang diberikan dari responden konsisten sehingga bisa dipergunakan dalam perencanaan.

Hasil kuisisioner AHP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk penentuan prioritas pengelolaan hutan rakyat di Desa Wonosalam dapat dilihat pada tabel 4.27 tentang matriks perbandingan berpasangan hasil survey di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tabel 4.49 Matriks perbandingan berpasangan hasil survey di Dinas Kehutanan untuk Pengelolaan Hutan Rakyat

Dinas Kehutanan dan perkebunan										
	a	b	c	d	e	f	g	H	i	j
a	1.00	1.00	0.50	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.00
b	1.00	1.00	0.50	1.00	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25
c	2.00	2.00	1.00	0.50	0.25	0.50	0.25	0.25	0.25	0.50
d	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.20	1.00
e	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.20
f	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.20	1.00
g	3.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20
h	3.00	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
i	3.00	1.00	4.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.50
j	1.00	4.00	2.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00
Σ	21.00	17.00	24.00	16.50	15.83	15.83	12.58	7.08	7.18	6.65

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah $n(n-1)/2$ karena saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Responden yang jawabannya tertera

pada tabel 4.19 menyatakan bahwa faktor-faktor untuk memilih alternative strategi e (pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) kurang penting dibandingkan c (tebang pilih), namun alternative strategi tebang pilih agak kurang penting dari i (Pengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah) maupun pengembangan pendidikan kurang penting disbanding dengan alternative strategi yang lainnya.

Tabel 4.24 merupakan hasil perhitungan bobot relatif yang dinormalkan dari contoh di tabel 2.23 Eigen vektor utama yang tertera pada kolom terakhir tabel 4.20 didapat dengan merata-rata bobot relatif yang dinormalkan pada setiap baris.

Tabel 4.50 Bobot Relatif dan Eigen Vektor Utama dari Tabel 4.46

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Σ	eigen vector utama
A	0.05	0.06	0.02	0.06	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.15	0.50	0.05
B	0.05	0.06	0.02	0.06	0.02	0.06	0.08	0.14	0.14	0.04	0.66	0.07
C	0.10	0.12	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.08	0.50	0.05
D	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.04	0.03	0.15	0.67	0.07
E	0.14	0.24	0.17	0.06	0.06	0.06	0.08	0.14	0.03	0.03	1.01	0.10
F	0.14	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.04	0.03	0.15	0.76	0.18
G	0.14	0.06	0.17	0.06	0.06	0.06	0.08	0.14	0.14	0.03	0.95	0.09
H	0.14	0.06	0.17	0.24	0.06	0.25	0.08	0.14	0.14	0.15	1.44	0.14
I	0.14	0.06	0.17	0.30	0.32	0.32	0.08	0.14	0.14	0.08	1.74	0.17
J	0.05	0.24	0.08	0.06	0.32	0.06	0.40	0.14	0.28	0.15	1.77	0.08

Dari hasil eigen vector utama pada tabel 4.28 diketahui bahwa prioritas alternative strategi yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.29

Tabel 4.51 Prioritas Pengembangan Hutan Kawasan

Eigen Vector Utama	prioritas pengembangan
0.18	F = Penghijauan berkelanjutan
0.17	I = Mengoptimalkan koperasi MDH
0.14	H = Kemitraan
0.10	E = Mengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah
0.09	G = Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan
0.08	J = Meningkatkan sarana produksi
0.07	D = Insentif dan disinsentif
0.07	B = Agroforestry
0.05	A = Mengembangkan hasil hutan secara optimal
0.05	C = Tebang pilih

Prioritas pengembangan yang dipilih oleh dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pengelolaan hutan rakyat adalah meningkatkan sarana produksi, mengoptimalkan koperasi MDH dan kemitraan yang ketiga strategi alternative ini masuk dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Hasil kuisisioner AHP pada tabel 4.29 dapat diketahui nilai CI. Apabila C.I bernilai nol, berarti matrik konsisten. batas ketidakkonsistensi yang ditetapkan Saaty(1987), diukur dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai pembangkit random (RI) yang ditabelkan dalam tabel 4.20. Nilai ini bergantung pada ordo matrik n. Dengan demikian, Rasio konsistensi dapat dirumuskan: untuk menentukan apakah hasil dari kuisisioner dapat dipakai. Apabila nilai CR diatas 0,1 maka hasil kuisisioner AHP tidak konsisten sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.52 Perhitungan CI dan CR pada tabel 4.47

Σ matriks perbandingan berpasangan	Σ bobot relatif	Hasil kali
a	b	a x b
21.00	0.05	1.05
17.00	0.07	1.13
24.00	0.05	1.19
16.50	0.07	1.10
15.83	0.10	1.60
15.83	0.08	1.21
12.58	0.09	1.19
7.08	0.14	1.02
7.18	0.17	1.25
6.65	0.18	1.18
λ maksimum =		11.92
		1.92
C.I =		0.21
C.R =		0.1

Hasil perhitungan responden dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki nilai CR = 0,1 sehingga jawaban yang diberikan dari responden konsisten sehingga bisa dipergunakan dalam perencanaan.

Hasil kuisisioner AHP dari Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani dapat disimpulkan dengan menjumlahkan hasil dari jumlah eigen vector utama dari kedua hasil perhitungan kuisisioner AHP. Untuk perhitungan hasil jumlah eigen vector utama dapat dilihat pada tabel 4.35.

Tabel 4.53 Jumlah Eigen vector utama perhitungan AHP Bappeda dan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan Rakyat

Alternatif strategi	eigen vector utama I	eigen vector utama II	Σ Eigen Vector utama I dan II
A	0.11	0.05	0.16
B	0.11	0.07	0.18
C	0.07	0.05	0.12
D	0.17	0.07	0.24
E	0.10	0.10	0.2
F	0.12	0.08	0.2
G	0.11	0.09	0.2
H	0.11	0.14	0.25
I	0.03	0.17	0.2
J	0.07	0.18	0.25

Alternative strategi yang memiliki nilai *eigen vector* terbesar adalah yang memiliki prioritas tertinggi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dari perhitungan pada tabel 4.35 dapat disimpulkan bahwa alternative strategi E, F dan G memiliki prioritas teringgi dengan nilai eigen vector terbesar sebanyak 0,2. E,F dan G adalah Pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah; Penghijauan berkelanjutan; dan Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan. Prioritas pengelolaan hutan dengan melakukan kemitraan, meningkatkan sarana produksi dan insentif-disinsentif lebih dipilih oleh narasumber karena dalam pengelolaan hutan rakyat lebih menitik beratkan pada tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan.

Tabel 4.54 Alternatif prioritas pengelolaan hutan rakyat menurut Bappeda dan Dinas Kehutanan Kabupaten Jombang

Eigen Vector Utama`	prioritas pengembangan
0.25	H = Kemitraan
0.25	J = Meningkatkan sarana produksi
0.24	D = Insentif dan disinsentif
0.20	E = Pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah
0.20	F = Penghijauan berkelanjutan
0.20	G = Pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan
0.20	I = Mengoptimalkan koperasi MDH
0.18	B = Agroforestry
0.16	A = Mengembangkan hasil hutan secara optimal
0.12	C = Tebang pilih

4.5 Arahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Menurut analisis SWOT dalam pengembangan pengelolaan hutan di Desa Wonosalam dan penentuan prioritas pengembangan dengan menggunakan teknik AHP, maka arahan pengembangan pengelolaan hutan produksi di Desa Wonosalam sebagai berikut:

4.5.1 Arahan pengelolaan hutan Kawasan

Alternatif strategi yang dilakukan untuk pengelolaan hutan kawasan bersama masyarakat di Desa Wonosalam yaitu (1) pengelolaan teknis disektor kehutanan; (2) peningkatan SDM; (3) meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Rencana pengelolaan hutan dengan menekan tingkat degradasi hutan bertujuan untuk menekan tingkat degradasi hutan di Hutan Kawasan sangat diperlukan untuk menjaga luas dan kualitas tegakan hutan agar tetap terjaga. Rencana untuk menekan tingkat degradasi hutan tersebut masuk dalam analisis SWOT sektor kehutanan. Arahan pengembangannya yaitu:

- Agroforestry
- Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
- Penegakan hukum
- Penghijauan berkelanjutan

Prioritas pengembangan yang dipilih dalam menekan tingkat degradasi hutan yaitu agrofotestry, THPB dan kemudisn Penghijauan berkelanjutan. Sedangkan untuk rencana peningkatan kualitas SDM diprioritaskan pada pengembangan hasil hutan secara optimal, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan

4.5.2 Arahan pengelolaan hutan rakyat

Alternatif strategi yang dilakukan untuk pengelolaan hutan rakyat di Desa Wonosalam yaitu (1) meningkatkan perekonomian masyarakat desa; (2) peningkatan SDM; (3) pengelolaan teknis disektor kehutanan.

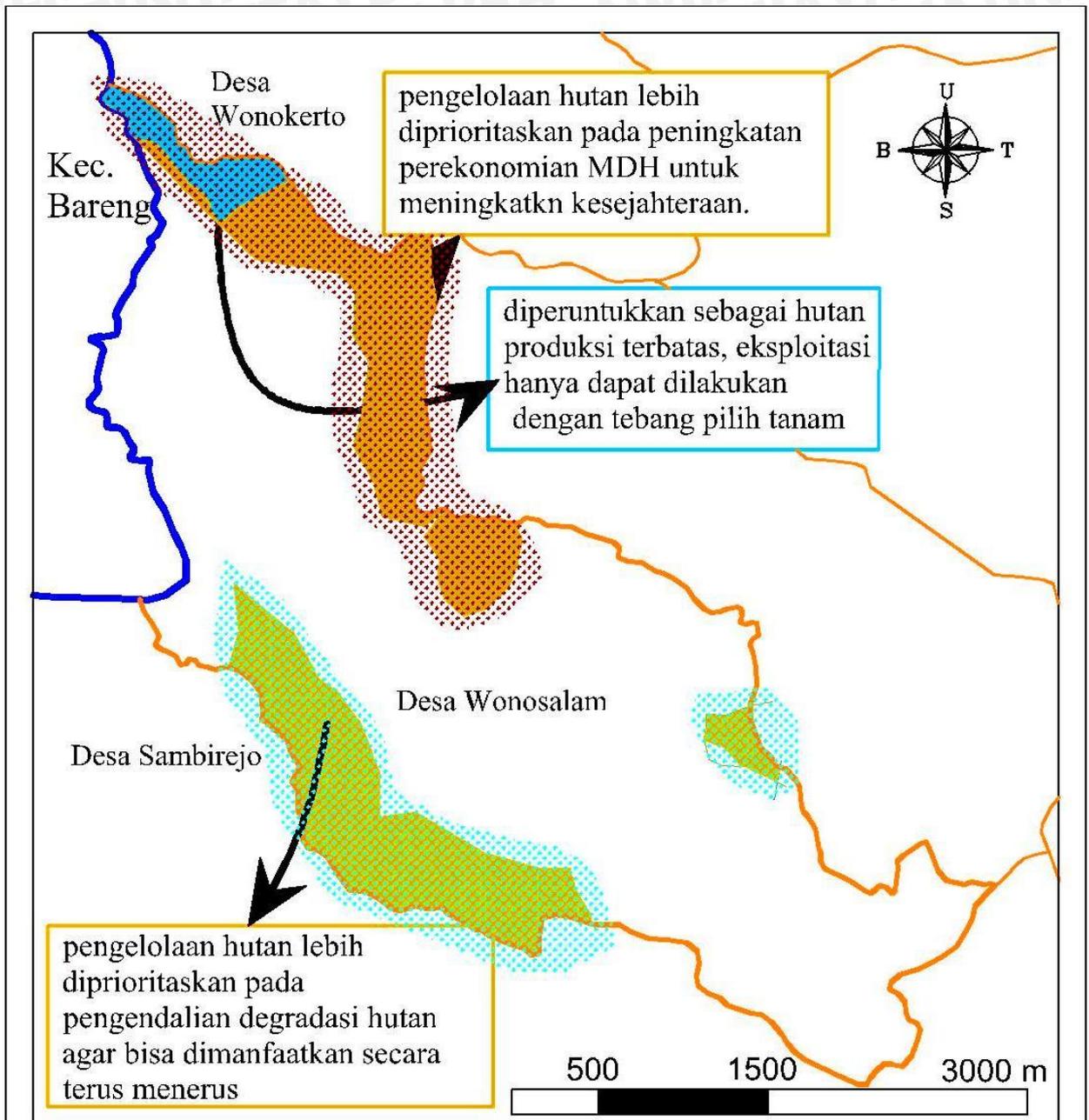
Rencana pengelolaan hutan dengan lebih mengutamakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa yaitu bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan sumber penghasilan yang lebih besar dari pengelolaan hutan rakyat dari pada hutan kawasan, karena dalam pengelolaan hutan kawasan, ruang gerak masyarakat harus dibatasi untuk menjaga kelestarian hutan kawasan agar tetap bisa dimanfaatkan secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah daerah yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan. Rencana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan masuk dalam analisis SWOT sektor kehutanan. Arahan pengembangannya yaitu:

- Mengembangkan hasil hutan secara optimal
- Kemitraan
- Mengoptimalkan Koperasi MDH

- Peningkatan sarana produksi yang sesuai dengan masyarakat desa

Prioritas pengembangan yang dipilih dalam analisis AHP yaitu kemitraan, kemudian meningkatkan sarana produksi. Sedangkan untuk rencana peningkatan kualitas SDM diprioritaskan dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah.





PETA 4.7
ARAHAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DESA HUTAN WONOSALAM

-  : Batas Administrasi Desa
-  : Hutan Produksi Milik Negara
-  : Hutan Produksi Milik MDH

